

6.664-2010

CImplementasi COREMAP

**Di Kabupaten Selayar
Partisipasi Masyarakat dan
Manfaat Sosial Ekonomi**

M I L I K
PERPUSTAKAAN PPK - LIPI

CImplementasi COREMAP

**Di Kabupaten Selayar
Partisipasi Masyarakat dan
Manfaat Sosial Ekonomi**

Oleh:

**SUKO BANDIYONO
NGADI
TONY SOETOPO
MASYHURI**



COREMAP-LIPI

**Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II – LIPI)
Jakarta, 2009**



LIPI

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Implementasi COREMAP di Kabupaten Selayar: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi/Suko Bandiyono, Ngadi, Tony Soetopo, Masyhuri Imron – Jakarta: 2010.
xviii + 122 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8717-46-5

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333. 911



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720
Telp.: (021) 5207205, 5221687
E-mail: ppk-lipi@rad.net.id

PERPUSTAKAAN PPK - LIPI	
HADIAH / TIKAR REU	Coremep
NO. INDUK	6.664-2010
NO. KLASIFIKASI	339.59:552.98 (910.637)
PARAF	:

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2008. Kajian sosial – ekonomi tahun 2006 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2008 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Timur. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami

sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Desa Buki dan Bungaiya serta Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RINGKASAN

Penelitian implementasi Coremap di Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan coremap dari aspek sosial-ekonomi. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengkaji pengetahuan masyarakat tentang pelestarian terumbu karang dan kegiatan COREMAP; (2) Mengkaji perubahan perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut; (3) Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP; (4) Mengkaji manfaat sosial-ekonomi dari kegiatan COREMAP

Penelitian menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan bersifat kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang isinya mencakup variabel kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Studi dilakukan di 4 desa lokasi Coremap yaitu Desa Buki (Kecamatan Buki) dan Desa Bungaiya (Kecamatan Bontomatene) di daratan P. Selayar serta Desa Bontobaru dan Desa Bontobulaeng untuk Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kemudian di tiap desa yang menjadi obyek studi dipilih dusun sampel secara purposif dengan memberi prioritas daerah pesisir. Adapun pemilihan rumah tangga yaitu responden yang sama pada saat penelitian tahun 2008. Responden rumahtangga yang pindah diganti dengan rumah tangga yang berdekatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang dan kegiatan COREMAP telah tinggi. Hal ini berarti bahwa program sosialisasi COREMAP telah menimbulkan dampak positif dilihat dari penguasaan pengetahuan. Banyak diantara mereka yang setuju kebijakan pelarangan pengambilan terumbu karang, pelarangan menggunakan alat tangkap yang merusak terumbu karang seperti bom dan racun sianida. Menurut mereka telah ada kecenderungan adanya penurunan penggunaan bom

dan racun sianida. Meskipun demikian masih memerlukan upaya yang lebih keras untuk mensosialisasikan COREMAP mengingat masih ada kelompok kecil masyarakat yang belum mengetahui manfaat terumbu karang dan kegiatan COREMAP. Selain itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan serta penggunaan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan juga belum tinggi.

Walaupun kegiatan COREMAP mengalami banyak kendala, namun demikian keberadaan COREMAP di dua kawasan lokasi penelitian ini memberikan dampak positif khususnya dalam penyadaran masyarakat tentang arti pentingnya penyelamatan terumbu karang. Hal itu terbukti terjadinya penurunan kegiatan masyarakat yang menggunakan obat bius (potassium/sianida) dan bom di kawasan terumbu karang. Informasi larangan penggunaan obat bius dan bom telah menyebar pada sebagian nelayan lokal dan nelayan pendatang sehingga sebagian nelayan yang biasanya menggunakan obat bius/potasium dan bom tidak berani melakukan kegiatannya di lokasi ini.

Pengetahuan masyarakat di kawasan pulau kecil tentang terumbu karang sudah cukup baik, hal itu terlihat banyaknya masyarakat yang sudah mengetahui bahwa terumbu karang sebagai makhluk hidup dan mengetahui berbagai kegunaan terumbu karang. Namun demikian sebagian masyarakat masih belum mengetahui bahwa terumbu karang sebenarnya merupakan jenis hewan. Masyarakat juga mengetahui dan memiliki pandangan bahwa terumbu karang itu perlu dilestarikan karena memiliki peranan penting (tempat pemijahan ikan). Sementara itu sebagian besar responden berpandangan bahwa terumbu karang di sekitar kawasan desa kondisinya kurang baik (rusak).

Adanya berbagai kegunaan terumbu karang, sebagian besar masyarakat tidak menyetujui pengambilan karang baik karang hidup maupun karang mati. Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui adanya aturan pemerintah yang melarang mengambil dan merusak terumbu karang dan sebagian besar masyarakat menyetujui adanya larangan tersebut. Sementara masyarakat juga mengetahui adanya sanksi

yang dikenakan bagi masyarakat/nelayan yang melanggar aturan tersebut.

Berkaitan dengan beberapa jenis alat tangkap yang merusak lingkungan sumber daya laut (termasuk terumbu karang), terutama potasium, bom dan pukut harimau, sebagian masyarakat sudah mengetahui. Sementara itu sebagian besar masyarakat/responden juga sudah mengetahui bahwa penggunaan pukut harimau dilarang dan adanya sanksi bagi mereka yang melanggar. Namun demikian dalam kaitannya penggunaan pukut harimau tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pukut harimau dilarang oleh pemerintah, hal itu karena di kawasan ini tidak ada nelayan yang menggunakan pukut harimau, sehingga sosialisasi tentang pukut harimau tidak pernah ada. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa penggunaan bom dan obat bius saat ini ada kecenderungan terjadi penurunan yang cukup tajam, meskipun masih ada di beberapa lokasi.

Berkaitan dengan keberadaan kegiatan Coremap, meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui, namun jumlah yang belum mengetahui juga masih cukup banyak. Hal itu membuktikan bahwa sosialisasi tentang kegiatan Coremap masih kurang. Kurangnya sosialisasi tentang kegiatan Coremap karena fasilitator maupun senior fasilitator (Seto) jarang ada di lokasi desa binaan, sementara fasilitator maupun pengurus lain (LPSTK) kurang memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi.

Meskipun sudah banyak yang program yang dilakukan melalui program Coremap, namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kegiatan tersebut. Bagi mereka yang sudah mengetahui, sebagian besar mengaku tidak terlibat, sehingga pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Coremap masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi juga disebabkan banyak kegiatan Coremap yang pelaksanaannya masih eksklusif, kurang melibatkan masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan pembentukan LPSTK, meskipun sudah melibatkan masyarakat, tetapi jumlah masyarakat yang terlibat jumlahnya terbatas, masih banyak

masyarakat yang tidak dilibatkan. Begitu pula dalam penyusunan RPTK maupun penentuan DPL hanya melibatkan pengurus LPSTK, fasilitator, motivator, Seto dan tokoh masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mengetahui kegiatan LKM (Lembaga Keuangan Mikro), kecuali hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan. Sementara itu sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apalagi terlibat dalam kegiatan pokmas (kelompok masyarakat), karena sampai saat ini tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pokmas. Bahkan, beberapa orang yang dianggap anggota pokmas justru banyak yang tidak mengetahui status keanggotaannya.

Pendapatan penduduk di kedua kawasan (daratan dan pulau kecil) menunjukkan terjadi peningkatan baik rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita pada kurun waktu 2006-2008. Pendapatan rumah tangga di Bontomatene dan Buki meningkat sebesar 17,81 persen dan di Pasimasunggu Timur naik sebesar 42,9 persen. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan cukup tinggi, tetapi sebagian besar penduduk di kedua kawasan tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan tingkat kabupaten. Tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi jika diukur dari batasan garis kemiskinan 1,35 \$ US per hari. Distribusi pendapatan rumah tangga juga memperlihatkan jumlah rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan rendah cukup besar.

Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan pulau kecil lebih besar dibandingkan dengan pulau besar, tetapi rata-rata pendapatan per kapita dan pendapatan rumah tangga di kawasan daratan tetap lebih besar dibandingkan kawasan pulau kecil. Pendapatan per kapita di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil pada tahun 2008 masing-masing sebesar 276 ribu rupiah dan 195 ribu rupiah. Adapun rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan daratan pulau besar 940 ribu rupiah dan di pulau kecil 725 ribu rupiah. Distribusi pendapatan di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kedua kawasan mempunyai pendapatan rendah yaitu di bawah Rp 500 ribu.

Peningkatan pendapatan penduduk dilokasi COREMAP berkaitan dengan beberapa faktor seperti : pertama, kenaikan harga ikan (baik ikan laut maupun ikan tambak (bandeng)), karena adanya inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Kedua, hasil panen padi yang cukup bagus karena satu tahun terakhir bisa panen dua kali, karena adanya curah hujan yang cukup tinggi. Ketiga, penangkapan ikan sunu yang harganya cukup tinggi, karena adanya penampung di Bonto Baru. Hal itu didukung dengan kebijakan pemerintah memberi bantuan ketinting (perahu), sehingga hasil penangkapan sunu bisa lebih baik. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan pendapatan, tetapi secara riil pendapatan penduduk di kedua lokasi hampir sama, karena peningkatan pendapatan tersebut belum memperhitungkan inflasi di daerah. Jika dikontrol dengan inflasi di daerah, pendapatan penduduk di kedua lokasi cenderung sama sehingga tingkat kesejateraan nya tidak mengalami perubahan. Peningkatan pendapatan tampaknya juga tidak berhubungan dengan kegiatan coremap di daerah tersebut, karena sampai saat ini usaha ekonomi produktif yang dijalankan di kedua lokasi tersebut baru berjalan dan tidak memberikan dampak positif yang secara langsung dirasakan masyarakat. Dana bergulir hanya sekitar 25 juta, sehingga sifat dana hanya sebagai dana pendukung untuk usaha rumah tangga.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Coremap di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi tentang kegiatan Coremap di kawasan pulau besar (daratan) maupun di pulau kecil (Pulau Jamea, Pasimasunggu Timur) perlu lebih ditingkatkan, baik yang berkaitan dengan keberadaan Coremap maupun berkaitan dengan kegiatan Coremap, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan keberadaan Coremap dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat melihat dan mengetahui manfaat dan pentingnya kegiatan Coremap.

- Keberadaan Seto dan fasilitator di lokasi desa Coremap perlu dievaluasi. Terlalu seringnya Seto dan fasilitator meninggalkan lokasi desa binaan berpengaruh terhadap program Coremap, kiranya perlu dipantau melalui mekanisme tertentu, seperti membuat laporan bulanan (Seto dan fasilitator) yang diketahui oleh kepala desa setempat. Selain itu perlunya kontrol dari pemerintahan desa terhadap kegiatan Seto dan fasilitator yang dibuat oleh aparat desa atau pengurus LPSTK. Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Coremap dapat dikontrol melalui dua mekanisme yaitu dari pelaksana kegiatan (Seto dan fasilitator) dan pemerintah desa lokasi Coremap.
- Pentingnya evaluasi terhadap rekrutmen Seto dan fasilitator yang lebih transparan. Selain itu perlu kedisiplinan dan sanksi dalam melaksanakan kontrak kerja sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap Seto dan fasilitator perlu kesinambungan dengan periodisasi teratur (4 bulan, 6 bulan) sehingga dapat dilakukan pengawasan program secara berkesinambungan.
- Pertemuan antara pengurus LPSTK dengan pengurus Pokmas perlu lebih diintensifkan baik dalam merencanakan program kegiatan Coremap maupun melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan Coremap. Melalui pertemuan rutin, LPSTK dapat mengetahui kegiatan Pokmas khususnya dalam kegiatan MPA dan membantu menyelesaikan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi setiap Pokmas.
- Kegiatan yang dilaksanakan Coremap sebaiknya harus tetap melibatkan masyarakat secara aktif, meskipun kegiatan tersebut melibatkan pihak ke tiga. Penggunaan pihak ketiga, karena membutuhkan keahlian tertentu dalam pelaksanaan kegiatan program. Namun demikian dalam setiap kegiatan sebaiknya tetap melibatkan masyarakat untuk membantu mengerjakan.

- Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan perlu kiranya upaya peningkatan kegiatan MPA melalui pokmas agar supaya dapat membantu menambah pendapatan rumah tangga, terutama rumah tangga masyarakat pantai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Metodologi Penelitian	3
1.3. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan COREMAP	7
BAB II PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT	21
2.1. Lokasi di Desa Buki dan Desa Bungaiya	23
2.1.1. Terumbu karang	23
2.1.2. Alat Tangkap yang Merusak	26
2.2. Lokasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur	40
2.2.1. Terumbu karang	40
2.2.2. Alat Tangkap yang Merusak	42
2.2.3. Pengambilan Karang	44
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI COREMAP	57
3.1. Kawasan Desa Buki dan Bungaiya	57
3.1.1. Pengetahuan dan Partisipasi	57
3.1.2. Manfaat Sosial	62
3.1.3. Manfaat Ekonomi COREMAP	65
3.2. Pasimasunggu Timur	76
3.2.1. Pengetahuan dan Partisipasi	76

3.2.2. Manfaat Sosial	97
3.2.3. Manfaat Ekonomi	99
BAB IV PENUTUP	113
4.1 Kesimpulan	113
4.2 Rekomendasi	118
KEPUSTAKAAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daerah Penelitian dan Jumlah Sampel Rumah Tangga	6
Tabel 1.2.	Kegiatan Penyadaran COREMAP Tahun 2009	11
Tabel 1.3.	Kegiatan Pengawasan COREMAP Tahun 2009	13
Tabel 1.4.	Kegiatan Managemen COREMAP Tahun 2009	16
Tabel 2.1.1.	Pendapat Masyarakat tentang Pengetahuan, Kegunaan dan Kondisi Terumbu Karang menurut Kawasan	24
Tabel 2.1.2.	Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang di Kawasan P. Besar, Selayar	28
Tabel 2.1.3.	Pendapat Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya tentang Pengambilan Karang	29
Tabel 2.1.4.	Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya tentang Kebijakan dan sanksi Pengambilan Karang di Laut	30
Tabel 2.1.5.	Pernah tidaknya Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya Mengambil Karang di Laut Sebelum Ada COREMAP	31
Tabel 2.1.6.	Pernah tidaknya Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya Mengambil Karang Setahun Terakhir dan Kecenderungan Pengambilan	32
Tabel 2.1.7.	Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya tentang Larangan Penggunaan Bom	33

Tabel 2.1.8.	Pengetahuan Masyarakat tentang Adanya Sanksi Pelanggaran Kebijakan Penggunaan Bom untuk Penangkapan Ikan	34
Tabel 2.1.9.	Pengetahuan, Praktik Penggunaan Bom dan Kecenderungan Penggunaannya di Kawasan Buki dan Bungaiya	35
Tabel 2.1.10.	Pengetahuan, Praktik Penggunaan Sianida/Potas dan Kecenderungan Pengambilan di Kawasan Buki dan Bungaiya	36
Tabel 2.1.11.	Pengetahuan, Praktik Penggunaan Pukat Harimau dan Kecenderungan Penggunaannya di Kawasan Buki dan Bungaiya	38
Tabel 2.2.1.	Pengetahuan Masyarakat tentang Terumbu Karang dan Kondisinya	41
Tabel 2.2.2.	Pengetahuan Masyarakat tentang Manfaat Terumbu Karang	42
Tabel 2.2.3.	Pengetahuan Masyarakat tentang Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang	44
Tabel 2.2.4.	Pendapat Masyarakat tentang Pengambilan Karang	45
Tabel 2.2.5.	Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat tentang Peraturan Pemerintah/Larangan Pengambilan/Perusakan Karang	46
Tabel 2.2.6.	Pengetahuan Masyarakat Adanya Sanksi Pelanggaran Kebijakan Pengambilan Karang di Laut	46
Tabel 2.2.7.	Pernah tidaknya Masyarakat Mengambil Karang di Laut Sebelum Ada COREMAP	47

Tabel 2.2.8.	Pernah tidaknya Masyarakat Mengambil Karang Setahun Terakhir dan Kecenderungan Pengambilan	48
Tabel 2.2.9.	Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat tentang Larangan Penggunaan Bom	49
Tabel 2.2.10.	Pengetahuan Masyarakat tentang Adanya Sanksi Pelanggaran Penggunaan Bom untuk Menangkap Ikan	49
Tabel 2.2.11.	Pengetahuan, Praktik Penggunaan Bom menurut Masyarakat dan Kecenderungan Penggunaannya	50
Tabel 2.2.12.	Pengetahuan, Praktik Penggunaan Sianida/Potas menurut Masyarakat dan Kecenderungan Pengambilan	52
Tabel 2.2.13.	Pengetahuan, Praktik Penggunaan Pukat Harimau menurut Masyarakat dan Kecenderungan Penggunaannya	54
Tabel 2.2.14.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap Kegiatan Perusakan Sumberdaya Laut	55
Tabel 3.1.1.	Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kelembagaan COREMAP	59
Tabel 3.1.2.	Pengetahuan dan Keterlibatan/partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif COREMAP	60
Tabel 3.1.3.	Persentase penduduk yang tahu dan terlibat Kegiatan COREMAP, di Buki dan Bungaiya tahun 2009	61
Tabel 3.1.4.	Persentase Penduduk Menurut Keterlibatan dan Kemanfaatan Program Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	64

Tabel 3.1.5.	Pendapatan dari kenelayanan dan jumlah hasil tangkap satu tahun terakhir di Buki dan Bungaiya, Tahun 2009	66
Tabel 3.1.6.	Statistik Pendapatan penduduk di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009	69
Tabel 3.1.7.	Statistik Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009	72
Tabel 3.1.8.	Rata-rata Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan menurut musim di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009	73
Tabel 3.1.9.	Statistik Pendapatan anggota pokmas di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009	75
Tabel 3.2.1.	Pengetahuan adanya Coremap	76
Tabel 3.2.2	Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kelembagaan COREMAP	86
Tabel 3.2.3.	Pengetahuan Keberadaan Kegiatan Coremap	87
Tabel 3.2.4.	Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kelembagaan COREMAP	96
Tabel 3.2.5.	Persentase Penduduk menurut keterlibatan dan kemanfaatan program Kegiatan Pembangunan Fisik Desa	98
Tabel 3.2.6.	Pendapatan dari kenelayanan dan jumlah hasil tangkap satu tahun terakhir di Bontobaru dan Bontobulaeng, tahun 2009	101
Tabel 3.2.7.	Statistik pendapatan Rumah tangga di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Tahun 2009	102

Tabel 3.2.8.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009	104
Tabel 3.2.9.	Statistik Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan (ikan) per bulan Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Tahun 2009	106
Tabel 3.2.10.	Distribusi pendapatan Rumah Tangga per bulan Menurut Musim Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Kepulauan Selayar 2009	108
Tabel 3.2.11.	Distribusi Pendapatan Pokmas dan Non Pokmas Desa Bontobulaeng dan Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar 2009	111

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1. Pendapatan perkapita dan garis kemiskinan 1,5 US\$/hari di Desa Buki dan Bungaiya tahun 2009	70
Grafik 3.1.2. Distribusi rumah tangga di Desa Buki dan Bungaiya menurut kelompok pendapatan, Tahun 2009	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu masalah serius tentang sumber daya laut di Indonesia adalah terjadinya degradasi keberadaan ekosistem terumbu karang terutama akibat adanya eksploitasi yang tidak memperhatikan kaidah pelestarian akibat penggunaan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan penggunaan racun. Kerusakan serius terumbu karang di Indonesia terutama sejak kurun waktu dua dasawarsa terakhir, sejalan dengan peningkatan permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri akan biota laut dan terumbu karang. Berbagai jenis terumbu karang tertentu telah menjadi komoditi ekspor untuk keperluan bahan hias akuarium dan bahan industri. Selain itu kegiatan di darat yang mengakibatkan proses pelumpuran di lepas pantai, pembuangan limbah industri dan domestik juga mengakibatkan kematian terumbu karang.

Kerusakan ekosistem terumbu karang juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar.¹ Tingkat kerusakan terumbu karang di kabupaten tersebut diperkirakan mencapai 30 persen dari 2.000 hektar yang ada, padahal sebagian besar kehidupan penduduk menggantungkan pada daya dukung sumber daya laut, termasuk ekosistem terumbu karang. Terumbu karang yang ada tersebut telah menjadi habitat kehidupan 375 jenis ikan pelagis, demersial dan ikan hias dan 4 jenis penyu (Project Management Unit Kab.Selayar.2006:1, Mimeograph). Hasil penelitian CRITC-COREMAP II-LIPI (2007) menunjukkan bahwa untuk karang hidup (LC) tidak terlihat perbedaan persentase tutupan yang signifikan

¹ Atas dasar PP. 59 Tahun 2008 nama Kabupaten Selayar telah diganti dengan Kabupaten Kepulauan Selayar.

antara tahun 2006 dengan LC 33,48 % dan pada tahun 2007 sebesar 33,91 %. Selain itu biota CMR mengalami penurunan dari 948 individu/ha pada tahun 2006 menjadi 836 individu/ha pada tahun 2007. Hal ini tidak lepas dari penangkapan ikan yang sifatnya destruktif dilakukan oleh nelayan lokal, dan terutama oleh nelayan yang datang dari kabupaten tetangga yaitu Bulukumba, Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto (Bandiyono, dkk., 2006). Sebagai respons atas kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia pemerintah telah mendesain Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap). COREMAP adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan usaha pengelolaan terumbu karang dan merehabilitasi terumbu karang yang mengalami degradasi. Dengan adanya program tersebut diharapkan bahwa ekosistem terumbu karang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Untuk itu sumber daya laut perlu direhabilitasi, diproteksi dan dikelola dan selanjutnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan sekaligus mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir.

Dalam COREMAP II, pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang telah didesentralisir ke pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, tetapi dikoordinir secara nasional. Desentralisasi kegiatan COREMAP tersebut dimaksudkan agar program tersebut dapat mendukung dan sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir agar melakukan kerjasama dalam pengelolaan (*co-management*) secara berkelanjutan.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dari enam lokasi program COREMAP yang didanai Bank Dunia dan telah memasuki tahap kedua (2005-2009). Sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil dan dampak yang diharapkan dalam program tersebut, telah dilakukan monitoring dengan melakukan survei aspek sosial-ekonomi pada tahun 2006, tahun 2008 dan tahun 2009. Dengan adanya survei tersebut dapat diketahui seberapa jauh kegiatan COREMAP tahap kedua yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2009.

Dengan demikian dalam penelitian evaluatif ini telah memperoleh data dan informasi yang relevan baik yang sifatnya positif maupun beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program COREMAP baik di tingkat kabupaten maupun pada tingkat desa. Dengan adanya monitoring program tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja dalam sisa waktu kegiatan sampai dengan tahun 2011.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini Bank Dunia dan LIPI telah membuat perubahan indikator untuk mengevaluasi kesuksesan program COREMAP II dilihat dari aspek sosial-ekonomi adalah sebagai berikut :

- (1) Indikator pertama bahwa tingkat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial ekonomi berdasarkan 4 parameter yaitu :
 - Pengetahuan tentang pentingnya keberlanjutan terumbu karang dan program COREMAP serta kegiatannya.
 - Perubahan tingkah laku masyarakat dari sifat perusak ke ramah lingkungan.
 - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan COREMAP.
 - Manfaat ekonomi COREMAP bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Paling sedikit 70 persen nelayan dan masyarakat pantai di lokasi program mempunyai persepsi bahwa COREMAP mempunyai dampak positif dalam kesejahteraan dan status ekonomi sebelum akhir program.

1.2 . TUJUAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial-ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk

mencapai tujuan umum tersebut di atas, studi ini dibagi dalam tujuan khusus sebagai berikut :

1. Mengkaji pengetahuan masyarakat tentang pelestarian terumbu karang dan kegiatan COREMAP
2. Mengkaji perubahan perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut
3. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP
4. Mengkaji manfaat sosial-ekonomi dari kegiatan COREMAP

Metodologi yang digunakan dalam penelitian tahun 2009 pada prinsipnya tidak mengalami perubahan atau sama dengan desain penelitian tahun 2008 baik daerah penelitian dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tersebut jumlah responden mengalami penambahan sebanyak 60, khusus untuk anggota Pokmas. Selain itu beberapa orang responden yang diwawancarai pada tahun 2008 tidak dapat diwawancarai ulang pada tahun 2009, antara lain karena pindah dan telah meninggal dunia. Untuk itu telah diambil kebijakan dengan mengganti responden dengan tetangga terdekat.

Pemilihan Lokasi

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai perairan laut seluas 21,1 ribu km² dan mempunyai wilayah terumbu karang kurang lebih 2000 hektar. Wilayah perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah lama menjadi daerah tangkapan (fishing ground) oleh nelayan lokal dan lebih banyak adalah nelayan yang datang dari kabupaten tetangga yang mendapat sebutan sebagai nelayan andon. Wilayah tangkapan telah menyebar dari ujung utara P. Selayar sampai perbatasan dengan daerah Nusa Tenggara Timur. Nelayan dari luar kabupaten banyak datang ke Selayar karena daerah tersebut mempunyai potensi sumber daya laut terutama berbagai jenis ikan karang. Sebagai daerah kepulauan,

penduduk yang tinggal di sepanjang pesisir telah menggantungkan hidupnya dari hasil pemanfaatan sumber daya laut.

Untuk fase persiapan program COREMAP II telah diadakan kegiatan Survei Sosial-Ekonomi di 8 desa yaitu Bungaiya, Buki, Barugaiya, Parak, Appatanah, Laiyolo, Laiyolo Baru dan Patikarya (Project Management Unit Kab. Selayar : 3-4). Atas pertimbangan praktis, studi ini hanya dilakukan di 4 desa sampel yaitu 2 desa yang telah menjadi obyek penelitian Project Management Unit Kabupaten Kepulauan Selayar dan 2 desa di luar program penelitian tersebut. Meskipun demikian, dalam penelitian ini ke empat desa sampel yang dipilih secara purposif masuk dalam program COREMAP II.

Pengumpulan Data

Sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditetapkan, studi ini telah menggunakan dua pendekatan dalam mengumpulkan data yaitu bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Untuk melengkapi informasi data, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan yang terkait erat dengan tujuan penelitian. Survei pada tahun 2009 dilakukan pada pada bulan Oktober sedangkan pada waktu survei tahun 2008 dilakukan pada pertengahan bulan Mei selama dua minggu. Survei yang sama telah dilakukan pada bulan Agustus-September 2006 selama dua minggu masing-masing di Kecamatan Bontomatene/Kecamatan Buki dan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Dengan demikian penelitain selama ini telah mempunyai tiga set data untuk tahun 2006, 2008 dan 2009.

Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang isinya mencakup variabel kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam variabel sosial-ekonomi termasuk keterangan tentang anggota rumah tangga. Sedangkan untuk memperoleh data kesejahteraan keluarga diperoleh dengan : (1) menanyakan ekonomi rumah tangga dilihat dari pendapatan baik dari perikanan dan nonperikanan ; (2) menanyakan pemilikan asset rumah tangga. (3) Partisipasi dan Manfaat Bantuan COREMAP dan Non

COREMAP. Pertanyaan yang ada dalam kuesioner dijawab oleh responden kepala keluarga atau anggota rumah tangga yang mewakili.

Dalam studi ini tidak semua lokasi program COREMAP diteliti, namun hanya mengambil 4 desa yaitu Desa Buki (Kecamatan Buki) dan Desa Bungaiya (Kecamatan Bontomatene) di daratan P. Selayar serta Desa Bontobaru dan Desa Bontobulaeng untuk Kecamatan Pasimasunggu Timur². Kemudian di tiap desa yang menjadi obyek studi dipilih dusun sampel secara purposip dengan memberi prioritas daerah pesisir. Adapun pemilihan rumah tangga yaitu responden yang sama pada saat penelitian tahun 2008. Bagi responden rumahtangga yang pindah diganti dengan rumah tangga yang berdekatan Selain itu dalam penelitian tahun 2008 dan 2009 telah diwawancari dengan instrumen yang sama untuk anggota Pokmas untuk satu kecamatan seperti terlihat pada Tabel 1.1. Untuk mengoptimalkan jalannya pengumpulan data di masing-masing rumah tangga, telah dibantu oleh tenaga dari desa setempat yang berpendidikan SLTA ke atas dan mampu berbahasa Selayar. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kualitas data, selain mengenal keluarga-keluarga yang ada di dusun, mereka juga mampu berkomunikasi dan menerangkan butir-butir pertanyaan. Para pewawancara yang membantu pengumpulan data lebih dahulu menerima pelatihan singkat guna menyamakan pemahaman tentang maksud dan pengertian tiap butir pertanyaan dalam kuesioner. Berikut ini adalah daerah dan distribusi sampel survei tahun 2009:

Tabel 1.1.
Daerah Penelitian dan Jumlah Sampel Rumah Tangga

No	Kecamatan	Kawasan	Jumlah Sampel
1	Buki dan Bontomatene	Buki dan Bungaiya	122
2	Pasimasunggu Timur	Bontobulaeng Dan Bontobaru	129

² Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasimasunggu Barat sejak Desember 2003.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara diskusi mendalam dengan narasumber PIU, Kades, Fasilitator, Motivator, LPSTK, Pokmaswas, nelayan, tokoh masyarakat dan Pengurus Save Fund. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan mereka yang berkaitan dengan sumber pendapatan, partisipasi dan sekaligus mengetahui gambaran pengawasan terumbu karang, serta manajemen dana untuk UEP.

Pada waktu mengumpulkan data di masing-masing desa, tidak dijumpai masalah yang berarti. Hal ini karena kegiatan COREMAP di daerah tersebut telah dikenal masyarakat walaupun. Permukiman penduduk yang mengelompok serta ada penerangan listrik telah memudahkan jalannya pengumpulan data survei dan diskusi. Responden lebih senang diwawancarai pada sore dan malam hari bagda magrib, karena tidak mengganggu kegiatan mereka yang umumnya dilakukan pada pagi dan siang hari.

1.3. GAMBARAN PELAKSANAAN KEGIATAN COREMAP

Keberhasilan pelaksanaan COREMAP salah satunya ditentukan pemahaman pejabat dan pengelola COREMAP di tingkat Kabupaten. Hal ini karena semua kebijakan yang berkaitan dengan program, termasuk kebijakan anggaran pembiayaan program ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Pada tataran kabupaten, kebijakan ditentukan oleh Dinas DKP Kepulauan Selayar. Pentingnya pemahaman COREMAP karena proses, aturan dan mekanisme pelaksanaan program mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dengan berbagai modifikasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan aspirasi serta partisipasi masyarakat masing-masing daerah.

PIU/PMU di Kabupaten Selayar saat ini dipegang dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai *leading* kelembagaan yang dibantu oleh pejabat di lingkungan DKP Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengendalikan komponen COREMAP dalam pelaksanaan

program. Berdasarkan hasil diskusi dan kajian mengungkapkan bahwa pemahaman para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan program COREMAP cukup memadai. Para pejabat di DKP tersebut baik secara konseptual maupun tujuan umum COREMAP dalam penyelamatan terumbu karang cukup baik. Hal ini dilandasi bahwa wilayah Selayar sebagian besar merupakan wilayah laut dengan potensi perikanan yang sangat besar sehingga pentingnya penyelamatan terumbu karang dari usaha penggunaan bom dan potassium oleh nelayan.

Selain itu informasi tentang penyelamatan terumbu karang telah ditekankan bahwa terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan atau "rumah ikan". Pemahaman pengelolaan terumbu karang yang berbasis masyarakat, pendekatan partisipatif juga relative juga baik. Namun demikian pemahaman terhadap program COREMAP termasuk penyelamatan trumbu karang kurang diikuti dengan baik oleh Bupati dan anggota DPR Daerah, sehingga program implementasi COREMAP lebih dianggap sebagai "proyek" jangka pendek yang hasilnya segera dapat diperoleh setelah selesai kegiatan (proyek) yaitu saat dana selesai dipertanggungjawabkan. Padahal, program penyelamatan tertumbu karang melalui beberapa tahapan dan hasilnya akan kelihatan setelah dalam kurun waktu panjang yaitu beberapa dekade ke depan setelah melewati beberapa pejabat Bupati.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar pengelolaan COREMAP masih mengalami kendala manajemen karena faktor internal dan eksternal. Hal ini terkait dengan adanya keterbatasan petugas pelaksana COREMAP baik jumlah maupun kualitas. Pengelola COREMAP sebagian memiliki rangkap jabatan, sehingga kurang maksimal dalam mengimplementasikan program di kawasan lokasi COREMAP yang jumlahnya 42 desa. Banyak lokasi desa COREMAP yang jauh di pulau-pulau kecil dan keadaan cuaca yang sering tidak bersahabat telah menyulitkan pelaksanaan kegiatan COREMAP. Adanya jabatan rangkap pengelola COREMAP, kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara kontinyu sesuai mekanisme, tetapi dilakukan bersamaan dengan

kegiatan tugas kantor, sehingga kegiatan pengawasan dilakukan dalam 4 atau 6 bulan sekali.

Selain itu juga sering adanya mutasi pegawai dan perubahan peraturan di tingkat kabupaten juga sering menghambat pelaksanaan program COREMAP. Tenaga pelaksana tidak selalu berada di tempat kerjanya dan cenderung menempatkan pekerjaan COREMAP bukan sebagai pekerjaan pokok tetapi sebagai pekerjaan/ sampingan guna memaksimalkan pendapatan atau sebagai terminal sementara. Hal ini terjadi karena kegiatan COREMAP adalah pekerjaan proyek yang berarti ada batas waktu berakhirnya sementara itu jumlah tenaga berkualitas di daerah Selayar juga terbatas jumlahnya. Permasalahan lain bahwa COREMAP telah dipersepsikan dan diberlakukan oleh stakeholder penentu seperti halnya proyek pembangunan sektoral yang ada hasil cepat pada akhir anggaran dan kelihatan hasil (*output*) fisiknya. Padahal, COREMAP merupakan program jangka panjang yang tidak selalu diikuti dampak cepat namun bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya laut. Oleh karena itu koordinasi kegiatan COREMAP masih belum bisa berjalan secara efektif dan masih perlu proses perbaikan.

Akibatnya dana pendamping COREMAP melalui APBD persetujuannya memerlukan waktu dan nilainya relative kecil. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, pelaksanaan COREMAP masih sangat tergantung dari pemerintah pusat (DKP), hal ini terlihat implementasi setiap tahapan program masih menunggu turunnya dana/anggaran dari pemerintah pusat. Revisi kegiatan juga harus melalui persetujuan dari DKP pusat antara lain untuk revisi tambahan dana bagi 10 desa baru yang akan menjadi desa COREMAP tahun 2009. Selain dana dari pusat, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar juga harus mengalokasikan dana pendamping melalui APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu sebesar 10 persen anggaran pusat. Sehingga kesibukan kegiatan COREMAP terjadi pada bulan-bulan tertentu setelah turunnya dana baik dari pemerintah pusat dan anggaran APBD yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kepulauan Selayar. Aturan pencairan dana dan lelang yang rumit juga menghambat realisasi kegiatan COREMAP.

Komponen COREMAP

Dalam uraian berikut ini akan dikemukakan tentang komponen COREMAP yang menyangkut aspek penyadaran pengawasan dan pengelolaan berbasis masyarakat.

Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)

Kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan selama ini berdasarkan pada delapan program yaitu : (1) sosialisasi PA, (2) pembuatan poster, kaos, billboard, dan kalender, (3) cerdas cermat untuk SMU sederajat, (4) penulisan karya ilmiah untuk SMU sederajat, (5) jurnalis writing untuk para wartawan, (6) pelatihan penggunaan kurikulum SD – SMA yang dilakukan secara kontraktual, (7) Percetakan buku Mulok, (8) Pameran dan konas. Kegiatan sosialisasi COREMAP dilakukan oleh PA secara langsung kepada masyarakat. Saat ini sosialisasi telah mencakup semua lokasi Coremap yang berada di daratan pulau besar, sedangkan tahun 2009 ditargetkan sosialisasi akan masuk ke wilayah pulau-pulau kecil dan tambahan desa baru. Sosialisasi di masyarakat biasanya dilakukan di aula desa/kantor desa dan melibatkan Pokmas, LPSTK, warga masyarakat dan aparat desa. Sosialisasi ke pulau-pulau kecil mengalami kendala yang cukup berarti karena akses ke wilayah-wilayah tersebut hanya didapat dilakukan dengan perahu, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biasanya tim PA bersama-sama dengan tim lain secara bersama-sama ke pulau kecil untuk menghemat anggaran. Hubungan dengan fasilitator di pulau-pulau kecil juga mengalami kendala, dan saat ini hubungan dengan fasilitator yang jauh dilakukan dengan radio.

Tabel 1.2.
Kegiatan Penyadaran COREMAP Tahun 2009

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Status/Ket.
1	Pembuatan Materi Penyadaran Masy.	94,17	94,17	Tinggal leflet (Swa)
2	Pembuatan Film Coremap	-	-	Proses (tender)
3	Bulletin COREMAP II	-	-	Proses (Swa)
4	Sosialisasi PA	-	43,10	Berjalan 4 zona (Swa)
5	pagelaran seni dan budaya maritim	-	-	Proses (swa)
6	Munas dan Pameran Munas	-	-	Menunggu undangan NCU (Swa)
7	Pelatihan guru penggunaan muloc	-	-	Persiapan (Swa)
8	Lomba Cerdas Cermat	-	-	Persiapan (swa)
9	Kontes Inovator Muda	-	-	Persiapan (Swa)
10	Duta Karang	-	-	Persiapan (Swa)
11	Journalist Writing Competition	-	-	Proses (Swa)

Sumber : COREMAP Kabupaten Selayar 2009

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah keterbatasan materi-materi sosialisasi, sementara diperlukan materi-materi baru yang menarik dan tidak membosankan. Selain itu, dalam COREMAP terlalu banyak istilah-istilah asing yang sulit dimengerti terutama oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan muatan lokal yang akan dilakukan secara kontekstual. Hal lain yang menjadi kendala yaitu kuota untuk pelatihan guru terlalu

sedikit (SD=20 orang), sementara lokasi yang masuk COREMAP ada 42 desa. Jika satu desa diambil 1 guru saja, kuota tersebut belum mencukupi. Hambatan pelaksanaan kegiatan dari masyarakat berupa rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program yang dilakukan terutama di pulau-pulau kecil. Sampai dengan tahun 2009, kegiatan penyadaran masyarakat tentang perlunya penyelamatan terumbu karang masih tetap dilakukan pada tataran kabupaten misalnya melalui siaran radio, lomba tulis, cerdas cermat dan pameran.

Sejalan dengan upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang terumbu karang pada bulan Juni 2009 di Desa Buki telah diadakan workshop yang dihadiri oleh banyak peserta tidak saja dari pengurus LPSTK Buki tetapi juga dari desa lain. Penyelenggaraan sosialisasi tersebut dilakukan oleh PA tingkat kabupaten dibantu oleh pengurus COREMAP desa yaitu MD dan CF. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan COREMAP, pada bulan November 2009, CF setempat yaitu Sdr. Diana telah ikut pelatihan di Jakarta.

Pengawasan (Monitoring Controlling and Surveillance)

Kegiatan pengawasan oleh komponen COREMAP dilakukan tidak secara kontinyu. Pengawasan hanya dilakukan satu tahun sekali bersamaan dengan ketika melakukan patroli oleh pejabat DKP Kabupaten Kepulauan Selayar. Terbatasnya kegiatan patroli karena adanya berbagai kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya anggaran, terbatasnya personil pengawasan dan terbatasnya sarana (kapal) untuk melakukan kegiatan pengawasan, sehingga PMU harus mensesiasati dalam menggunakan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan di setiap lokasi COREMAP. Personil Pengawasan yang melakukan pengawasan dibentuk dengan SK KPA /Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan anggota 3 orang.

Di Desa Buki kendati pengawasan telah terbentuk sebelum tahun 2005 dengan anggota 10 orang, namun dalam kenyataan kinerja pengawasan masih rendah. Bahkan pada tahun 2009 setelah ada kapal 'joloro' pengawasan DPL juga tidak optimal. Hal ini terjadi karena

terbatasnya dana operasional untuk pengawasan. Bahkan telah terjadi konflik antara Ketua Pokmaswas dengan Kades Buki dimana penguasaan kapal joloro sempat ditarik ke desa. Namun karena desa juga tidak mempunyai dana operasional akhirnya kapal tersebut dikembalikan ke ketua Pokmaswas (Pak Nur). Kapal joloro itu juga tidak dapat dimanfaatkan untuk mencari ikan dengan alasan nelayan tidak punya budaya kerja berkelompok dan biaya operasional kapal relatif tinggi. Untuk mengurangi resiko kerusakan kapal selama tidak digunakan kapal ditinggelamkan di laut.

Tabel 1.3.
Kegiatan Pengawasan COREMAP Tahun 2009

No	Uraian Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Status/Ket.
1	Penyusunan Management Plan KKLD	-	-	Proses tender
2	Operasional Patroli Terpadu MCS	-	14,08	1 kali (swa)
3	Bantuan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing	-	-	Belum ada kasus yang diproses (Swa)
4	Pengembangan Infrastruktur KKLD	-	-	Proses tender
5	Pengadaan Multi Purpose boat	-	-	Tdk punya Pendamping (tender)
6	Pengadaan Mini Lab	-	-	Menunggu Proses

Sumber : COREMAP Kabupaten Selayar 2009

Menurut keterangan Pak Nur pengawasan lebih ditekankan pada pemberian pengertian secara tatap muka kepada nelayan-nelayan dari desa tetangga yang tadinya sering masuk ke Desa Buki. Pak Nur telah mengenal secara pribadi nelayan-nelayan dari desa tetangga

tersebut. Kendati demikian sebulan sekali Pak Nur dan beberapa orang melakukan pengawasan DPL sambil mencari ikan. Kegiatan lain yang menunjang adalah diadakannya sosialisasi tentang keberadaan DPL dan pemasangan rambu penanda DPL yang dilakukan bulan Mei 2009. Selain itu di Desa Buki telah dikeluarkan Perdes No.2 tahun 2008 tentang DPL.

Adapun kegiatan pengawasan di Desa Bungaiya nyaris tidak pernah dilakukan karena ketiadaan perahu pengawas karena telah rusak dan sekaligus lemahnya koordinasi anggota Pokmas. Pengawasan terbatas hanya dilakukan dengan pengamatan dari pantai yang kebetulan ada rumah pos atau secara kebetulan ada laporan nelayan yang sedang mencari ikan. Informasi yang dapat diperoleh bahwa pencuri ikan datang dari nelayan luar desa termasuk nelayan andon yang datang dari daratan Sulawesi.

Di Desa Bontobulaeng dan Desa Bontoharu kegiatan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) sampai saat dilakukan penelitian belum memiliki kegiatan. Kegiatan utama Pokmaswas untuk melakukan patroli dan memantau di kawasan terumbu karang di sekitar pulau Batu (kawasan DPL) kegiatan ilegal belum dilakukan oleh kelompok ini. Salah satu kendala bahwa sampai saat ini Pokmaswas di kawasan tersebut belum memiliki kapal (joloro) untuk melakukan patroli, sehingga Pokmaswas tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan patroli dan pemantauan terhadap kegiatan ilegal di kawasan terumbu karang di kawasan Pasimasunggu Timur.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Management*)

Pengelolaan berbasis masyarakat dilakukan agar masyarakat merasa ikut memiliki program COREMAP. Dengan ikut memiliki, maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi, sehingga dengan partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan program Coremap bisa lebih berhasil. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan agar pengelolaan berbasis masyarakat bisa berjalan dengan efektif, adalah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang. Sosialisasi peralatan tangkap ikan yang digunakan masyarakat adalah peralatan tangkap yang ramah lingkungan. Dengan peralatan yang demikian maka kerusakan sumberdaya (terumbu karang) dapat dicegah, sehingga diharapkan ikan yang berada di kawasan perairan itu semakin berkembang biak, sehingga dalam jangka panjang tingkat produktivitas nelayan akan semakin baik. Pada dasarnya telah disosialisasikan tentang pelestarian terumbu karang antara lain adanya himbauan untuk tidak : Menyentuh terumbu karang, Menendang terumbu karang, Berjalan di atas terumbu karang, dan Mengumpulkan terumbu karang. Selain itu dalam sosialisasi telah ditekankan untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak ekosistem terumbu karang seperti penggunaan bom dan racun potassium.

Pada saat penelitian dilakukan sosialisasi oleh koordinator CBM di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilaksanakan kepada masyarakat di berbagai lokasi COREMAP, yang tersebar di 42 desa. Meskipun demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh koordinator CBM kurang berjalan dengan lancar, karena Seto yang berkedudukan di kecamatan-kecamatan dan fasilitator yang ada di desa sering tidak berada di lokasi COREMAP, terutama yang di pulau-pulau. Akibatnya berbagai informasi yang berkaitan dengan program COREMAP tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, larangan penggunaan obat bius dan bom serta pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak sampai ke masyarakat, ataupun kalau sampai, penjelasannya tidak sampai tuntas.

Ada dua program yang dilakukan oleh COREMAP di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pemberian *village grant* dan *seed fund* untuk mata pencaharian alternatif. Semua itu dengan satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan asumsi bahwa perusakan terumbu karang akan sulit dihindari jika kondisi masyarakatnya masih miskin, karena dengan kemiskinan yang dialami maka masyarakat akan melakukan berbagai cara untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun dengan merusak lingkungan laut. Pada tahun 2008 telah dilokasikan di tiap desa sebesar Rp.25 juta dan pada tahun 2009 ditambah lagi dana *seed fund* dalam jumlah yang sama.

Tabel 1.4.
Kegiatan Manajemen COREMAP Tahun 2009

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Status/Ket.
1	Review Program di RPTK	-	26,11	4 Zona selesai (Swa)
2	Studi Pembelajaran Pokmas	-	-	Proses Tender
3	Biaya Seto, Fasilitator dan Motivator	31,15	39,23	Berjalan (community)
4	Fasilitasi Penyusunan Perdes	-	-	Proses Tender
5	Penyempurnaan Pondok Informasi	-	-	Proses (Community)
6	Fasilitasi DPL	-	-	Proses
7	Pelatihan Keuangan bagi LPSTK dan LKM	-	-	Persiapan (Swa)
8	Village Grant	-	-	Proses
9	Pelatihan pengemb Usaha Produktif Desa	-	-	Persiapan (Swa)
10	Pelatihan Pasca Panen Perikanan dan Pemasaran	-	-	Persiapan (swa)
11	Seed Fund	-	-	Proses
12	Proyek pandu kemitraan pemasaran hasil MPA	-	-	Proses Tender

Sumber : COREMAP Kabupaten Kepulauan Selayar 2009

Village grant adalah dana yang digulirkan ke setiap desa COREMAP, dengan jumlah Rp 50 juta per desa. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada masyarakat yang berada di desa-desa lokasi COREMAP, agar mau berpartisipasi aktif mengawasi terumbu karang yang ada di sekitar desanya. Dana ini digulirkan dua kali, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan desa, terutama yang terkait dengan prasarana fisik, seperti bangunan pos untuk memantau terumbu karang, pengadaan kapal patroli, termasuk untuk membangun fasilitas sosial desa, MCK bahkan untuk bikin pagar tembok pasar.

Pada saat penelitian dilakukan, jumlah desa COREMAP yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sudah mendapatkan *village grant* ada 26 desa. Jadi masih ada 16 desa yang belum mendapatkan dana ini. Dana tersebut dianggarkan untuk 44 desa, sedangkan jumlah desa COREMAP semuanya ada 42 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Pada tahun 2009 hampir semua desa COREMAP telah mendapat dana *village grant*, kecuali 10 desa yang sedang diusulkan.

Untuk pengelolaan terumbu karang, CBM berusaha melibatkan masyarakat dalam membentuk DPL (daerah Perlindungan Laut), yaitu suatu kawasan perairan laut tertentu yang dilindungi, dan terdapat aturan-aturan tertentu dalam pemanfaatannya. Penentuan lokasi DPL diharapkan berasal dari masyarakat, begitu pula aturan-aturan yang mengatur pemanfaatannya, dan sanksi bagi para pelanggar aturan yang sudah disetujui bersama oleh masyarakat.

Dalam prakteknya, DPL yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, dengan difasilitasi oleh Seto dan fasilitator itu diusulkan ke CBM, kemudian CBM memerintahkan kepada CRITICs untuk mensurvei lokasi yang diusulkan. Jika lokasi itu dianggap layak maka kemudian disetujui, kemudian oleh masyarakat dipasang rambu-rambu yang menandakan bahwa lokasi itu wilayah DPL, dan dibuat peta yang menggambarkan zonasi di wilayah DPL. Pada tahun 2009 sebagian besar desa COREMAP telah membuat Perdes tentang DPL.

Tidak diperoleh data tentang jumlah desa COREMAP yang sudah memiliki DPL. Namun yang jelas penentuan DPL saat ini mengalami kendala dalam kaitannya dengan pemasangan rambu-rambu. Hal itu karena dana yang dialokasikan oleh pusat untuk DPL itu harus disertai dengan dana pendamping dari APBD. Akan tetapi, karena dana pendamping dari APBD pada tahun 2008 ini tidak memadai, maka rambu-rambu untuk DPL itu tidak bisa dibuat. Sebagai solusinya pihak COREMAP mengharapkan agar pengadaan rambu-rambu DPL itu dapat dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat setempat termasuk ada yang mengambil dana *village grant*. Akan tetapi, selain permasalahan dana yang tentunya juga akan memberatkan masyarakat setempat, sosialisasi bahwa rambu-rambu itu perlu dilakukan secara swadaya nampaknya belum sampai ke masyarakat, sehingga di beberapa desa, seperti di Pasimasunggu Timur, masyarakat masih setia menunggu dana dari COREMAP untuk pengadaan rambu-rambu DPL.

Untuk mengefektifkan kinerja pengelolaan yang berbasis masyarakat, beberapa pelatihan telah diadakan pada tahun 2005, yaitu: pelatihan ekologi terumbu karang, pelatihan budidaya laut, pelatihan selam dan RPTK. Tujuan pelatihan ekologi terumbu karang adalah memberikan keterampilan kepada masyarakat agar mampu mengidentifikasi jenis-jenis karang, menyebarkan berbagai informasi tentang ekologi karang secara lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu mengidentifikasi jenis-jenis karang, dan menyebarkan berbagai informasi tentang ekologi karang di Kabupaten Selayar. Adapun materi yang diajarkan meliputi teknik budidaya rumput laut, teknik budidaya teripang, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan. Adapun pelatihan selam dan RPTK dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami metode penilaian terumbu karang, mengetahui teori dasar ekologi terumbu karang dan mengetahui teknik pemahaman dasar selam SCUBA.

Penyadaran kepada masyarakat pentingnya penyelamatan terumbu karang dari kegiatan ilegal sangat penting dilakukan oleh

pejabat yang disertai untuk melakukan sosialisasi COREMAP. Kegiatan sosialisasi jika dilakukan secara konsisten dan efisien akan memberikan dampak penyadaran kepada masyarakat. Sosialisasi oleh Koordinator CBM telah dilaksanakan kepada masyarakat lokasi COREMAP. Kegiatan CBM adalah memberdayakan masyarakat antara lain larangan kegiatan kenelayan yang menggunakan obat bius (*potassium sianida*) dan bom ikan di kawasan terumbu karang, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Namun demikian sosialisasi yang dilakukan oleh Koordinator CBM kurang berjalan efisien terutama untuk daerah pulau-pulau kecil. Hal tersebut karena Seto dan fasilitator sering tidak berada di lokasi COREMAP sehingga berbagai informasi yang berkaitan dengan program COREMAP tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, larangan penggunaan obat bius dan bom dan pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak sampai pada nelayan lokal maupun nelayan pendatang (dari daerah lain) atau andon.

Pengembangan DPL

Daerah perlindungan laut di Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditetapkan untuk seluruh desa COREMAP yang diikuti dengan Peraturan Desa. Proses pelaksanaan pembuatan DPL diawali dengan musyawarah penentuan lokasi, gambar yang dituangkan dalam dokumen RPTK. Penentuan lokasi DPL tersebut didukung dengan hasil survei kondisi fisik lingkungan yang dilakukan oleh CRITC Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada umumnya pembangunan DPL dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar alokasi sebagian dana *village grant*.

Luas areal DPL untuk masing-masing desa COREMAP berbeda sesuai dengan keberadaan ekosistem terumbu karang yang dianggap masih bagus, strategis dan mudah untuk dikelola (*manageable*). Untuk membangun DPL diperlukan perlengkapan berupa pelampung, tali plastik, bendera dan material pemberat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan DPL antara lain keterbatasan ketersediaan dana peralatan, keterbatasan dana pemeliharaan (*maintenance*) dan

keterbatasan tenaga pelaksana. Ada pemikiran untuk mengatasi kelangkaan dana pengawasan dapat diperoleh dari alokasi dana pengawasan *illegal fishing* yang dipegang oleh masing-masing desa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak rambu-rambu DPL yang telah rusak bahkan hilang akibat faktor alam, yaitu ombak besar pada saat musim barat maupun dicuri/dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Selain itu Pokmaswas tidak mampu mengawasi secara efektif adanya nelayan dari luar desa yang sering masuk ke daerah DPL untuk mencuri ikan di zona inti. Hal ini terkait erat dengan keterbatasan dana operasional pengawasan yang menjadi tanggungjawab Pokmaswas. Selain itu sarana kapal "joloro " banyak yang rusak. Khusus untuk daerah pulau satu kapal joloro digunakan untuk satu kecamatan dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan (UPTD). Akhir-akhir ini UPTD tidak berfungsi sehingga keberadaan kapal joloro menjadi tidak terurus.

BAB II

PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT

Pengetahuan pada dasarnya adalah hasil dari proses pemahaman tentang suatu hal, termasuk tentang terumbu karang. Seseorang melakukan pemahaman bisa datang dari usaha sendiri memahami kondisi lingkungannya dan memahami atas dasar hasil alih pengetahuan. Dalam proses alih pengetahuan selalu ada aktor yang melakukan kegiatan memberi materi pengetahuan yang disampaikan kepada kelompok target. Hasil yang diharapkan dalam proses alih pengetahuan sangat tergantung pada kemampuan untuk menyampaikan materi, isi dari materi dan kualitas target sasaran. Dalam proses alih pengetahuan ada asumsi bahwa makin sering materi pengetahuan disampaikan kepada kelompok sasaran maka makin melekat penguasaan pengetahuan. Seseorang dalam menyerap pengetahuan mempunyai sikap terbuka, artinya segala informasi akan menjadi masukan tidak saja karena hasil tatap muka tetapi juga dari sumber informasi lain terutama dari media massa.

Penguasaan pengetahuan secara otomatis akan merubah sikap dan selanjutnya akan merubah perilakunya, kendati tidak ada jaminan bahwa pengetahuan yang dikuasainya akan menghasilkan perilaku yang positif tetapi sebaliknya juga bisa menimbulkan perilaku sebaliknya. Untuk menghindarkan akibat negatif yang ditimbulkan maka diperlukan kegiatan untuk mengarahkan ke tujuan awal bahwa proses alih pengetahuan akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Dalam konteks COREMAP proses alih pengetahuan akan mendukung empat parameter keberhasilan program seperti yang telah disebutkan pada bab pendahuluan.

Dalam penelitian ini ada pemikiran bahwa keberhasilan pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP di tingkat desa dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pemanfaatan sumber daya laut baik di tataran kabupaten dan LPSTK serta Pokmas. Pengetahuan dan sikap terhadap program COREMAP di tingkat desa dapat diimplementasikan apabila masyarakat memahami pemanfaatan sumber daya laut yang tujuan umumnya adalah pelestarian terumbu karang yang terdapat di sekitar desa lokasi COREMAP. Selain itu keberhasilan pengelolaan COREMAP terkait erat dengan bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat nelayan dalam menggunakan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan.

Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah lama terbuka dari pengaruh yang datang dari luar kabupaten sehingga atas pengetahuannya sendiri mereka mengetahui bagaimana nelayan andon telah penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti menggunakan bom dan racun potassium. Alat tangkap tersebut telah menimbulkan pengetahuan baru dan sekaligus merubah sikap dan dapat mengarah pada perilaku peniruan. Namun demikian mereka juga melihat kenyataan bahwa hasil tangkapan ikan makin menurun dilokasi terjadinya pengeboman dan pemotasan. Atas dasar pemahamannya sendiri mereka mulai menyadari bahwa alat tangkap tersebut justru merusak dan merugikan. Proses pemahaman makin kuat sejalan dengan makin meluasnya sosialisasi penyelamatan terumbu karang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk memperoleh bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya laut berikut ini adalah deskripsi hasil survei yang dilakukan di daratan P.Selayar tepatnya di Desa Buki dan Bungaiya. Selain itu juga dikemukakan hasil survei di Pasimasunggu Timur.

2.1. LOKASI DI DESA BUKI DAN DESA BUNGAIYA

2.1.1. Terumbu karang

Dalam survei yang dilakukan di bulan Oktober 2009 telah ditanyakan pendapat individu yang dijadikan responden yaitu kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke atas. Dalam kuesioner ada enam pertanyaan yang menyangkut terumbu karang. Jawaban atas enam pertanyaan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Hampir separuh responden tepatnya 41 persen menyebutkan bahwa nama lokal terumbu karang adalah "sasa". Nama sasa tersebut merupakan sebutan terumbu karang yang digunakan dalam bahasa Selayar. Sebutan tersebut tidak dapat dipahami oleh semua responden yang ternyata lebih tahu menggunakan kata karang laut atau hanya kata karang. Dengan demikian istilah terumbu karang secara meluas dapat dipahami oleh masyarakat di Desa Buki dan dan di Desa Bungaiya.

Pengetahuan berikutnya bahwa mereka umumnya memahami terumbu karang adalah makhluk hidup. Lebih dari sembilan puluh persen tepatnya 91,4 % responden dapat mengetahui secara tepat bahwa terumbu karang adalah makhluk hidup. Hal ini berarti hanya sebagian kecil dari mereka yang belum memahaminya. Sebagai implikasinya dalam proses sosialisasi materi yang masih perlu dijelaskan bahwa terumbu karang adalah makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup terumbu karang dapat mati manakala masih ada penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

Tabel 2.1.1
Pendapat Masyarakat tentang Pengetahuan, Kegunaan dan Kondisi
Terumbu Karang menurut Kawasan

Kategori Variabel	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pengetahuan sebagai makhluk hidup		
Mengetahui	91,4	75,0
Tidak mengetahui	2,4	6,3
Tidak tahu	5,2	18,7
Pengetahuan jenis makhluk hidup		
Hewan	23,1	4,2
Tumbuhan	61,5	62,5
Hewan dan tumbuhan	15,4	16,7
Pengetahuan tentang kegunaan terumbu karang		
Tempat ikan hidup	100	100
Melindungi biota laut	100	82,8
Melindungi pantai	98,3	98,4
Sumber bahan baku	43,9	25,4
Sumber pendapatan	53,4	40,6
Tempat wisata	81,0	90,6
Pengetahuan kondisi terumbu karang		
Baik	3,4	51,6
Kurang baik	67,2	32,8
Rusak	1,7	1,6
Sangat rusak	1,7	1,6
Tidak tahu	25,9	12,5
Pendapat perlunya dilestarikan		
Perlu	87,9	95,3
Tidak perlu	0,0	1,6
Tidak tahu	12,1	3,1
Jumlah responden (N)	58	64

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Pengetahuan yang masih rendah adalah pemahaman bahwa terumbu karang bukan sebagai hewan. Jawaban atas pertanyaan menunjukkan bahwa sebagian besar atau tepatnya 76,9 persen responden di desa Buki dan 95,8 persen responden di Desa Bungaiya menjawab bahwa terumbu karang adalah bukan hewan. Banyak di antara mereka justru menjawab bahwa terumbu karang adalah tumbuhan. Padahal jawaban yang benar terumbu karang adalah hewan. Pengetahuan tentang hal ini ternyata lebih tinggi di Desa Buki daripada di Desa Bungaiya. Rendahnya pengetahuan tersebut juga memerlukan alih pengetahuan yang meluas tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada petugas pengelola COREMAP.

Berikut ini adalah pengetahuan tentang kegunaan terumbu karang. Pada umumnya responden baik di Desa Buki maupun di Desa Bungaiya telah mengetahui kegunaan terumbu karang yaitu tempat ikan hidup, tempat ikan bertelur, tempat ikan mencari makan. Mereka juga banyak mengetahui terumbu karang dapat melindungi keragaman ikan, melindungi pantai dari ombak dan badai serta sebagai tempat wisata. Namun pengetahuan mereka tentang sumber bahan baku obat, hiasan dan sumber pendapatan masyarakat relatif masih rendah dimana di Desa Buki masing-masing sebesar 43,9 dan 53,4 persen. Di Desa Bungaiya pengetahuan tersebut lebih rendah lagi yaitu masing-masing 25,4 persen dan 40,6 persen. Pengetahuan tersebut relatif rendah karena penduduk di desa tersebut pada umumnya belum memanfaatkan terumbu karang sumber daya laut untuk industri kerajinan, tetapi tahu bahwa terumbu karang dapat digunakan untuk pondasi rumah. Di daerah tersebut banyak fondasi rumah dan bahkan pagar pekarangan yang berasal dari karang mati dari daratan.

Menurut pengetahuan orang-orang yang berusia lanjut, di Desa Buki sebelum tahun 80 an banyak warga masyarakat yang mengambil terumbu karang dari laut untuk keperluan fondasi rumah dan pagar. Saat ini dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya abrasi pantai di banyak lokasi, antara lain di pantai sebelah barat desa dekat Pondok Informasi Desa Buki. Hal yang menggembirakan saat ini kegiatan tersebut telah

berhenti dan pemerintah daerah telah membuat tembok sebagai benteng penghambat abrasi laut walaupun tembok yang ada sudah banyak rusak, tidak mampu menghadapi gempuran ombak besar pada saat musim barat, selain karena kualitas tembok yang rendah.

Pengetahuan masyarakat tentang kondisi terumbu karang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara Desa Buki dengan Desa Bungaiya. Di Desa Buki sebagian besar atau 77,2 persen menjawab bahwa kondisi terumbu karang di daerah mereka tergolong kurang baik. Mereka yang menjawab kondisi terumbu karang dalam kondisi baik hanya 3,4 persen. Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa kondisi terumbu karang di Desa Buki tergolong masih bagus. Hal ini juga diperkuat adanya jawaban yang mengatakan kondisi terumbu karang rusak dan sangat rusak masing-masing hanya 1,7 persen. Kondisi terumbu karang yang ada di laut Desa Bungaiya nampaknya masih dalam kondisi bagus. Jawaban responden menunjukkan bahwa yang menjawab baik dan kurang baik masing-masing sebesar 51,6 persen dan 32,8 persen. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Desa Bungaiya adalah desa karang, artinya desa yang sebagian besar wilayahnya adalah karang gunung. Dengan berlimpahnya keberadaan karang gunung tersebut masyarakat setempat tidak mengambil terumbu karang laut tetapi menggunakan karang gunung sebagai pagar pekarangan dan pondasi rumah. Bahkan Desa Bungaiya telah memanfaatkan karang gunung untuk komoditi yang dijual ke luar desa. Setiap harinya ada beberapa truk yang membawa karang gunung dibawa ke arah Benteng.

2.1.2. Alat Tangkap yang Merusak

Pendekatan yang digunakan COREMAP guna mencapai tujuan melestarikan terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan adalah dengan melibatkan (partisipasi) masyarakat secara aktif (pengelolaan yang berbasis masyarakat). Masyarakat bersedia berpartisipasi aktif manakala masing-

masing individu mengetahui tentang manfaat pengelolaan sumber daya laut. Pengetahuan dan partisipasi tentang pengelolaan sumber daya laut meliputi :

- Bahan dan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang
- Pengambilan karang
- Penggunaan bom
- Penggunaan sianida/racun/potasium
- Penggunaan pukot harimau/rawl

Bahan dan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang

Penelitian ini juga ingin mengetahui tentang penggunaan baik bahan dan alat tangkap apakah dapat merusak terumbu karang. Pertanyaan dalam kuesioner survei ingin melihat kecenderungan mengingat bahwa penggunaan bahan dan alat tangkap sifatnya adalah kondisional. Dikatakan kondisional artinya tidak semata-mata hanya karena menggunakan teknologi alat tangkap tetapi juga tergantung bagaimana cara dan tempat nelayan menggunakannya. Sebagai contoh, penggunaan pukot harimau bila dilakukan di tengah laut jauh dari pantai tentunya tidak akan merusak terumbu karang karena lokasi terumbu karang biasanya tidak terlalu jauh dari pantai. Penggunaan tombak juga tidak akan merusak terumbu karang kalau pada saat menombak ikan tidak mengenai terumbu karang.

Tabel 2.1.2
Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis Alat Tangkap yang Merusak
Terumbu Karang di Kawasan P. Besar, Selayar

Jenis alat tangkap	Kawasan Buki		Kawasan Bungaiya	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bom	100,0	0,0	98,4	1,6
Bagan Tancap	1,7	98,3	31,3	68,8
Bagan Apung	0,0	100,0	1,6	98,4
Sianida	100,0	0,0	78,1	21,9
Bubu	82,8	17,2	6,3	93,8
Pukat Harimau	96,6	3,4	65,6	34,4
Jaring Apung	1,7	98,3	3,1	96,9
Pancing	0,0	100,0	4,7	95,3
Tombak	77,2	22,8	3,1	96,9

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Berdasarkan jawaban yang diberikan nampak jelas bahwa bahwa menggunakan bom dan sianida serta pukat harimau dapat merusak terumbu karang. Pengetahuan nelayan di Desa Buki ternyata lebih baik daripada pengetahuan nelayan di Desa Bungaiya. Nelayan di Desa Buki menjawab bahwa penggunaan bom, sianida dan pukat harimau dapat merusak terumbu karang masing-masing 100, 100 dan 96,6 persen. Pertanyaan yang sama untuk di Desa Bungaiya jawabannya masing-masing 98,4 , 78,1 dan 65,6 persen. Nelayan di Desa Buki menjawab bahwa penggunaan bubu dapat merusak terumbu karang (82,8 persen) sedangkan jawaban nelayan di Desa Bungaiya hanya 6,3 persen. Besar kemungkinan nelayan di Desa Buki punya pengalaman bahwa menggunakan bubu sebagai alat tangkap telah dilakukan di lokasi terumbu karang dan menggunakan batu karang sebagai pemberat bubu. Di Desa Bungaiya nelayan jarang menggunakan bubu sebagai alat tangkap sehingga alat tersebut dianggap tidak merusak terumbu karang (93,8 persen).

Selain itu masyarakat di Desa Buki dan di Desa Bungaiya pada umumnya mengetahui bahwa penggunaan alat tangkap ikan berupa bagan tancap, bagan apung, jaring apung dan pancing tidak merusak terumbu karang.

Pengambilan Karang

Kegiatan pengambilan karang hidup dan karang mati di laut adalah merusak ekosistem terumbu karang mengingat banyak kegunaan terumbu karang. Terumbu karang adalah "rumah ikan", sumber bahan obat, dapat mencegah abrasi pantai, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan pengambilan terumbu karang. Kebijakan tersebut dimuat dalam Surat Edaran Menteri PPLH No.408/MNPPLH/4/1989 tentang Larangan Pengambilan Batu Karang yang Dapat Merusak Lingkungan Ekosistem Laut, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia (<http://firmansyah.11.wordpress.com/009/05/15/terumbu-karang-indonesia>).

Tabel 2.1.3
Pendapat Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya tentang Pengambilan Karang

Kategori	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Karang Hidup		
Setuju	3,4	9,4
Tidak setuju	93,2	84,4
Tidak berpendapat	3,4	6,2
Jumlah	100 (58)	100 (64)
Karang Mati		
Setuju	5,2	10,9
Tidak setuju	87,9	78,2
Tidak berpendapat	6,9	10,9
Jumlah	100 (58)	100 (64)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Sejalan dengan kebijakan tersebut jawaban atas survei ini sangat menggembirakan, bahwa masyarakat baik di Desa Buki dan di Desa Bungaiya tidak menyetujui tentang pengambilan karang baik yang telah mati apalagi yang masih hidup. Jawaban responden di ke dua desa tersebut cukup menyakinkan yaitu masing-masing 93,2 persen dan 84,4 persen untuk Desa Buki dan Desa Bungaiya yang tidak setuju pengambilan karang hidup. Sedangkan yang tidak setuju pengambilan karang mati masing-masing 87,9 persen dan 78,2 persen Hal ini berarti bahwa sosialisasi tentang larangan pengambilan terumbu karang di daerah tersebut telah berhasil baik. Meskipun demikian masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih menyetujui pengambilan karang baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Masyarakat di Desa Buki dan Bungaiya telah mengetahui kebijakan pelarangan pengambilan batu karang, ada 79,3 persen dan 78,1 persen (lihat Tabel 2.1.4). Selain itu pengetahuan mereka tentang persetujuan tentang kebijakan tersebut sangat mayakinkan yaitu 97,8 persen dan 86 persen.

Tabel 2.1.4
Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya tentang Kebijakan dan sanksi Pengambilan Karang di Laut

Kategori variabel	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pengetahuan kebijakan		
Mengetahui	79,3	78,1
Tidak mengetahui	20,7	21,9
Jumlah	100 (58)	100 (64)
Pendapat kebijakan		
Setuju	97,8	86,0
Tidak setuju	2,2	14,0
Jumlah	100 (46)	100 (50)
Sanksi		
Mengetahui	82,6	94,0
Tidak mengetahui	17,4	2,0
Tidak menjawab	0,0	4,0
Jumlah	100 (46)	100 (50)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Selain itu masyarakat di Desa Buki dan Bungaiya umumnya juga telah mengetahui adanya sanksi pelanggaran kebijakan pengambilan karang di laut (Tabel 2.1.5). Kendati demikian masih ada yang tidak mengetahui adanya sanksi tersebut mengingat bahwa mereka umumnya tidak pernah mengambil karang di laut (Tabel 2.1.6).

Di Desa Buki dan di Desa Bungaiya masyarakat yang tidak pernah mengambil karang di laut sebelum ada COREMAP (tahun 2004) masing-masing 97,9 persen dan 95,3 persen. Hal yang menarik bahwa di Desa Bungaiya tidak ada masyarakat yang pernah mengambil karang hidup di laut, namun ada yang pernah mengambil karang mati (4,7 persen) sebelum tahun 2004. Adapun di Desa Buki sebelum ada COREMAP mengaku pernah mengambil karang baik yang masih hidup (6,9 persen) dan yang karang mati (5,2 persen).

Tabel 2.1.5
Pernah tidaknya Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya Mengambil Karang di Laut Sebelum Ada COREMAP

Kategori	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pernah (kr.hidup)	6,9	0,0
Pernah (kr. mati)	5,2	4,7
Tidak pernah	87,9	95,3
Jumlah	100 (58)	100 (64)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Mereka juga mengevaluasi bahwa pengambilan karang di laut ada kecenderungan menurun untuk Desa Bungaiya dan sama saja untuk Desa Buki. Jawaban atas hal ini untuk Desa Bungaiya yaitu 62,5 persen dan 82,8 persen (Tabel 2.8). Atas dasar jawaban survei tersebut nampak bahwa di Desa Bungaiya mereka yang mengambil karang laut cenderung menurun karena dalam kenyataan mereka tidak pernah mengambil karang hidup. Jawaban responden Desa Buki mengindikasikan bahwa sebagian kecil masyarakat masih ada yang mengambil karang di laut. Dalam setahun terakhir 5,2 persen pernah

mengambil karang di laut dan umumnya menjawab kegiatan pengambilan karang adalah sama saja (82,8 persen).

Tabel 2.1.6
Pernah tidaknya Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya Mengambil Karang Setahun Terakhir dan Kecenderungan Pengambilan

Kategori variabel	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Karang Hidup		
Pernah	5,2	0,0
Tidak pernah	94,8	100,0
Karang Mati		
Pernah	1,7	1,6
Tidak pernah	98,3	98,4
Kecenderungan kegiatan pengambilan karang		
Menurun	17,2	62,5
Sama saja	82,8	34,4
Meningkat	0,0	3,1
Jumlah	100 (58)	100 (64)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar. 2009

Penggunaan Bom

Sebelum tahun 2000 di Indonesia telah terjadi penggunaan bom untuk menangkap ikan di banyak provinsi di Indonesia sejalan dengan peningkatan kebutuhan ikan sebagai komoditi ekspor. Penggunaan bom untuk menangkap ikan ternyata telah menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan dampaknya telah terjadi penurunan stok ikan. Bersamaan dengan itu telah terjadi perubahan paradigma yang menuju pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sejalan dengan keadaan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan yang merusak antara lain bom.

Proses sosialisasi kebijakan tentang pelarangan penggunaan bom dengan sanksi yang dikenakan telah membuahkan hasil yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat. Hasil survei social-ekonomi COREMAP di Desa Buki dan Desa Bungaiya menunjukkan masing-masing 96,6 persen dan 95,3 persen masyarakat telah mengetahui tentang larangan penggunaan bom (Tabel 2.1.7). Selain itu umumnya mereka menyetujui pelarangan tersebut, meskipun di Desa Bungaiya masih ada 14,8 persen yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju tersebut besar kemungkinan mengartikan pengambilan karang yang ada di daratan, mengingat di daerah tersebut sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari bisnis karang gunung.

Tabel 2.1.7
Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat di Kawasan Buki dan Bungaiya
tentang Larangan Penggunaan Bom

Kategori variabel	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pengetahuan		
Mengetahui	96,6	95,3
Tidak mengetahui	3,4	4,7
Jumlah	100 (58)	100 (64)
Pendapat		
Setuju	98,2	83,6
Tidak setuju	0,0	14,8
Tidak berpendapat	1,8	1,6
Jumlah	100 (58)	100 (61)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar. 2009

Masyarakat di daerah tersebut umumnya juga mengetahui tentang adanya sanksi pelanggaran kebijakan penggunaan bom untuk penangkapan ikan. Di Desa Buki dan Bungaiya yang mengetahui sanksi tersebut masing-masing 83,9 persen dan 86,9 persen. Dengan kata lain hanya sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahuinya.

Tabel 2.1.8
Pengetahuan Masyarakat tentang Adanya Sanksi Pelanggaran Kebijakan
Penggunaan Bom untuk Penangkapan Ikan

Kategori	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Mengetahui	83,9	86,9
Tidak mengetahui	14,3	6,6
Tidak menjawab	1,8	6,6
Jumlah	100 (56)	100 (61)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar. 2009

Masyarakat di Desa Buki dan Bungaiya umumnya juga tidak mengetahui praktik penggunaan bom. Hasil wawancara mendalam dan hasil survei ini juga menunjukkan bahwa nelayan di daerah tersebut tidak pernah melakukan praktik mencari ikan dengan menggunakan bom. Menurut pengetahuan mereka nelayan yang pernah menggunakan bom bukan nelayan lokal tetapi nelayan yang datang dari luar desa dan terutama nelayan andon (Tabel 2.1.9). Meskipun demikian praktik pengeboman telah mengalami penurunan, terutama di Desa Bungaiya. Masyarakat di Desa Buki menjawab 63,8 persen cenderung sama saja dan 36,2 persen mengalami penurunan.

Tabel 2.1.9
Pengetahuan, Praktik Penggunaan Bom dan Kecenderungan
Penggunaannya di Kawasan Buki dan Bungaiya

Kategori	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pengetahuan		
Mengetahui	6,9	4,7
Tidak mengetahui	89,7	95,3
Tidak menjawab	3,4	0,0
Penggunaan bom sebelum COREMAP		
Pernah	0,0	0,0
Tidak pernah	100,0	100,0
Penggunaan bom setahun terakhir		
Menggunakan	0,0	0,0
Tidak menggunakan	100,0	100,0
Tidak menjawab	0,0	0,0
Kecenderungan kegiatan penggunaan bom		
Menurun	36,2	85,9
Sama saja	63,8	14,1
Meningkat	0,0	0,0
Jumlah	100 (58)	100 (64)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Penggunaan Sianida/Potas

Hasil survei social-ekonomi COREMAP di Desa Buki dan Desa Bungaiya menunjukkan masing-masing 94,8 persen dan 68,8 persen masyarakat telah mengetahui tentang larangan penggunaan sianida/potas untuk menangkap ikan di laut (Tabel 2.1.10). Selain itu umumnya masyarakat Desa Buki dan Bungaiya mengetahui adanya sanksi penggunaan sianida. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa nelayan yang menggunakan sianida berasal dari luar desa guna menangkap udang lobster. Menurut pengamatan mereka akibat penggunaan sianida, karang yang terkena sianida akan mati dan dicirikan dengan perubahan warna menjadi keputihan.

Tabel 2.1.10
Pengetahuan, Praktik Penggunaan Sianida/Potas dan Kecenderungan
Pengambilan di Kawasan Buki dan Bungaiya

Kategori	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pengetahuan larangan*		
Mengetahui	94,8	68,8
Tidak mengetahui	5,2	31,3
Pengetahuan sanksi		
Mengetahui	78,2	90,9
Tidak mengetahui	21,8	6,8
Tidak menjawab	0,0	2,3
Jumlah	100 (55)	100 (44)
Pengetahuan tentang orang lain *		
Menggunakan	24,1	0,0
Tidak menggunakan	74,1	98,4
Tidak menjawab	1,8	1,6
Penggunaan sianida sebelum COREMAP*		
Menggunakan	1,7	1,6
Tidak menggunakan	98,3	98,4
Tidak menjawab	0,0	0,0
Penggunaan setahun terakhir*		
Menggunakan	0,0	3,1
Tidak menggunakan	98,3	96,9
Tidak menjawab	1,7	0,0
Kecenderungan kegiatan penggunaan Sianida*		
Menurun	32,8	21,9
Sama saja	10,3	4,7
Meningkat	0,0	0,0
Tidak ada	37,9	50,0
Tidak tahu	19,0	23,4
Jumlah	100 (58)	100 (64)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Keterangan : N = 58 untuk buki dan 64 untuk bungaiya

Sebagian masyarakat Buki mengetahui bahwa yang menggunakan potassium adalah berasal dari luar desa termasuk nelayan andon atau dari luar kabupaten. Meskipun demikian mereka mengetahui pula bahwa di desanya sebelum ada COREMAP masih ada beberapa nelayan yang telah menggunakan racun sianida/potassium dan mereka yang menggunakan racun sianida tersebut cenderung menurun. Dalam setahun terakhir menurut pengetahuan mereka tidak ada lagi yang menggunakan potasium baik di Desa Buki (98,3 persen) dan 96,9 persen di Desa Bungaiya (96,9 persen). Lihat Tabel 2.1.11.

Penggunaan Pukat Harimau

Tabel 2.1.11 menunjukkan tentang pengetahuan responden tentang penggunaan pukat harimau (*trawl*) untuk menangkap biota laut terutama ikan dan udang. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Buki sebagian besar (82,8 persen) mengetahui adanya pelarangan oleh pemerintah tentang penggunaan alat pukat harimau. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.11 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.39 tahun 1980 dinyatakan bahwa Presiden RI menginstruksikan terhitung 1 Januari 1983 di seluruh perairan Indonesia tidak ada lagi kapal perikanan yang menggunakan *trawl*. Alasan pelarangan jaring *trawl* bukan semata-mata atas dasar pertimbangan aspek teknis dan ekologis, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mengatasi terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan pemilik *trawl*. Tujuan pelarangan tersebut adalah : (1) Untuk mencapai status pengelolaan sumber daya ikan yang lebih baik; (2) mencegah terjadinya konflik dan munculnya tindak kekerasan diantara nelayan dan (3) mendorong perkembangan perikanan skala kecil (Dwiponggo,1992: 35).

Pengetahuan masyarakat di Desa Bungaiya tentang larangan tersebut ternyata lebih rendah daripada di Desa Buki (46,9 persen). Di Desa Bungaiya masyarakat tidak banyak mengetahui penggunaan pukat harimau kemungkinan alat tersebut tidak digunakan untuk menangkap ikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa di Desa Bungaiya masyarakat

cenderung menggunakan pancing atau alat sero guna menangkap ikan, mengingat nelayan banyak yang miskin sehingga tidak mampu menggunakan pukot harimau yang harganya relatif mahal. Mereka umumnya juga mengetahui adanya sanksi terhadap orang lain yang menggunakan pukot harimau. Di Desa Buki dan di Desa Bungaiya pengetahuan tersebut masing-masing 79,2 persen dan 86,7 persen.

Tabel 2.1.11
Pengetahuan, Praktik Penggunaan Pukot Harimau dan Kecenderungan
Penggunaannya di Kawasan Buki dan Bungaiya

Kategori variabel	Kawasan	
	Buki	Bungaiya
Pengetahuan larangan penggunaan pukot harimau*		
Mengetahui	82,8	46,9
Tidak mengetahui	17,2	53,1
Setuju tidaknya sanksi Penggunaan pukot harimau .		
Setuju	95,8	70,0
Tidak setuju	4,2	30,0
Tidak menjawab	0,0	0,0
Jumlah	100 (48)	100 (30)
Pengetahuan tentang sanksi menggunakan pukot harimau		
Mengetahui	79,2	86,7
Tidak mengetahui	20,8	6,7
Tidak menjawab	0,0	6,6
Jumlah	100 (48)	100 (30)
Pengetahuan penggunaan pukot harimau oleh orang lain setahun terakhir*		
Mengetahui	5,2	3,1
Tidak mengetahui	93,1	95,3
Tidak menjawab	1,7	1,6
Penggunaan pukot harimau sebelum COREMAP*		
Menggunakan	0,0	0,0
Tidak menggunakan	98,3	100
Tidak menjawab	1,7	0,0
Penggunaan pukot harimau setahun terakhir*		
Menggunakan	0,0	7,8
Tidak menggunakan	98,3	92,2

Tidak menjawab	1,7	0,0
Kecenderungan kegiatan penggunaan pukat harimau*		
Menurun	12,1	7,8
Sama saja	43,1	4,7
Meningkat	0,0	1,6
Tidak ada	43,1	85,9
Tidak tahu	1,7	0,0
Melakukan pengawasan*		
Melakukan	50,0	53,1
Tidak melakukan	50,0	46,9
Jumlah	100 (58)	100 (64)

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Keterangan : N = 58 untuk buki dan 64 untuk bungaiya

Dalam survei juga ditanyakan tentang tahu-tidaknya orang lain yang menggunakan pukat harimau setahun terakhir. Pada umumnya mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut yang tercermin dari jawaban di Desa Buki (93.1 persen) dan di Desa Bungaiya (95,3 persen). Sejalan dengan pertanyaan tersebut mereka umumnya juga tidak mengetahui bahwa sebelum COREMAP ada penggunaan alat tangkap pukat harimau. Di Desa Buki masyarakat yang tidak mengetahui sebesar 98.3 persen dan di Desa Bungaiya sebesar 100 persen. Karena itu pada waktu ditanyakan apakah ada menggunakan pukat harimau setahun terakhir masyarakat juga menyatakan tidak menggunakan, di Buki (98,3 persen) dan di Bungaiya (92,2 persen).

Penggunaan alat tangkap ikan dengan pukat harimau di daerah Buki dan Bungaiya menunjukkan kecenderungan sama saja dan bahkan tidak ada. Oleh karena itu mereka juga ragu-ragu menjawab apakah masyarakat melakukan pengawasan atau tidak melakukan pengawasan. Hasil jawaban tentang hal ini di Desa Buki yang mengetahui adanya pengawasan 50 persen dan yang tidak melakukan pengawasan juga 50 persen. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan yang sama untuk Desa Bungaiya bahwa mereka melakukan pengawasan 53,1 persen dan yang tidak melakukan pengawasan 46,9 persen.

2.2. LOKASI DI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

2.2.1. Terumbu karang

Masyarakat di Pasimasunggu Timur menyebut terumbu karang dengan istilah "karang". Walaupun mereka merupakan masyarakat pesisir, namun ternyata tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan memadai bahwa terumbu karang itu sebagai makhluk hidup. Dari 129 responden, hanya 66,7 % yang mengetahui bahwa terumbu karang itu merupakan makhluk hidup, sementara sebanyak 17,1 % tidak mengetahuinya. Masih banyaknya orang yang tidak mengetahui bahwa terumbu karang itu merupakan makhluk hidup, disebabkan sosialisasi tentang terumbu karang yang dilakukan oleh Coremap masih belum maksimal, sehingga sebagian masyarakat belum banyak memiliki pengetahuan tentang terumbu karang. Sosialisasi tidak dilakukan secara terencana, dan hanya dilakukan secara berkala dan jika ada orang yang bertanya.

Bagi responden yang mengetahui bahwa terumbu karang itu sebagai makhluk hidup (86 orang), hanya 12,8 % yang berpendapat bahwa terumbu karang itu merupakan jenis hewan. Sebagian besar (32,6 %) menyatakan tidak mengetahui terumbu karang jenis makhluk hidup hewan atau tumbuh-tumbuhan. Hal itu menunjukkan kedangkalan pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang yang berada di sekitar mereka. Ketidaktahuan masyarakat itu semakin menunjukkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Coremap tentang terumbu karang.

Pada saat ini sebagian masyarakat (31 %) berpendapat bahwa terumbu karang yang ada di sekitar mereka dalam keadaan rusak, dan hanya 22,5 % yang berpendapat bahwa kondisinya kurang baik. Adapun yang berpendapat bahwa keadaan terumbu karang di sekitar desa mereka dalam keadaan baik sebanyak 24,8 %. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagian besar responden (85,3 %) juga berpendapat bahwa terumbu karang yang ada di sekitar desa mereka perlu dilestarikan. Mereka yang berpendapat tidak perlu sangat sedikit, yaitu

hanya 2,3 %. Mereka yang berpendapat tidak perlu dilestarikan itu, bukan karena mereka menganggap bahwa terumbu karang tidak penting, tetapi karena upaya pelestarian akan sia-sia karena orang tetap saja dapat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius secara sembunyi-sembunyi yang akibatnya dapat merusak terumbu karang.

Tabel 2.2.1.
Pengetahuan Masyarakat tentang Terumbu Karang dan Kondisinya

Pengetahuan	Persentase
Pengetahuan sebagai makhluk hidup*	
Mengetahui	66,7
Tidak mengetahui	17,1
Tidak tahu	16,3
Pengetahuan jenis makhluk hidup	
Hewan	12,8
Tumbuhan	25,6
Hewan dan tumbuhan	29,1
Tidak tahu	32,6
Jumlah (N=86)	100,0
Pengetahuan kondisi terumbu karang*	
Baik	24,8
Kurang baik	22,5
Rusak	31,0
Sangat rusak	0,8
Tidak tahu	20,9
Pengetahuan perlunya Dilestarikan*	
Perlu	85,3
Tidak perlu	2,3
Tidak tahu	12,4
Jumlah (N= 129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Keterangan : N = 129

Walaupun sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa terumbu karang itu merupakan makhluk hidup yang termasuk dalam kategori hewan, namun sebagian besar masyarakat memahami kegunaan terumbu karang. Dalam kaitannya dengan fungsi terumbu karang sebagai tempat ikan hidup, 97,7 % responden mengetahuinya. Dalam kaitannya dengan perlindungan keragaman biota laut, sebanyak 95,3 % juga mengetahuinya. Begitu pula dengan fungsi terumbu karang sebagai pelindung pantai, sebanyak 96,1% mengetahuinya. Satu hal yang masyarakat banyak tidak tahu adalah berkaitan dengan fungsi terumbu karang sebagai sumber bahan baku. Hal itu bisa dipahami karena mereka belum, pernah mendapatkan informasi tentang itu, dan sosialisasi tentang manfaat terumbu karang selama ini lebih banyak difokuskan pada manfaat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pantai dan nelayan.

Tabel 2.2.2.
Pengetahuan Masyarakat tentang Manfaat Terumbu Karang

Pengetahuan tentang kegunaan terumbu karang	Mengetahui (%)	Tidak (%)	Total (%) N= 129
Tempat ikan hidup	97,7	2,3	100,0
Melindungi keragaman biota laut	95,3	4,7	100,0
Melindungi pantai	96,1	3,9	100,0
Sumber bahan baku	45,0	55,0	100,0
Sumber pendapatan	72,9	27,1	100,0
Tempat wisata	74,4	25,6	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar. 2009

2.2.2. Alat Tangkap yang Merusak

Beberapa alat tangkap dapat dikategorikan merusak terumbu karang, seperti pukut harimau, bom dan potassium sianida. Meskipun demikian masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan peralatan tangkap yang merusak. Bom, walaupun sebagian besar

responden berpendapat merusak terumbu karang, namun masih ada beberapa responden (1,6 %) yang berpendapat tidak merusak. Mereka yang berpendapat tidak merusak itu karena orientasi kegiatan mereka tidak di laut, sehingga mereka belum mengetahui secara persis dampak kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan bom terhadap sumber daya laut.

Potasium Sianida dan pukat harimau juga demikian dapat merusak terumbu karang dan sumber daya laut. Walaupun sebagian besar responden berpendapat bahwa alat tangkap tersebut merusak terumbu karang, namun masih ada beberapa yang berpendapat tidak merusak. Mereka yang berpendapat demikian itu karena mereka belum pernah melihat pukat harimau, sehingga tidak tahu apakah alat itu memang merusak. Begitu pula potasium sianida, walaupun sebelumnya banyak digunakan di daerah ini, namun karena orientasi kegiatan mereka tidak di laut, maka mereka juga tidak mengetahui dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan potasium sianida terhadap sumber daya laut.

Adapun alat tangkap yang lain, seperti bagan apung, jaring apung, pancing dan tombak, walaupun sebagian besar responden berpendapat bahwa tidak merusak terumbu karang, namun masih ada beberapa yang berpendapat bahwa alat tangkap tersebut merusak terumbu karang. Hal itu karena cara pandang mereka terhadap pengoperasian alat tangkap itu. Bubu misalnya, dianggap bisa merusak, karena pemasangannya ditindih dengan batu. Begitu pula tombak, dianggap merusak jika penembakan dilakukan di lokasi terumbu karang.

Tabel 2.2.3
Pengetahuan Masyarakat tentang Alat Tangkap yang Merusak
Terumbu Karang

Jenis alat tangkap	Merusak (%)	Tidak Merusak (%)	Jumlah (%)
Bom	98,4	1,6	100,0
Bagan Tancap	8,5	91,5	100,0
Bagan Apung	3,1	96,9	100,0
Potassium Sianida	98,4	1,6	100,0
Bubu	40,3	59,7	100,0
Pukat Harimau	91,5	8,5	100,0
Jaring Apung	3,9	96,1	100,0
Pancing	3,1	96,9	100,0
Tombak	4,7	95,3	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

2.2.3. Pengambilan Karang

Sebagian besar masyarakat tidak setuju terhadap pengambilan karang hidup, hal itu karena dianggap dapat merusak terumbu karang. Meskipun demikian jika karang yang diambil itu karang mati, maka sebagian besar responden menyetujuinya. Pengambilan karang yang sudah mati itu terutama digunakan untuk pembuatan fondasi bangunan rumah.

Tabel 2.2.4
Pendapat Masyarakat tentang Pengambilan Karang

Karang Hidup	Persentase
Setuju	5,4
Tidak setuju	82,9
Tidak berpendapat	11,6
Karang Mati	
Setuju	17,1
Tidak setuju	62,0
Tidak berpendapat	20,9
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar Indonesia, 2009

Pada saat ini telah diterbitkan peraturan pemerintah baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah (Perda) yang berisi larangan merusak terumbu karang. Berkaitan dengan hal itu sebagian besar responden mengetahui bahwa perusakan terumbu karang itu dilarang. Meskipun demikian, masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan perundangan yang mengatur larangan perusakan terumbu karang. Adapun berkaitan dengan pengambilan terumbu karang, masyarakat umumnya setuju jika pengambilan terumbu karang itu dilarang, terutama untuk terumbu karang yang masih hidup. Hal itu karena menurut mereka pengambilan karang hidup itu sama saja artinya dengan melakukan perusakan terumbu karang.

Tabel 2.2.5
Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat tentang Peraturan
Pemerintah/Larangan Pengambilan/Perusakan Karang

Kategori	Persentase
Pengetahuan	
Mengetahui	81,4
Tidak mengetahui	18,6
Jumlah (N=129)	100,0
Pendapat	
Setuju	96,2
Tidak setuju	2,9
Tidak berpendapat	1,0
Jumlah (N=105)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang larangan perusakan terumbu karang tersebut, pemerintah juga memberi ancaman sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Berkaitan dengan sanksi, sebagian besar responden mengetahui adanya sanksi tersebut. Meskipun demikian, mereka kurang tahu persis jenis sanksi yang diberikan kepada orang yang merusak terumbu karang; yang mereka ketahui hanya jika ada yang ketahuan merusak terumbu karang maka orang itu akan dihukum, berapa lama ancaman hukumannya, pada umum mereka tidak mengetahui.

Tabel 2.2.6
Pengetahuan Masyarakat Adanya Sanksi Pelanggaran Kebijakan
Pengambilan Karang di Laut

Kategori	Persentase
Mengetahui	94,3
Tidak mengetahui	4,8
Tidak menjawab	1,0
Jumlah (N=105)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Berkaitan dengan kegiatan pengambilan terumbu karang di laut, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengambil terumbu karang. Namun demikian, apabila melihat pada realitas di lapangan, banyak masyarakat yang mengambil terumbu karang, terutama karang yang sudah mati. Bahkan karang mati yang banyak diambil oleh masyarakat adalah karang yang ada di darat. Pengambilan terumbu karang yang masih hidup memang jarang dilakukan oleh masyarakat di daerah ini, karena mereka mengetahui pentingnya melestarikan karang untuk tempat pemijahan ikan dan sumber daya laut lainnya.

Tabel 2.2.7
Pernah tidaknya Masyarakat Mengambil Karang di Laut Sebelum Ada COREMAP

Kategori	Persentase
Pernah (kr.hidup)	1,6
Pernah (kr. mati)	6,2
Tidak pernah	92,2
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Dalam satu tahun terakhir, sebagian besar responden mengaku tidak pernah mengambil karang hidup. Begitu pula dengan karang mati, hampir semua responden juga menyatakan tidak pernah mengambilnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama satu tahun terakhir kecenderungan kegiatan pengambilan karang cenderung menurun. Penurunan itu tentunya ada pengaruh sosialisasi penyadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang yang dilakukan oleh Coremap.

Tabel 2.2.8
Pernah tidaknya Masyarakat Mengambil Karang Setahun Terakhir dan
Kecenderungan Pengambilan

Kategori	Persentase
Karang Hidup	
Pernah	1,6
Tidak pernah	98,4
Karang Mati	
Pernah	-
Tidak pernah	100,0
Kecenderungan kegiatan pengambilan karang	
Menurun	88,4
Sama saja	10,1
Meningkat	1,6
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Penggunaan Bom

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa penggunaan bom untuk menangkap ikan itu dilarang oleh pemerintah. Mereka juga setuju jika penggunaan bom itu dilarang, karena menurut mereka penggunaan bom sangat merusak, bukan hanya terumbu karang, melainkan juga seluruh ekosistem laut yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian masih ada yang tidak setuju terhadap larangan tersebut. Menurut masyarakat yang tidak setuju, yang penting bukan larangan, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan. Selain itu, apabila hanya melarang tanpa ada solusi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka larangan itu juga tidak ada gunanya.

Tabel 2.2.9
Pengetahuan dan Pendapat Masyarakat tentang Larangan Penggunaan Bom

Kategori	Persentase
Pengetahuan	
Mengetahui	97,7
Tidak mengetahui	2,3
Jumlah (N=129)	100,0
Pendapat	
Setuju	82,5
Tidak setuju	16,7
Tidak berpendapat	0,8
Jumlah (N=126)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Terkait dengan sanksi terhadap penggunaan bom untuk menangkap ikan, sebagian besar responden mengetahui adanya sanksi tersebut. Meskipun demikian, pengetahuan mereka tentang sanksi itu sangat terbatas; yang mereka ketahui hanyalah apabila tertangkap menggunakan bom untuk menangkap ikan akan dihukum. Namun jenis hukuman dan berapa lama ancaman hukumannya, pada umumnya mereka tidak mengetahui.

Tabel 2.2.10
Pengetahuan Masyarakat tentang Adanya Sanksi Pelanggaran Penggunaan Bom untuk Menangkap Ikan

Kategori	Persentase
Mengetahui	99,2
Tidak mengetahui	0,8
Tidak menjawab	2,3
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Dalam kaitan dengan praktik penggunaan bom untuk menangkap ikan, sebagian besar masyarakat menyatakan tidak mengetahui. Hal itu karena penggunaan bom pada umumnya dilakukan

secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka tidak mengetahui. Apabila ada masyarakat yang mengetahui praktek tersebut biasanya terjadi secara kebetulan. Semua responden menyatakan bahwa sebelum ada Coremap di kawasan ini (Pasimasunggu Timur) memang tidak pernah ada nelayan yang menggunakan bom. Begitu pula dalam setahun terakhir, sebagian besar mereka juga menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan bom. Hal itu dapat dipahami karena yang menggunakan bom untuk menangkap ikan umumnya adalah nelayan dari luar daerah. Menurut pengakuan masyarakat sejak dulu jumlah nelayan yang menggunakan bom sangat kecil. Kegiatan penggunaan bom di kawasan ini cenderung menurun. Penurunan itu terjadi salah satunya karena keberadaan dan hasil penyuluhan Coremap tentang larangan penggunaan bom untuk menangkap ikan, sehingga nelayan dari luar yang akan melakukan pengeboman untuk menangkap ikan cenderung lebih berhati-hati agar tidak ketahuan baik oleh masyarakat maupun penegak hukum (Polri dan TNI-AL).

Tabel 2. 2.11
Pengetahuan, Praktik Penggunaan Bom menurut Masyarakat dan
Kecenderungan Penggunaannya

Kategori	Persentase
Pengetahuan	
Mengetahui	25,6
Tidak mengetahui	71,3
Tidak menjawab	3,1
Penggunaan bom sebelum ada Coremap	
Pernah	-
Tidak pernah	100,0
Penggunaan bom setahun terakhir	
Menggunakan	6,2
Tidak menggunakan	93,8
Kecenderungan kegiatan penggunaan bom	
Menurun	92,2
Sama saja	3,1
Meningkat	4,7
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Penggunaan Potasium Sianida/Potas

Potasium sianida merupakan jenis alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang. Penggunaan potasium untuk menangkap ikan mengakibatkan terumbu karang yang terkena akan memutih yang selanjutnya mati. Selain itu, dengan menggunakan potasium maka ikan-ikan yang masih kecil juga akan ikut mati, sehingga kelestarian sumberdaya ikan akan terancam. Oleh karena itu penggunaan potasium untuk menangkap ikan dilarang oleh pemerintah.

Terkait dengan larangan tersebut, sebagian besar responden mengaku mengetahuinya. Namun demikian, mereka tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang larangan itu, termasuk jenis dan lama hukuman. Sementara mereka yang mengetahui, sebagian besar juga setuju dengan adanya larangan tersebut. Hal itu karena sebagian besar mereka, terutama yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, mengetahui secara persis dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan potasium untuk menangkap ikan. Sebagian besar responden juga mengetahui bahwa ada sanksi bagi mereka (nelayan) yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak mengetahui berapa lama ancaman sanksi terhadap pelanggarnya. Mereka mengetahui bahwa jika ada yang menggunakan potasium untuk menangkap ikan, apabila ketahuan akan ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Responden yang mengetahui bahwa terdapat orang (nelayan) yang menggunakan potasium untuk menangkap ikan jumlahnya tidak banyak, sekitar 30%. Hal itu karena penggunaan potasium pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para pengguna umumnya berlindung di balik penangkapan teripang dengan menyelam, sehingga sulit diketahui oleh masyarakat (nelayan) dan penegak hukum. Adapun daerah asal nelayan yang menggunakan potasium sianida menurut pengetahuan masyarakat umumnya nelayan dari luar desa, terutama dari kecamatan Kayuadi. Adapun dari dalam desa sendiri walaupun diakui bahwa ada nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut, tetapi jumlahnya tidak banyak.

Responden yang mengaku sebelum ada Coremap telah menggunakan sianida untuk menangkap ikan jumlahnya relatif sedikit hanya 1,6%. Begitu pula dalam setahun terakhir, mereka yang menggunakan sianida untuk menangkap ikan jumlahnya juga sangat kecil. Hal itu karena penggunaan sianida untuk menangkap ikan bukan kebiasaan masyarakat di dua desa tersebut. Menurut masyarakat, yang biasa menggunakan sianida untuk menangkap ikan adalah orang dari Kayuadi. Walaupun diakui saat ini masih ada nelayan yang menggunakan sianida untuk menangkap ikan, namun sebagian besar responden berpendapat cenderung semakin menurun. Hal itu disebabkan oleh keberadaan Coremap, sehingga mereka yang sebelumnya menggunakan sianida untuk menangkap ikan, menjadi takut untuk melakukannya.

Tabel 2.2.12
Pengetahuan, Praktik Penggunaan Sianida/Potas menurut Masyarakat dan Kecenderungan Pengambilan

Kategori	Persentase
Pengetahuan larangan*	
Mengetahui	84,5
Tidak mengetahui	15,5
Pendapat tentang larangan*	
Setuju	82,6
Tidak setuju	15,6
Tidak berpendapat	1,8
Pengetahuan sanksi*	
Mengetahui	82,2
Tidak mengetahui	2,3
Tidak menjawab	15,5
Pengetahuan tentang orang lain menggunakan sianida	
Menggunakan	30,2
Tidak menggunakan	63,5
Tidak menjawab	6,3
Jumlah (N=126)	100,0
Pengetahuan asal pengguna sianida	
Luar desa	42,1

Dalam dan luar desa	13,2
Tidak tahu	44,7
Jumlah (N=38)	100,0
Penggunaan sianida sebelum COREMAP*	
Menggunakan	1,6
Tidak menggunakan	97,7
Tidak menjawab	0,8
Penggunaan sianida setahun terakhir*	
Menggunakan	1,6
Tidak menggunakan	96,9
Tidak menjawab	1,6
Kecenderungan kegiatan penggunaan Sianida*	
Menurun	47,3
Meningkat	0,8
Tidak ada	25,6
Tidak tahu	26,4

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Keterangan : * = (N=129)

Penggunaan Pukat Harimau

Pukat harimau atau yang dikenal dengan nama lain *trawl* merupakan alat tangkap selain merusak terumbu karang, karena mata jaringnya yang berukuran kecil, dapat mengakibatkan ikan-ikan yang masih kecil ikut tertangkap jaring. Oleh karena itu jenis alat tangkap ini dilarang, karena dapat merusak pelestarian sumberdaya laut.

Terkait dengan adanya larangan terhadap penggunaan pukat harimau, sebagian besar responden mengaku tidak mengetahuinya; dan hanya 47% yang mengetahui. Hal itu karena sosialisasi tentang larangan penggunaan pukat harimau itu tidak pernah mereka dengar, dan masyarakat di daerah ini umumnya tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Meskipun demikian, bagi yang mengetahui larangan tersebut, sebagian besar cenderung setuju jika pukat harimau dilarang. Persetujuan itu disebabkan pukat harimau dianggap merusak terhadap lingkungan laut, sehingga merugikan nelayan. Masyarakat yang mengetahui adanya larangan penggunaan pukat harimau, umumnya

juga mengetahui adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Meskipun demikian mereka tidak tahu ancaman sanksinya, yang mereka tahu adalah jika ada nelayan yang menggunakan pukat harimau dan tertangkap, maka akan dikenakan sanksi hukum.

Tabel 2.2.13
Pengetahuan, Praktik Penggunaan Pukat Harimau menurut Masyarakat dan Kecenderungan Penggunaannya

Kategori	Persentase
Pengetahuan larangan*	
Mengetahui	47,3
Tidak mengetahui	52,7
Pendapat tentang larangan Pukat Harimau	
Setuju	85,2
Tidak setuju	14,8
Jumlah (N=61)	100,0
Pengetahuan sanksi	
Mengetahui	95,1
Tidak mengetahui	4,9
Jumlah (N=61)	100,0
Pengetahuan tentang orang lain menggunakan*	
Menggunakan	2,3
Tidak menggunakan	90,7
Tidak menjawab	7,0
Asal orang lain yang menggunakan	
Luar desa	66,7
Tidak tahu	33,3
Jumlah (N=3)	100,0
Penggunaan pukat harimau sebelum COREMAP*	
Menggunakan	1,6
Tidak menggunakan	98,4
Penggunaan setahun terakhir*	
Menggunakan	1,6
Tidak menggunakan	97,7
Tidak menjawab	0,8
Kecenderungan kegiatan penggunaan pukat harimau*	
Menurun	16,3
Tidak ada	83,7

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Keterangan : * (N=129)

Sebagian besar responden mengaku tidak mengetahui adanya nelayan lain yang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Hal itu karena di daerah ini memang tidak ada yang menggunakan alat tersebut. Masyarakat yang mengetahui bahwa ada nelayan lain yang menggunakan, penggunaan jenis alat tangkap itu bukan di daerah ini tetapi di daerah lain. Hal itu juga diperkuat adanya pengakuan mereka bahwa asal nelayan lain yang menggunakan pukat harimau itu adalah nelayan dari luar desa. Baik sebelum adanya Coremap maupun satu tahun terakhir dan beberapa tahun adanya Coremap di daerah ini, masyarakat cenderung tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Mereka yang mengaku menggunakan alat tersebut, meskipun jumlahnya kecil, ternyata yang digunakan bukan pukat harimau tetapi pukat biasa. Karena itu ketika ditanya tentang kecenderungan penggunaan pukat harimau pada saat ini, sebagian besar menyatakan tidak ada, dan sebagian kecil menyatakan penggunaan alat tangkap tersebut cenderung menurun.

Tabel 2.2.14.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap Kegiatan Perusakan Sumberdaya Laut

Melakukan pengawasan	Persentase
Melakukan	38,0
Tidak melakukan	62,0
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Kegiatan Coremap merupakan kegiatan yang berbasis masyarakat (*community base*), yang berarti bahwa kegiatan itu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan pengawasan terhadap perusakan terumbu karang dan sumber daya laut juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, responden yang mengaku ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merusak sumber daya laut itu persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 38%. Selebihnya, yaitu

62% justru mengaku tidak terlibat melakukan kegiatan pengawasan. Hal itu karena pelaksanaan pengawasan terhadap terumbu karang tidak melibatkan masyarakat luas, tetapi semata-mata menjadi tanggung jawab kelompok konservasi. Tentu saja dengan cara demikian maka pengawasan menjadi tidak optimal sebagaimana terlihat dalam table di atas.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI COREMAP

Program penyelamatan terumbu karang ditujukan untuk pelestarian terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, sehingga keterlibatan masyarakat setiap pelaksanaan program Coremap sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat di lokasi menjadi indikator yang menunjang keberhasilan program. Oleh sebab itu kegiatan pelestarian terumbu karang perlu dilakukan melalui aspek kelembagaan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Secara umum pelaksanaan Coremap di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tiga tahun terakhir dapat memberikan dampak positif maupun negatif terkait aspek kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pelestarian/konservasi ekosistem terumbu karang. Dampak Coremap bagi masyarakat yang diuraikan pada bagian ini meliputi pengetahuan dan partisipasi masyarakat, dampak sosial coremap dan dampak ekonomi coremap.

3.1. KAWASAN DESA BUKI DAN BUNGAIIYA

3.1.1. Pengetahuan dan Partisipasi

Pengelolaan dan pelaksanaan Coremap di tingkat desa secara umum dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). LPSTK kemudian mengkoordinir pembentukan lembaga-lembaga tingkat desa seperti pokmas dan LKM yang merupakan bagian dari LPSTK. Pokmas dapat dikembangkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan program di perdesaan

LPSTK difasilitasi oleh Seto yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan Fasilitator Desa yang membawahi satu atau dua desa.

Program penyelamatan terumbu karang secara ekonomi belum memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di pesisir. Dampak positif adanya program Coremap yang dapat dirasakan masyarakat di desa/lokasi kegiatan saat ini adalah adanya penurunan kegiatan kenelayanan/penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bom dan obat bius/potassium. Sebelum dilaksanakan program Coremap tahun 2004, pada umumnya nelayan untuk menangkap ikan karang hidup seperti ikan kerapu, sunu dan napoleon serta udang (*lobster*) masih menggunakan bom dan bius (potassium). Nelayan yang menangkap ikan hidup di Selayar adalah nelayan yang berasal dari luar kabupaten, antara lain Kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Makassar. Penangkapan ikan karang hidup banyak dilakukan nelayan, karena harga jual dan permintaannya tinggi, baik untuk memenuhi pasar domestik maupun internasional.

Meskipun belum memberikan dampak yang positif bagi sebagian besar masyarakat pesisir, tetapi sebagian besar masyarakat sudah mengetahui keberadaan dan kegiatan coremap di daerah mereka. Pengetahuan dan keterlibatan masyarakat di desa Buki dan Bungaiya dalam kegiatan kelembagaan Coremap dapat dilihat pada tabel 3.1. Secara umum pengetahuan masyarakat Buki terhadap kegiatan kelembagaan lebih tinggi dibandingkan dengan Bungaiya. Lebih dari 75 persen masyarakat buki mengaku bahwa mereka mengetahui kegiatan kelembagaan seperti peningkatan pengetahuan, kegiatan perlindungan terumbu karang, pembentukan LPSTK, DPL, Motivator Desa, dan Fasilitator Desa. Sementara itu kurang dari 50 persen masyarakat Bungaiya yang mengetahui adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan intensitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bentukan Coremap di tingkat desa. LPSTK di Desa Buki memang sempat terjadi kekosongan jabatan ketua karena mengundurkan diri, tetapi kegiatan sosialisasi di masyarakat tetapi berlangsung. Pengetahuan masyarakat di desa Buki yang rendah terdapat

pada kegiatan penyusunan RPTK dan pembentukan LKM. Hal ini dapat dimaklumi karena pembuatan RPTK banyak dilakukan oleh fasilitator desa, dengan dibantu oleh LPSTK dan motivator desa.

Tabel 3.1.1
Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam
Kegiatan Kelembagaan COREMAP

No	Kategori/ Variabel	Buki		Bungaiya	
		Tahu	Terlibat	Tahu	Terlibat
1	Peningkatan pengetahuan	79,3	32,6	48,4	16,1
2	Kegiatan perlindungan	79,3	19,6	48,4	29,0
3	Pembentukan Pokmas	67,2	23,1	36,5	47,8
4	Pembentukan LPSTK	79,3	4,3	35,8	17,4
5	Pembentukan LKM	55,2	15,6	31,3	20,0
6	Penyusunan RPTK	29,3	11,8	21,9	28,6
7	Kegiatan village grant	69,0	17,5	43,8	25,0
8	Kegiatan MD	75,9	29,5	42,2	25,9
9	Kegiatan CF	75,9	29,5	37,5	16,7
10	Kegiatan Pokmaswas	65,5	7,9	35,9	30,4
11	Pengembangan DPL	82,8	4,2	31,3	25,0
12	Kegiatan Pokmas Jender	70,7	22,0	29,7	21,1

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Masyarakat yang mengetahui kegiatan kelembagaan Coremap, ternyata memiliki tingkat keterlibatan yang rendah (< 30 persen) dalam kegiatan tersebut, kecuali pada kegiatan peningkatan pengetahuan di Buki dan pembentukan pokmas di Bungaiya. Hal ini berkaitan dengan sifat dari kegiatan kelembagaan yang sebagian tidak memerlukan partisipasi dari sebagian masyarakat, tetapi hanya wakil dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti village grant, pembentukan pokmas, dan pembentukan LPSTK merupakan kegiatan yang tidak memerlukan partisipasi masyarakat secara luas, tetapi hanya wakil dari masyarakat. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat

di Buki yang tidak terlibat dalam kegiatan Coremap tetapi mengetahui keberadaan kegiatan tersebut.

Tabel 3.1.2
Pengetahuan dan Keterlibatan/partisipasi Masyarakat dalam
Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif COREMAP

No	Kegiatan UEP	Buki		Bungaiya	
		Tahu	Terlibat	Tahu	Terlibat
1	Pengembangan Usaha	17,4	37,9	21,4	21,9
2	Kegiatan Pokmas	70,7	17,1	29,7	21,1
3	Pelatihan	34,5	15,0	26,6	35,3
4	Pendampingan	37,9	13,6	23,4	33,3
5	Monitoring	36,2	14,3	23,4	20,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pokmas usaha ekonomi produktif di kedua desa lebih kecil dari 40 persen, kecuali kegiatan pokmas UEP di desa Buki yang mencapai 70,7 persen. Kegiatan ini diketahui oleh sebagian besar masyarakat meskipun pada dasarnya tidak ada kelompok UEP yang berkembang. Terbentuknya UEP hanya terjadi pada awal program, selanjutnya masyarakat meminjam dana secara proorangan, tidak melalui kelompok lagi. Pengetahuan masyarakat terhadap pokmas UEP ini lebih disebabkan oleh motif ekonomi yaitu dana pinjaman dari LKM.

Kegiatan-kegiatan lain seperti pengembangan jenis UEP, pelatihan kegiatan, pendampingan dan Monitoring UEP tidak banyak diketahui oleh masyarakat Buki dan Bungaiya. Hal ini disebabkan minimnya kegiatan yang dilakukan di desa setempat. Kegiatan pelatihan pembuatan kue, maupun pembuatan ikan asin pernah dilakukan di Buki dan Bungaiya, tetapi pesertanya terbatas dan sampai saat ini usaha tersebut belum berkembang dengan baik.

Tabel 3.1.3
Persentase penduduk yang tahu dan terlibat
Kegiatan COREMAP, di Buki dan Bungaiya tahun 2009

No	Jenis kegiatan	Desa		Total
		Buki	Bungaiya	
1	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran	25,9	7,8	16,4
2	Perlindungan pesisir dan laut	25,9	7,8	16,4
3	Pembentukan LPSTK	15,5	14,1	14,8
4	Penyusunan RPTK	3,4	6,3	4,9
5	Pembangunan desa (melalui <i>village grant</i>)	12,1	10,9	11,5
6	Pengembangan DPL	3,4	7,8	5,7
7	Sosialisasi, pembimbingan, monitoring	13,8	7,8	10,7
8	LKM melalui UEP	8,6	6,3	7,4
9	Pembentukan pokmas	15,5	17,2	16,4
10	Kegiatan pokmaswas	5,2	10,9	8,2
11	Kegiatan Pokmas Jender	15,5	6,3	10,7
12	Kegiatan MD	22,4	10,9	16,4
13	kegiatan CF	22,4	6,3	13,9
	N	58	64	122

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Coremap dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu (1) mereka yang tidak tahu sama sekali kegiatan coremap. Ketidaktahuan ini juga berarti mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang dimaksud. (2) mereka yang tahu, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan Coremap. Pengetahuan tersebut dapat berasal dari orang lain, maupun melihat langsung kegiatan Coremap tetapi mereka tidak terlibat karena berbagai alasan. (3) mereka yang tahu sekaligus terlibat kegiatan coremap. Keterlibatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menjadi panitia pelaksana, menjadi peserta musyawarah/kegiatan, maupun menjadi

pekerja yang mengerjakan kegiatan Coremap. Tidak semua masyarakat dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Coremap, karena keterbatasan kapasitas dan cakupan kegiatan Coremap.

Tabel 3.1.3 menunjukkan hanya sebagian kecil masyarakat di Buki dan Bungaiya yang tahu sekaligus terlibat dalam kegiatan Coremap. Keterlibatan masyarakat yang terbesar terdapat pada kegiatan peningkatan pengetahuan dan perlindungan kawasan pesisir di Buki yang mencapai 25,9 persen. Hal ini berbeda dengan di Bungaiya dimana persentase masyarakat yang tahu sekaligus terlibat pada kedua kegiatan tersebut hanya mencapai 7,8 persen. Pengetahuan dan keterlibatan masyarakat di Bungaiya pada kegiatan kelembagaan Coremap tampak lebih rendah dibandingkan dengan Desa Buki. Hal ini berkaitan dengan posisi tempat tinggal penduduk terhadap kawasan pantai. Sebagian besar penduduk di Bungaiya tinggal di daratan yang agak jauh dengan pantai, sementara itu sebagian besar penduduk Buki tinggal berdekatan dengan kawasan pantai. Hal ini berdampak pada mudahnya penyampaian informasi kegiatan Coremap di Buki kepada masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan Coremap di Desa Buki juga mudah dilihat dan diketahui langsung oleh masyarakat karena letak desa yang sebagian berhadapan langsung dengan laut.

3.1.2. Manfaat sosial

Manfaat sosial coremap dalam tulisan ini difokuskan pada manfaat sosial kegiatan pembangunan prasarana desa melalui dana *village grant*. Desa Buki dan Bungaiya telah menerima dana *village grant* sebanyak dua kali sebesar 50 juta rupiah/ tahap/desa. Total dana *village grant* yang diterima oleh LPSTK di desa Bungaiya selama dua periode sebesar 100 juta yang digunakan untuk pembangunan 1 unit pagar pasar desa dan 5 unit WC umum, pembangunan pos pengawasan, joloro (kapal), dan bantuan untuk masjid. Pagar pasar desa dimaksudkan untuk melindungi pasar dari hewan ternak yang dilepas oleh masyarakat

setempat. WC umum juga menjadi usulan warga mengingat selama ini sebagian besar warga masih kesulitan membuang air besar. Akan tetapi pemanfaatan WC umum ternyata juga kurang karena tidak tersedia air yang cukup dan terletak di depan rumah salah satu warga. Pemanfaat WC biasanya hanya terbatas pada warga terdekat bahkan hanya pemilik kebun sendiri.

Desa Buki juga menerima village grant sebesar 100 juta yang digunakan untuk pembuatan 1 unit kapal/ joloro, rehap 4 unit masjid dan 20 unit WC keluarga, pembangunan bak penampung air, WC kantor desa, pelatihan berbasis masyarakat dan pembangunan DPL. Rumah tangga yang mendapat bantuan pembuatan WC sebanyak 40 KK, masing-masing 500 ribu rupiah yang diberikan dalam bentuk material (3 sak semen, 0,5 kubik pasir dan 100 batako). Saat ini semua penerima bantuan di Buki telah menyelesaikan pembuatan WC. Joloro dibuat sendiri oleh tukang di desa, sehingga kapal tersebut mempunyai kekuatan yang tidak diragukan lagi. Saat penelitian ini dilakukan joloro sudah dapat digunakan selama beberapa bulan, tetapi pemanfaatannya tidak optimal. Tidak ada dana operasional untuk joloro yang mencapai 150 ribu/hari/melaut. Hal ini berdampak pada tidak dimanfaatkan dan dipeliharanya joloro. Jika dibiarkan, dalam waktu yang tidak lama lagi joloro akan rusak dan tidak dapat difungsikan, sehingga berdampak pada kerugian cukup besar bagi Coremap.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan manfaat sosial prasarana yang dibangun dapat dilihat pada tabel 3.4. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan pondok informasi di kedua desa sebesar 23,8 persen. Persentase masyarakat di desa Bungaiya yang terlibat dalam pembangunan pondok informasi sekitar 32,8 persen; sementara itu partisipasi masyarakat di Buki sebesar 13,8 persen. Persentase masyarakat yang terlibat dalam pembangunan pondok informasi relatif sedikit karena hanya melibatkan beberapa pengurus LPSTK. Pembangunan pondok informasi telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat, terbukti terdapat 77,6 persen responden di Buki yang menyatakan bahwa prasarana tersebut

bermanfaat, sedangkan di bungaiya terdapat 70,3 persen yang menyatakan bahwa pondok informasi bermanfaat untuk penduduk. Tingginya responden yang menyatakan prasarana tersebut bermanfaat untuk masyarakat menunjukkan bahwa prasarana yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Tab 3.1.4
Persentase Penduduk Menurut Keterlibatan dan Kemanfaatan
Program Kegiatan Pembangunan Fisik Desa

No	Pembangunan fisik desa	Terlibat		Bermanfaat	
		Buki	Bungaiya	Buki	Bungaiya
1	Pondok informasi	13,8	23,8	77,6	70,3
2	Bangunan pagar pasar desa	-	32,8	-	67,2
3	MCK, bak penampungan air	22,4	25,0	58,6	54,7
4	Bantuan sarana ibadah (masjid)	27,6	-	96,6	-
	N	58	64	58	64

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Bangunan pagar pasar desa hanya dilakukan di Desa Bungaiya, dengan maksud untuk menjaga keamanan pasar dari gangguan ternak dan menjaga sanitasi pasar. Hal ini disebabkan sebagian besar peternak di desa setempat membiarkan ternak yang mereka pelihara berkeliaran secara bebas untuk mencari makan sendiri. Ternak tersebut biasa masuk ke fasilitas umum termasuk pasar desa yang selama ini belum mempunyai pagar yang permanen. Bangunan pasar desa di Bungaiya didirikan pada tahun 2007 dan menghabiskan dana sekitar 35 juta rupiah. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam pembangunan pagar pasar desa cukup tinggi yaitu 32,8 persen. Sementara itu responden yang menyatakan bahwa pagar pasar desa bermanfaat untuk masyarakat sebanyak 67,2 persen. Pasar merupakan sarana untuk bertemunya penjual dan pembeli di tingkat desa. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan pasar untuk menjual hasil pertanian,

perikanan maupun mencari barang-barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa sarana tersebut dibutuhkan oleh mereka.

Sarana air bersih dan sanitasi merupakan jenis prasarana yang dibangun di kedua desa lokasi Coremap. MCK yang dibangun di Buki merupakan milik individu/rumah tangga dan dibangun pada tahun 2007. MCK di Bungaiya merupakan milik umum, yang dibangun ditempat-tempat strategis sehingga masyarakat dengan mudah dapat menggunakannya. Meskipun demikian, MCK di Bungaiya saat ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, karena kekurangan sumber air dan terletak di depan rumah penduduk. Bak penampungan air dibangun di Buki dengan dana village grant pada tahun 2008 dan digunakan untuk menyediakan air bagi keperluan masyarakat desa. Pada saat ini air dari bak penampungan air dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dan kantor kecamatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan MCK dan bak penampungan air di Buki sebesar 22,4 persen, sedangkan di Bungaiya sebesar 25 persen. Masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan prasarana tersebut juga cukup tinggi yaitu 58,6 persen di Buki dan 54,7 persen di Bungaiya. Bantuan sarana ibadah atau pembangunan masjid, dilakukan di Desa Buki dan melibatkan partisipasi masyarakat sebesar 27,6 persen. Manfaat sosial dari pembangunan masjid ini sangat tinggi terbukti terdapat sekitar 56,6 persen masyarakat yang merasakan kemanfaatannya.

3.1.3. Manfaat Ekonomi COREMAP

Program penyelamatan terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perekonomian masyarakat. Pengaruh positif tersebut dapat terjadi melalui peningkatan jumlah ikan yang ditangkap sebagai dampak dari membaiknya terumbu karang. Pada waktu ditanyakan tentang kondisi pendapatan dari hasil tangkap dibandingkan dengan sebelum ada

Coremap sebagian besar responden (70,3 persen) menyatakan sama saja, sedangkan 20,3 persen mengalami peningkatan dan 9,4 persen mengalami penurunan. Penurunan pendapatan dapat terjadi karena penurunan kualitas sarana prasarana, maupun penurunan populasi ikan dilaut. Sebagian nelayan di Buki dan Bungaiya merupakan nelayan tradisional dengan alat tangkap berupa sero, pancing, jaring maupun bubu. Sebagian sero sudah tidak dipasang lagi karena hasil tangkapan semakin rendah. Meskipun demikian ada sebagian nelayan mengaku bahwa pendapatan dan jumlah hasil tangkap mereka mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah ikan dilaut.

Program penyelamatan terumbu karang berkaitan dengan daerah perlindungan laut yang dibuat di setiap desa yang dimaksudkan untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan. Zona inti pada DPL merupakan wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat, sedangkan zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan dengan persyaratan tertentu. DPL di kedua desa sebenarnya baru didirikan pada tahun 2009 dan sebagian pelampung sudah hilang baik secara alami maupun dirusak oleh nelayan luar. Oleh sebab itu, program penyelamatan terumbu karang di kedua desa secara langsung belum memberikan dampak bagi pendapatan dari kenelayan maupun hasil tangkap. Peningkatan pendapatan dan jumlah hasil tangkap lebih disebabkan oleh faktor di luar coremap.

Tabel 3.1.5.
Pendapatan dari kenelayan dan jumlah hasil tangkap
satu tahun terakhir di Buki dan Bungaiya, Tahun 2009

No	Kondisi	Pendapatan		Jumlah hasil tangkap	
		N	Persentase	N	Persentase
1	Naik	13	20.3	13	10,7
2	Sama saja	45	70.3	43	35,2
3	Menurun	6	9.4	8	6,6
	Jumlah	64	100,0	64	100,0

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Manfaat ekonomi coremap juga dapat dilihat dari manfaat dana bergulir bagi masyarakat yang dikelola oleh LKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berfungsi untuk menyalurkan dana simpan pinjam kepada masyarakat di lokasi coremap dengan tujuan utama untuk membuat usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi Coremap. Kegiatan ini sangat penting karena dapat menjadi faktor utama keberhasilan program Coremap. Jika masyarakat hanya dilarang untuk tidak menggunakan peralatan tangkap yang merusak, namun tanpa disertai dengan alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan, maka sulit untuk dapat menghentikan kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat.

LKM di Desa Buki dan Bungaiya telah terbentuk sejak tahun 2005, tetapi sampai tahun 2007, kelompok tersebut tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh belum turunnya dana simpan pinjam dari Coremap. Pada waktu dana seed fund turun, LKM yang telah terbentuk pada tahun 2005 kemudian berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat perihal dana usaha produktif tersebut. Masing-masing desa mendapatkan *seed fund* sebesar 25 juta rupiah dan pemanfaatannya diserahkan kepada pengurus LKM setempat. Pengurus LKM sendiri terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan kolektor. Meskipun demikian, pengurus yang aktif di kedua desa masih sebatas ketua LKM karena dana yang dikelola terlalu sedikit. Pada tahun 2009 LKM akan mendapat tambahan dana bergulir sebesar 25 juta rupiah. Tambahan dana ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan penerima dana pinjaman, sehingga fungsi Coremap semakin dirasakan oleh masyarakat desa.

Pada waktu ditanyakan apakah apakah rumah tangga responden memperoleh bantuan dana bergulir dari Coremap maka sebanyak 23,0 persen menjawab ya dan sisanya (77 persen) menjawab tidak. Dari 23 persen responden yang memperoleh dana bantuan tersebut sebagian besar (79,3 persen) merasa bahwa bantuan yang mereka terima dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, sedangkan sisanya menjawab tidak meningkatkan pendapatan maupaun tidak tahu. Alasan yang dikemukakan mengapa dana bantuan tersebut tidak meningkatkan

pendapatan adalah dana terlalu kecil maupun usaha belum menghasilkan.

Pendapatan Masyarakat dan Faktor yang berpengaruh

Pendapatan masyarakat di desa lokasi coremap yang disajikan dalam tulisan ini meliputi rata-rata pendapatan rumah tangga, pendapatan perkapita, rata-rata pendapatan dari kegiatan kenelayan menurut musim, dan pendapatan khusus anggota pokmas.

- **Pendapatan rumah tangga**

Rata-rata pendapatan rumah tangga di Buki dan Bungaiya pada tahun 2009 sebesar 774.396 rupiah. Pendapatan rumah tangga di Desa Buki (851.246) lebih tinggi daripada pendapatan rumah tangga di Desa Bungaiya (704.735). Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di Buki lebih baik dibandingkan dengan Bungaiya. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap tingginya pendapatan ini di Buki adalah letak geografis desa yang lebih dekat dengan kota kabupaten. Jarak Desa Bungaiya dengan kota kabupaten dua kali lebih jauh dibandingkan jarak antara Buki dengan kota kabupaten. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya mobilitas penduduk Desa Bungaiya ke kota kabupaten, yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat.

Perbedaan pendapatan rumah tangga yang terendah dengan terbesar di Desa Buki dan Bungaiya cukup tinggi yaitu Rp 30 ribu/ bulan dibanding dengan 4,1 juta/bulan (Tabel 3.6). Perbedaan pendapatan yang tinggi antara rumah tangga kaya dan miskin terjadi karena perbedaan jumlah dan jenis sumber pendapatan, jumlah ART yang bekerja, akses informasi dan teknologi dalam pengelolaan SDA. Penduduk di Desa Buki dan Bungaiya merupakan penduduk yang mayoritas bekerja di sektor perikanan, pertanian tanaman pangan, jasa dan perdagangan.

Hasil penelitian menunjukkan program pembangunan daerah perdesaan nelayan yang secara spesifik ditujukan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat pesisir seperti Coremap, PEMP, dan PNPM Mandiri belum dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini berhubungan langsung dengan aspek sosial, dan operasional program. Coremap misalnya selama beberapa tahun terakhir memiliki beberapa program ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana bergulir yang dikelola lembaga keuangan mikro di perdesaan. Sebagian besar masyarakat memang telah mengakui pentingnya dana pinjaman dari Coremap yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Tetapi jumlah dana yang sangat kecil membuat usaha yang dimiliki tidak dapat berkembang dengan baik.

Tabel 3.1.6.

Statistik Pendapatan penduduk di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009

No	Pendapatan	Desa		Buki dan bungaiya
		Buki	Bungaiya	
1	Per kapita	258.152	181.893	218.147
2	Rata-rata RT	851.264	704.735	774.396
3	Median	466.666	491.666	466.667
4	Minimum RT	30.000	100.000	30.000
5	Maksimum RT	4.000.000	4.166.666	4.166.667
	N	58	64	122

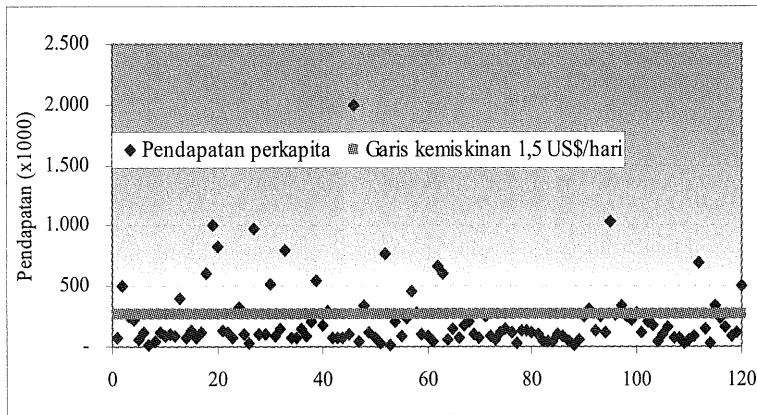
Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Hasil survei sosial ekonomi menunjukkan nilai median pendapatan rumah tangga sebesar 467 ribu rupiah, artinya 50 persen rumah tangga di kedua desa tersebut mempunyai pendapatan di bawah median dan sisanya (50 persen) mempunyai pendapatan di atas median. Nilai median di kedua desa relatif rendah, sehingga sebagian besar rumah tangga merupakan rumah tangga miskin. Median pendapatan rumah tangga di Bungaiya lebih tinggi dibandingkan dengan Buki, yang menunjukkan pemerataan pendapatan di Bungaiya lebih baik dibandingkan dengan desa Buki.

o Pendapatan per kapita

Pendapatan perkapita penduduk Buki dan Bungaiya pada tahun 2009 mencapai 218.147 rupiah. Pendapatan perkapita ini masih berada di bawah garis kemiskinan kabupaten, sehingga sebagian besar penduduk di Buki dan Bungaiya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan perkapita di Buki lebih besar dibandingkan dengan Bungaiya yang menunjukkan secara umum tingkat kesejahteraan penduduk di Buki lebih baik dibandingkan dengan Bungaiya. Akses nelayan terhadap laut di kedua daerah ini tidak ada perbedaan, sehingga perbedaan pendapatan lebih disebabkan oleh faktor di luar kegiatan kenelayanan. Dibandingkan dengan garis kemiskinan 1,5 US\$ per hari, sebagian besar penduduk Buki dan Bungaiya masih tergolong sebagai penduduk miskin.

Grafik 3.1.1.
Pendapatan perkapita dan garis kemiskinan 1,5 US\$/hari
di Desa Buki dan Bungaiya tahun 2009

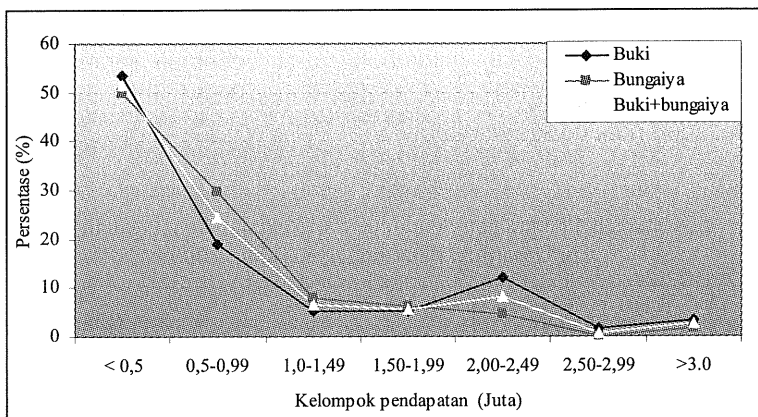


Sumber: Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Distribusi pendapatan penduduk menurut kelompok pendapatan menunjukkan ada variasi pendapatan rumah tangga yang terendah hingga pendapatan tertinggi. Sebagian besar rumah tangga

mempunyai pendapatan di bawah 1 juta rupiah (72,6 persen), sementara sebagian kecil mempunyai pendapatan di atas 1 juta rupiah. Kelompok penduduk yang mempunyai pendapatan menengah ke atas biasanya merupakan penduduk yang bekerja di luar sektor kenelayanan seperti jasa pemerintahan dan perdagangan. Penduduk yang termasuk dalam kelompok pendapatan terendah di Bungaiya (<0,5 juta) sekitar 50 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan di Desa Buki (53,4 persen). Tingginya persentase rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan terendah menunjukkan sebagian besar penduduk di kedua lokasi masih termasuk dalam kelompok yang miskin.

Grafik 3.1.2
Distribusi rumah tangga di Desa Buki dan Bungaiya
menurut kelompok pendapatan, Tahun 2009



Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009

Modus/frekuensi terbanyak dari pendapatan rumah tangga di Buki dan Bungaiya berada pada level di bawah 500 ribu rupiah (51,6 persen), sementara yang mempunyai pendapatan tinggi (>3,0 juta) sebanyak 2,5 persen. Penduduk dengan pendapatan yang tinggi umumnya merupakan rumah tangga yang mempunyai sumber

pendapatan dari pekerjaan sampingan. Sebanyak 55 persen rumah tangga mempunyai pekerjaan sampingan seperti perikanan laut, perikanan budidaya, perdagangan, jasa, dan peternakan.

Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan di kedua desa, bersifat tidak stabil karena dipengaruhi oleh kondisi musim (barat dan timur). Nelayan Desa Buki melaut dalam satu wilayah penangkapan yang berdekatan dengan permukiman penduduk, sehingga dalam satu tahun mereka hanya melaut pada waktu musim banyak ikan dan pancaroba. Kondisi berbeda terdapat di Bungaiya dimana pada waktu musim gelombang kuat sebagian dari mereka dapat berpindah di perairan laut bagian utara. Perubahan gelombang menyebabkan ada sebagian nelayan yang tidak mempunyai pendapatan dari melaut, karena mereka tidak melaut atau melaut tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Pada waktu gelombang kuat beberapa sarana tangkap seperti sero mengalami kerusakan dan harus diperbaiki lagi jika mau digunakan untuk musim berikutnya.

Tabel 3.1.7.
Statistik Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan
di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009

No	Pendapatan	Desa		Nilai (rupiah)
		Buki	Bungaiya	
1	Per kapita	71.536	81.455	77.426
2	Rata-rata RT	253.589	362.719	318.385
3	Median	208.333	300.000	283.333
4	Minimum RT	76.666	33.333	33.333
5	Maksimum RT	683.333	1.450.000	1.450.000
	N	26	38	64

Sumber: Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Rata-rata pendapatan dari kegiatan kenelayanan di Bungaiya lebih besar dibandingkan dengan Desa Buki yang disebabkan oleh jumlah hari melaut yang lebih besar. Peralatan tangkap yang digunakan

oleh nelayan dikedua desa hampir sama, sehingga perbedaan pendapatan lebih disebabkan oleh faktor yang lain yaitu jumlah hari melaut, maupun jarak melaut. Pendapatan dari kegiatan kenelayanan tertinggi di Bungaiya sebesar 1,4 juta terdapat pada nelayan yang memiliki wilayah tangkap cukup jauh. Pada awalnya banyak nelayan dikedua desa yang berprofesi sebagai nelayan penyelam, tetapi mengingat adanya resiko tinggi terhadap penyakit kelumpuhan atau bahkan mati, maka profesi tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh nelayan.

Rata-rata pendapatan dari kegiatan kenelayanan bervariasi berdasar musim (gelombang lemah, pancaroba, dan gelombang kuat). Rata-rata pendapatan tertinggi terjadi pada musim gelombang tenang (banyak ikan), karena frekuensi melaut dan hasil tangkapan nelayan lebih besar dibandingkan musim yang lain. Pada musim gelombang tenang rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan sebesar 410 ribu rupiah, sementara pada musim gelombang kuat pendapatan mereka lebih rendah (193 ribu rupiah). Nelayan dengan pendapatan dari kegiatan kenelayanan lebih dari 1 juta sulit dijumpai di daerah ini, karena teknologi penangkapan yang digunakan masih sederhana, baik alat penangkapan maupun sarana penangkapan. Sarana penangkapan yang umum ditemukan di daerah ini adalah jukung dan perahu tanpa motor.

Tabel 3.1.8.

Rata-rata Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan menurut musim di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009

No	Musim	Pendapatan (Rp)		
		Buki	Bungaiya	Buki Bungaiya
1	Tenang	382,692	428,947	410.156
2	Pancaroba	231,923	432,894	351.250
3	Gelombang kuat	146,153	226,315	193.750
	N	26	38	64

Sumber: Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Rendahnya pendapatan nelayan juga berhubungan dengan penurunan populasi ikan di laut sebagai dampak penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Saat ini intensitas penggunaan bom di daerah Buki dan Bungaiya sudah sangat berkurang bahkan tidak ada lagi, tetapi penggunaan air tuba yang mudah didapatkan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Penggunaan air tuba sulit dikendalikan karena bahan dasarnya mudah didapat dan dilakukan oleh penduduk yang tinggal jauh dari pantai.

Nelayan di Buki dan Bungaiya mempunyai wilayah penangkapan yang berbeda menurut musim. Pada waktu angin barat, sebagian besar dari nelayan akan mencari ikan di sebelah timur pulau. Hal ini disebabkan terjadi ombak besar di bagian barat sehingga mereka tidak bisa melaut. Hal sebaliknya terjadi jika terdapat angin timur, maka sebagian besar nelayan menangkap ikan di barat pulau. Selama ini tidak ada perubahan terhadap jenis armada maupun alat penangkapan ikan, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam hasil penangkapan. Sebagian besar nelayan merakan terjadinya penurunan hasil tangkap karena faktor makin berkurangnya populasi ikan di laut. Sebagian besar masyarakat yang jauh dari laut masih banyak yang menggunakan air tuba untuk menangkap ikan di laut, terutama pada waktu gelombang surut. Perpindahan pasar induk di Kabupaten Selayar juga berdampak pada penjualan hasil tangkapan nelayan, karena pasar baru masih sepi dikunjungi pembeli, sehingga ikan sering tidak terjual/tidak laku.

Pendapatan Anggota Pokmas

Kelompok masyarakat (pokmas) usaha ekonomi produktif di Buki dan Bungaiya yang dibentuk dalam rangka kegiatan Coremap jumlahnya cukup banyak, sehingga dapat menampung sebagian besar anggota masyarakat. Anggota pokmas diharapkan dapat memperoleh manfaat coremap melalui dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Akan tetapi pokmas yang terbentuk usaha ekonomi produktif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena masyarakat belum terbiasa berusaha secara berkelompok. Sebagian besar

masyarakat memilih untuk usaha sendiri-sendiri, sehingga kelompok yang terbentuk tidak dapat terkoordinasi secara baik. Oleh sebab itu, dana pinjaman pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola LKM tidak diberikan secara berkelompok, tetapi diberikan pada individu. Tanggung jawab pengembalian dana juga didasarkan pada tanggung jawab individu.

Tabel 3.1.9.
Statistik Pendapatan anggota pokmas
di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2009

No	Pendapatan	Pokmas	Non pokmas
1	Perkapita	237.054	212.773
2	Rata-rata	914.503	734.577
3	Median	533.333	433.333
4	Minimum	100.000	30.000
5	Maximum	2.300.000	4.166.666
	N	27	95

Sumber: Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009.

Pendapatan rumah tangga di Buki dan Bungaiya baik yang memperoleh dana pinjaman bergulir bervariasi dari pendapatan rendah hingga tinggi. Secara umum rata-rata pendapatan rumah tangga yang mendapat dana bergulir lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dana bergulir. Tabel 3.1.9 menunjukkan pendapatan perkapita dari anggota pokmas sekitar 237.054 rupiah, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai 914 ribu rupiah. Dibandingkan dengan pendapatan seluruh penduduk, pendapatan perkapita anggota pokmas hampir sama dengan pendapatan perkapita penduduk yang tidak menjadi anggota pokmas.

Tingkat pendapatan rumah tangga yang menjadi anggota pokmas bervariasi dari terendah (100 ribu rupiah) sampai dengan tertinggi (2,3 juta rupiah). Variasi yang hampir sama terdapat pada pendapatan penduduk yang tidak mendapat dana bergulir. Kondisi ini

menunjukkan adanya keterbukaan dalam penyaluran pinjaman dana LKM yang tidak membedakan penduduk menurut tingkat pendapatan. Semua kalangan berpenghasilan tinggi sampai rendah dapat meminjam dana asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian sebagian besar anggota pokmas berasal dari kalangan ekonomi lemah yang membutuhkan dukungan dana untuk peningkatan taraf hidup mereka. Usaha ekonomi produktif yang diusahakan bervariasi mulai dari perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Sampai saat ini pengembalian dana bergulir masih cukup lancar, karena peminjam harus menyerahkan agunan sebagai jaminan seperti surat/ barang berharga.

3.2. PASIMASUNGGU TIMUR

3.2.1. Pengetahuan dan Partisipasi

Walaupun sejak tahun 2005 Coremap mulai diadakan di daerah ini, namun belum semua masyarakat mengetahui keberadaan Coremap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah yang mengetahui adanya Coremap cukup besar, yaitu sebesar 86%. Meskipun demikian jumlah mereka yang belum mengetahui masih cukup besar, yaitu 14%. Hal itu tentunya mengherankan karena sudah empat tahun Coremap dilaksanakan di daerah ini. Kondisi itu menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi tentang keberadaan Coremap sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal, perlu ditingkatkan.

Tabel 3.2.1.
Pengetahuan adanya Coremap

Kategori	Persentase
Mengetahui	86,0
Tidak mengetahui	14,0
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Untuk memperkenalkan program Coremap yang sudah beberapa tahun dijalankan di daerah ini, maka dilakukan sosialisasi kepada warga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang. Walaupun upaya peningkatan pengetahuan masyarakat itu sudah dilakukan, namun jumlah mereka yang tidak mengetahui adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang Coremap yang dilakukan oleh LPSTK masih cukup banyak, yaitu sekitar 24%. Hal itu disebabkan pengurus LPSTK masih kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya, termasuk motivator desa, fasilitator dan Seto (senior fasilitator). Hal itu terjadi karena fasilitator maupun Seto jarang berada di lokasi desa binaan, sedangkan motivator maupun pengurus lainnya kurang punya inisiatif untuk melakukan sosialisasi. Akibatnya kegiatan sosialisasi tidak dilakuksn secara terencana dan terarah.

Responden yang mengetahui adanya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang, dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut di atas jumlah yang menjawab terlibat dalam kegiatan sangat kecil, yaitu hanya 17,5% dari 97 orang. Selebihnya (82,5%) justru mengaku tidak terlibat. Itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sosialisasi tentang pentingnya upaya pelestarian terumbu karang masih sangat kurang.

Hal yang sama juga terjadi pada saat responden ditanyakan apakah mereka mengetahui adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut. Persentase yang menjawab mengetahui jumlahnya cukup besar, mencapai 65,1% (83orang), sementara jumlah yang tidak mengetahuinya juga masih relatif besar, sekitar 34,9%. Masih banyaknya responden yang tidak mengetahui itu dapat dipahami karena belum ada kegiatan konkret untuk perlindungan/pengawasan pesisir dan laut, kecuali baru terbatas penentuan DPL dan pembuatan RPTK.

Begitu pula pada saat ditanyakan tentang keterlibatan mereka yang mengetahui adanya kegiatan tersebut, maka yang mengaku terlibat hanya sebesar 18,1%, dan selebihnya (81,9%) menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan itu. Ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum

melibatkan masyarakat secara luas. Hal itu karena kegiatan penentuan DPL dan pembuatan RPTK hanya dilakukan secara terbatas oleh pengurus LPSTK bersama dengan fasilitator dan motivator. Memang ada beberapa warga yang dilibatkan, namun itu hanya beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat.

Di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru masing-masing sudah dibentuk LPSTK pada tahun 2005. Ketua, pengurus dan staf LPSTK dipilih oleh sekelompok kecil masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat seperti tetua desa, pemerintah desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diprakarsai oleh fasilitator. Ketua LPSTK selanjutnya ditentukan oleh masyarakat yang hadir dalam rapat yang berjumlah sekitar 10 orang. Sedangkan Ketua Pokmas dipilih berdasarkan kesepakatan dari anggota pokmas sendiri. Meskipun demikian tidak semua responden mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah yang mengetahui dan yang tidak mengetahui hampir seimbang. Responden yang mengaku mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK sebesar 57,4 % , sedangkan jumlah yang mengaku tidak mengetahuinya jumlahnya sebesar 42,6 %. Hal itu disebabkan meskipun pembentukan LPSTK melibatkan masyarakat, namun masih banyak orang yang belum dilibatkan. Hal itu terbukti bahwa dari 74 responden yang mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK, hanya 6,8% yang mengaku terlibat, sedangkan sebagian besar (93,2%) mengaku tidak terlibat.

Untuk pelaksanaan program Coremap, LPSTK di dua desa dengan bimbingan fasilitator mengembangkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), yaitu untuk menentukan kawasan (wilayah) pengelolaan terumbu karang di lokasi Coremap. Saat ini RPTK dan lokasi DPL di dua desa, Bontobulaeng dan Bontobaru telah disusun oleh LPSTK bersama fasilitator, dan telah disahkan menjadi peraturan desa (Perdes). DPL di desa Bontobulaeng di Taka Dapak, sementara DPL desa Bontobaru di sebelah barat Pulau Batu. Berkaitan dengan keberadaan DPL tersebut, maka disusun pula rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK). Dalam RPTK tersebut diatur berbagai kegiatan

yang dilarang dilakukan nelayan di kawasan DPL, antara lain : (1) tidak boleh melintas, (2) tidak boleh memancing dan (3) tidak boleh membuang jangkar di kawasan DPL. Untuk menjaga agar larangan tersebut tidak dilanggar, juga dibuat aturan tentang sanksi bagi yang melanggar. Bagi orang yang melanggar sekali, dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu. Bagi yang melanggar kedua kalinya, dikenakan denda Rp 500 ribu. Uang denda tersebut diserahkan kepada desa. Apabila mereka melanggar untuk ketiga kalinya, maka sanksinya menjadi berlipat ganda, tergantung keputusan desa. Khusus bagi yang merusak terumbu karang, seperti melakukan pengeboman dan/atau menggunakan potasium sianida, maka langsung diserahkan kepada polisi untuk diproses secara hukum.

Terkait dengan kegiatan penyusunan RPTK tersebut, sebagian besar responden (54,3%) mengaku mengetahuinya, namun yang mengaku tidak mengetahuinya juga cukup besar, yaitu 45,7%. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut masih sangat kurang. Bagi mereka yang mengetahui kegiatan tersebut, yaitu sebanyak 72 orang, justru tidak ada satu orang pun yang mengaku terlibat dalam kegiatan. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih belum melibatkan masyarakat. Hal itu terjadi karena pelaksanaan penyusunan RPTK itu hanya dilakukan oleh pengurus LPSTK, motivator dan Seto. Memang ada sebagian masyarakat yang dilibatkan, namun itu terbatas pada orang-orang tertentu yang ditunjuk, yaitu mereka yang dianggap tokoh masyarakat.

Coremap juga melakukan pembangunan desa melalui *village grant*., yang di Desa Bonto Bulaeng sudah turun dua kali, yaitu masing-masing sebesar Rp 50 juta, dan di Desa Bonto Baru baru turun sekali sebesar Rp 50 juta. Di Desa Bontobulaeng dana *village grant* yang pertama digunakan untuk membuat MCK dan drainase di lingkungan desa, dan yang kedua digunakan untuk membuat taman baca. Adapun di Desa Bontobaru dana *village grant* digunakan untuk mengembangkan fasilitas TPA (tempat pendidikan Al-Qur'an) dan pembuatan talut untuk memecah ombak. Selain menggunakan dana *village grant*, pada tahun

2006 Coremap juga membangun pondok informasi di masing-masing desa, yang menempati sebagian dari kantor desa dengan biaya masing-masing sekitar 10 juta rupiah.

Walaupun kegiatan pembangunan desa telah dilakukan oleh Coremap, namun jumlah yang mengetahui kegiatan tersebut hanya sedikit, yaitu sekitar 48,4% dari 129 responden. Adapun dari 63 orang yang mengetahui kegiatan tersebut, yang terlibat dalam kegiatan hanya 1,6 %. Itu terjadi karena pekerjaan tersebut umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga, dan tidak ada penjelasan ke masyarakat bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh Coremap.

Begitu pula dengan pengembangan DPL. Walaupun sudah sekitar dua tahun dibentuk DPL, yaitu di Taka Dapa untuk Desa Bontobulaeng dan di sebelah barat Pulau Batu untuk Desa Bontobaru, namun yang mengaku mengetahui kegiatan pengembangan DPL hanya 47,6%; 52,4% responden justru tidak mengetahuinya. Dari 62 orang yang mengaku mengetahui, yang terlibat dalam kegiatan itu hanya sedikit, yaitu sekitar 3,2%. Hal itu disebabkan karena kegiatan pengembangan DPL itu sangat sedikit melibatkan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan oleh LPSTK untuk memperkenalkan kegiatan Coremap, termasuk pembimbingan pelaksanaan kegiatan oleh LKM. LPSTK juga melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pokmas. Hasil penelitian memang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60,3%) mengetahui kegiatan sosialisasi, pembimbingan dan monitoring tersebut. Meskipun demikian, responden yang belum mengetahuinya masih cukup besar, yaitu 39,7%. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum memasyarakat. Adapun dari jumlah 78 responden yang mengetahui kegiatan tersebut, yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pembimbingan dan monitoring sangat sedikit, yaitu hanya 1,6%. Itu menunjukkan bahwa kegiatan ini belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat.

Untuk menyalurkan dana bergulir, LPSTK juga sudah membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tugas LKM ini adalah menyalurkan dana bergulir yang diterima dari Coremap untuk dipinjamkan kepada anggota Pokmas yang membutuhkan. Walaupun LKM sudah dibentuk sejak tahun 2008, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya pembentukannya, yaitu 53,2%. Adapun dari jumlah responden yang mengetahui kegiatan pembentukan LKM tersebut (61 responden), yang terlibat dalam kegiatan pembentukan LKM sangat kecil, yaitu hanya 1,6%. Sedikitnya jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan LKM karena pengurus LKM tidak banyak, yaitu hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun jumlah orang yang terlibat sebagai anggota juga terbatas, karena jumlah dana yang digulirkan hanya sedikit, yaitu Rp 25 juta per desa.

Untuk melakukan penyelamatan terhadap terumbu karang, LKM diharapkan melakukan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, bersama dengan masyarakat. Terkait dengan itu hanya 37,3% responden (49 orang) yang mengetahui, sedangkan yang tidak mengetahui cukup besar, yaitu 62,7%. Dari 49 responden yang mengetahui kegiatan tersebut, yang mengaku terlibat juga sangat sedikit, yaitu hanya 2%. Hal itu disebabkan dalam praktiknya kegiatan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang itu tidak dilakukan oleh LKM. Adapun mereka yang mengaku terlibat itu karena meminjam uang di LKM, dan saat meminjam diberi tahu oleh LKM bahwa pinjaman hanya diberikan jika usahanya tidak merusak terumbu karang.

Begitu pula terkait dengan kegiatan pembimbingan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh LKM, sebagian besar responden, 62,7% justru tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui hanya 37,3% (49 orang). Dari jumlah itu, yang mengaku terlibat dalam kegiatan pembimbingan juga sangat sedikit, yaitu hanya 2%. Hal itu juga terjadi karena kegiatan bimbingan itu sebetulnya tidak pernah ada. Apa yang dianggap sebagai

bimbingan itu pada dasarnya hanyalah arahan pada saat masyarakat akan meminjam uang ke LKM.

LKM juga diharapkan melakukan monitoring terhadap kegiatan UEP. Terkait dengan itu, hanya 46% (60 responden) yang mengetahuinya. Sisanya, 54% justru tidak mengetahuinya. Bahkan di antara yang mengetahui kegiatan tersebut, tidak ada satu orang pun yang mengaku terlibat dalam kegiatan monitoring tersebut. Hal itu disebabkan apa yang disebut kegiatan monitoring itu tidak dilakukan oleh LKM. Monitoring hanya dilakukan terkait dengan pembayaran angsuran, yaitu jika ada yang menunggak maka didatangi ke rumahnya. Adapun jika pembayaran sudah lancar, LKM tidak pernah mendatangi peminjam.

Kegiatan pelatihan juga diharapkan dilakukan untuk UEP. Terkait dengan itu hanya sebanyak 43,7% (57 orang) yang mengaku telah mengetahui kegiatan tersebut; sedangkan jumlah yang tidak mengetahui masih cukup besar, yaitu 56,3%. Adapun dari yang mengetahuinya, hanya sebanyak 1,8% yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar (98,2 %) mengaku tidak terlibat. Hal itu disebabkan apa yang disebut pelatihan untuk UEP itu tidak pernah dilakukan oleh LKM. Apa yang dianggap sebagai pelatihan itu sebetulnya bukan dilakukan oleh LKM, tetapi oleh kelembagaan lainnya, terutama PKK.

Begitu pula dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Coremap untuk UEP. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Coremap dan untuk memotivasi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan Coremap. Sebanyak 42,9% responden (56 orang) mengaku mengetahuinya, dan yang tidak mengetahui lebih besar, yaitu 57,1%. Adapun dari yang mengaku mengetahui kegiatan pendampingan tersebut, tidak ada satu orang pun yang terlibat di dalamnya. Hal itu disebabkan kegiatan pendampingan terhadap UEP itu sebetulnya sama sekali tidak ada. Apa yang dianggap pendampingan oleh masyarakat itu sebetulnya hanya upaya menagih hutang terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat ke LKM.

Untuk pelaksanaan program Coremap, di tingkat desa sudah dibentuk tiga pokmas, yaitu pokmas konservasi, pokmas UEP dan pokmas wanita/jender. Pembentukan pokmas ini pada awal berdirinya difasilitasi oleh Coremap dengan bantuan fasilitator, LPSTK, dan pemerintahan desa. Coremap memberikan bimbingan proses dalam pembentukan pokmas, termasuk persyaratan administrasinya. Apabila persyaratan lengkap, selanjutnya pokmas ditetapkan oleh pemerintah desa dan diusulkan keberadaannya kepada Coremap Kabupaten (Selayar). Berkaitan dengan itu hanya sebanyak 50,8% (66 orang) yang mengetahui kegiatan pembentukan pokmas; sisanya sebesar 49,2% mengaku tidak mengetahui. Adapun dari yang mengaku mengetahui kegiatan pembentukan pokmas tersebut, hanya 33,3% yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Pokmas konservasi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terumbu karang, agar terhindar dari kegiatan yang merusak, khususnya melakukan pengawasan DPL dan kegiatan lain yang berkaitan dengan konservasi terumbu karang. Berkaitan dengan itu hanya 50% responden yang mengetahuinya, dan 50% lainnya tidak mengetahuinya. Dari jumlah yang mengetahui kegiatan Pokmas Konservasi tersebut, hanya 6,2% yang mengaku terlibat dalam kegiatan pokmas. Meskipun demikian ketika ditanya bentuk keterlibatannya, umumnya keterlibatan mereka bersifat pasif, yaitu hanya sekedar menjadi anggota Pokmas, dan jarang sekali ada pertemuan di antara anggota Pokmas tersebut.

Hal tersebut bisa dipahami karena kegiatan Pokmas konservasi saat ini terkendala oleh tidak adanya kapal patroli. Memang sebelumnya pada tahun 2008 di kawasan ini sudah ada kapal patroli, yang dikelola oleh UPTD Perikanan Pasimasunggu Timur. Akan tetapi, sejak awal 2009 UPTD di kawasan ini dihilangkan dan digabung dengan UPTD Perikanan Kecamatan Pasimasunggu. Akibatnya, kapal petrol yang sudah ada juga ditarik kembali oleh Coremap, sehingga pada saat ini sudah tidak ada lagi.

Pokmas UEP di desa Bontobulaeng dan Bontobaru sudah terbentuk sejak tahun 2005. Pokmas UEP ini melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 45,2% yang mengetahuinya, dan sisanya 54,8% justru tidak mengetahuinya. Adapun mereka yang mengaku mengetahui kegiatan Pokmas UEP, hanya 23,7% yang ikut terlibat dalam kegiatan itu. Akan tetapi, keterlibatan mereka dalam kegiatan Pokmas ekonomi produktif itu patut dipertanyakan, karena ternyata sampai saat penelitian dilakukan yang disebut Pokmas usaha ekonomi produktif itu sama sekali tidak ada kegiatannya. Satu-satunya kegiatan, itupun kalau bisa disebut kegiatan, hanyalah terbatas pada penyaluran dana simpan pinjam kepada anggota yang berjumlah Rp 25 juta. Dengan demikian yang disebut terlibat sebetulnya adalah kegiatan perorangan, yang kebetulan orang itu telah mendapatkan pinjaman dana bergulir dari Coremap.

Kegiatan simpan pinjam di Desa Bontobulaeng maupun Bontobaru pada umumnya digunakan untuk modal, seperti membeli alat tangkap (jarring) dan kegiatan produktif lainnya, yang berkaitan dengan kenelayan maupun yang tidak ada hubungannya dengan kenelayan. Pengembalian pinjaman dilakukan selama 10 bulan dengan bunga cicilan 2,5%, dengan bunga menurun. Peminjam pada cicilan pertama harus membayar Rp. 125.000,- dan selanjutnya menurun sesuai dengan jumlah sisa pinjaman. Menurut aturan yang dikeluarkan LKM setiap peminjam harus ada jaminan, setiap meminjam Rp. 1.000.000,- dengan jaminan berupa 5 gram emas, tetapi jaminan tidak diserahkan pengurus LKM, tetap disimpan peminjam.

Salah satu pokmas yang ada di bawah LPSTK adalah pokmas wanita/jender, yang tujuannya untuk meningkatkan ketrampilan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berkaitan dengan itu, hanya 47,6% yang responden yang mengetahuinya, dan sebagian besar (52,4%) justru tidak mengetahuinya. Dari jumlah mereka yang mengetahui (59 orang), hanya 23,7% yang terlibat dalam kegiatan pokmas tersebut. Hal itu bisa dipahami karena Pokmas wanita yang

sudah dibentuk itu ternyata tidak pernah ada kegiatannya. Memang dari mereka yang mengetahui kegiatan Pokmas ini ada yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, itu sebetulnya yang dilakukan bukan kegiatan Pokmas yang dibentuk oleh Coremap, melainkan kegiatan kelompok perempuan yang ada di desa.

Untuk pelaksanaan kegiatan Coremap, di tingkat desa dibentuk motivator desa, yang tugasnya adalah yang tugasnya adalah menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan program Coremap. Meskipun demikian, hanya 52% responden yang mengetahui kegiatan motivator desa. Adapun dari jumlah yang mengetahuinya (68 orang), hanya 5,9% yang mengaku terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh motivator desa.

Selain motivator desa, di tingkat desa juga disediakan fasilitator lapangan, yang tugasnya adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Coremap di tingkat desa. Meskipun demikian, hanya 45,2% yang mengaku mengetahui kegiatan fasilitator lapangan. Jumlah yang tidak mengetahui lebih besar, yaitu 54,8%. Hal itu terjadi karena pelaksanaan pendampingan oleh fasilitator lapangan sangat minim. Petugas yang harus melakukan pendampingan sangat jarang di lokasi, dan hanya waktu-waktu tertentu saja kalau ada permasalahan yang harus dibahas mereka tinggal di desa Coremap yang menjadi wilayah binaannya. Dengan kondisi seperti itu maka sangat wajar jika kegiatan mereka tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Dari jumlah itu (60 orang), tidak ada satu orang pun yang mengaku terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator lapangan.

Untuk keberhasilan program Coremap, dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan Coremap sangat diperlukan. Meskipun demikian, yang mengetahui adanya dukungan dari masyarakat tersebut hanya 58,3%; sedangkan 41,7% mengaku tidak mengetahuinya. Dari responden yang mengetahui dukungan dari masyarakat tersebut (76 orang), hanya 14,5% yang mengaku terlibat dalam pemberian dukungan tersebut.

Tabel 3.2.2
Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kelembagaan COREMAP

Kategori variabel Kegiatan Kelembagaan		Mengetahui			Terlibat		
		Ya	Tidak	N	Ya	Tidak	N
1	Peningk. pengetahuan	75,2	24,8	129	17,5	82,5	97
2	Kegiatan perlindungan	65,1	34,9	129	18,1	81,9	83
3	Pembentukan LPSTK	57,4	42,6	129	6,8	93,2	74
4	Kegiatan LPSTK						
	-Penyusunan RPTK	54,3	45,7	129	0,0	100,0	72
	-Pembangunan desa	48,4	51,6	126	1,6	98,4	63
	-Pengembangan DPL	47,6	52,4	126	3,2	96,8	62
	-Sosialisasi, bimbingan, monitoring	60,3	39,7	126	2,6	97,4	78
5	Pembentukan LKM	46,8	53,2	126	1,6	98,4	61
6	Kegiatan LKM						
	- Pemilihan jenis usaha	37,3	62,7	126	2,0	98,0	49
	- Pembimbingan	37,3	62,7	126	2,0	98,0	49
	- Monitoring keg. UEP	46,0	54,0	126	00,0	100,0	60
7	Pelatihan/Pendampingan UEP						
	- Pelatihan	43,7	56,3	126	1,8	98,2	57
	- Pendampingan	42,9	57,1	126	00,0	100,0	56
8	Pembentukan Pokmas	50,8	49,2	126	33,3	66,7	66
9	Kegiatan Pokmas						
	- Pokmas konservasi	50,0	50,0	126	6,2	93,8	65
	- Pokmas UEP	45,2	54,8	126	23,7	76,3	59
	- Pokmas jender	47,6	52,4	126	00,0	100,0	62
10	Kegiatan pengelola Coremap						
	Kegiatan MD	52,0	48,0	125	5,9	94,1	68
	CF/FF/Fasla	45,2	54,8	124	00,0	100,0	60
11	Dukungan masyarakat terhadap Coremap	58,3	41,7	127	14,5	85,5	76

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

Walaupun sejak tahun 2005 Coremap mulai diadakan di daerah ini, namun belum semua masyarakat telah mengetahui keberadaan Coremap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah yang mengetahui adanya Coremap cukup besar, yaitu 86%. Meskipun demikian jumlah yang belum mengetahuinya masih cukup besar, yaitu 14%. Hal itu tentunya mengherankan karena sudah empat tahun Coremap dilaksanakan di daerah ini. Kondisi itu menunjukkan bahwa walaupun sosialisasi tentang keberadaan Coremap sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.2.3.
Pengetahuan Keberadaan Kegiatan Coremap

Kategori	Persentase
Mengetahui	86,0
Tidak mengetahui	14,0
Jumlah (N=129)	100,0

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar, 2009

Untuk memperkenalkan program Coremap yang sudah beberapa tahun dijalankan di daerah ini, maka dilakukan sosialisasi kepada warga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang. Walaupun upaya peningkatan pengetahuan masyarakat itu sudah dilakukan, namun jumlah yang tidak mengetahui adanya kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh Coremap masih cukup banyak, yaitu sekitar 24%. Hal itu disebabkan pengurus LPSTK masih kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk dalam hal ini adalah motivator, fasilitator maupun Seto (senior fasilitator) kecamatan. Hal itu terjadi karena motivator maupun seto jarang ada di desa binaan, sedangkan fasilitator maupun pengurus lainnya kurang punya inisiatif untuk melakukan sosialisasi. Akibatnya kegiatan sosialisasi tidak dilakukannya secara terencana dan terarah.

Responden yang mengetahui adanya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang, pada saat ditanyakan tentang keterlibatannya dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelestarian terumbu karang, jumlah yang menjawab terlibat dalam kegiatan justru sangat kecil, yaitu hanya 17,5% dari 97 orang. Selebihnya (82,5%) justru mengaku tidak terlibat. Itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sosialisasi tentang pentingnya upaya pelestarian terumbu karang masih kecil.

Hal yang sama juga terjadi pada saat responden ditanyakan apakah mereka mengetahui adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut. Persentase yang menjawab tahu cukup besar, yaitu 65,1% (83orang), namun jumlah yang tidak mengetahuinya juga masih besar, yaitu 34,9%. Masih banyaknya responden yang tidak mengetahui itu bisa dipahami karena belum ada kegiatan konkret untuk perlindungan/pengawasan pesisir dan laut, kecuali baru terbatas penentuan DPL dan pembuatan RPTK.

Begitu pula pada saat ditanyakan tentang keterlibatan mereka yang mengetahui adanya kegiatan tersebut, maka yang mengaku terlibat hanya sebesar 18,1%, dan selebihnya (81,9%) justru tidak terlibat dalam kegiatan itu. Ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum melibatkan masyarakat secara luas. Hal itu karena kegiatan penentuan DPL dan pembuatan RPTK hanya dilakukan secara terbatas oleh pengurus LPSTK bersama dengan motivator. Memang ada beberapa warga yang dilibatkan, namun itu hanyalah beberapa orang yang dianggap tokoh masyarakat yang ditunjuk.

Di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru masing-masing sudah dibentuk LPSTK pada tahun 2005. Ketua, pengurus dan staf LPSTK dipilih oleh sekelompok kecil masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat seperti tetua desa, pemerintah desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diprakarsai oleh fasilitator. Ketua LPSTK selanjutnya ditentukan oleh masyarakat yang hadir dalam rapat yang berjumlah sekitar 10 orang. Sedangkan Ketua Pokmas dipilih berdasarkan kesepakatan dari anggota pokmas sendiri. Meskipun

demikian tidak semua responden mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah yang mengetahui dan yang tidak mengetahui hampir seimbang, yaitu 57,4% mengaku mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK, sedangkan jumlah yang mengaku tidak mengetahuinya sebesar 42,6%. Hal itu disebabkan walaupun pembentukan LPSTK telah melibatkan masyarakat, namun masih banyak orang yang belum dilibatkan. Hal itu terbukti bahwa dari 74 responden yang mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK, hanya 6,8% yang mengaku terlibat, sedangkan sebagian besar (93,2%) justru mengaku tidak terlibat.

Untuk pelaksanaan program Coremap, LPSTK di dua desa dengan bimbingan fasilitator mengembangkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang RPTK, yaitu menentukan kawasan (wilayah) daerah pengelolaan terumbu karang di lokasi Coremap. Saat ini RPTK dan lokasi DPL di dua desa, Bontobulaeng dan Bontobaru telah disusun oleh LPSTK bersama fasilitator, dan telah disahkan menjadi peraturan desa (Perdes). DPL di desa Bontobulaeng di Taka Dapak, sementara DPL desa Bontobaru di sebelah barat Pulau Batu. Berkaitan dengan keberadaan DPL tersebut, maka disusun pula rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK). Dalam RPTK tersebut diatur berbagai kegiatan yang dilarang dilakukan di kawasan DPL, yaitu: Tidak boleh melintas, tidak boleh memancing dan tidak boleh membuang jangkar di kawasan DPL. Untuk menjaga agar latangan itu tidak dilanggar, juga dibuat aturan tentang sanksi bagi yang melanggar. Bagi orang yang melanggar sekali, dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu. Bagi yang melanggar kedua kalinya, dikenakan denda Rp 500 ribu. Uang denda tersebut diserahkan kepada desa. Adapun jika melanggar untuk ketiga kalinya, maka sanksinya menjadi berlipat ganda, tergantung keputusan desa. Khusus bagi yang merusak terumbu karang, seperti melakukan pengeboman dan/atau menggunakan potassium, maka langsung diserahkan kepada polisi untuk diproses secara hukum.

Terkait dengan kegiatan penyusunan RPTK tersebut, sebagian besar responden (54,3%) mengaku mengetahuinya, namun yang

mengaku tidak mengetahuinya juga cukup besar, yaitu 45,7%. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut masih sangat kurang. Bagi mereka yang mengetahui kegiatan tersebut, yaitu sebanyak 72 orang, justru tidak ada satu orang pun yang mengaku terlibat dalam kegiatan. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih belum melibatkan masyarakat. Hal itu terjadi karena pelaksanaan penusunan RPTK itu hanya dilakukan oleh pengurus LPSTK, motivator dan Seto. Memang ada sebagian masyarakat yang dilibatkan, namun itu terbatas pada orang-orang tertentu yang ditunjuk, yaitu mereka yang dianggap tokoh masyarakat.

Coremap juga melakukan pembangunan desa melalui *village grant*, yang di Desa Bonto Bulaeng sudah turun dua kali, yaitu masing-masing sebesar Rp 50 juta, dan di Desa Bonto Baru baru turun sekali sebesar Rp 50 juta. Di Desa Bontobulaeng dana *village grant* yang pertama digunakan untuk membuat MCK dan drainase di lingkungan desa, dan yang kedua digunakan untuk membuat taman baca. Adapun di Desa Bontobaru dana *village grant* digunakan untuk mengembangkan fasilitas TPA (tempat pendidikan Al-Qur'an) dan pembuatan talut untuk memecah ombak. Selain menggunakan dana *village grant*, pada tahun 2006 Coremap juga membangun pondok informasi di masing-masing desa, yang menempati sebagian dari kantor desa dengan biaya masing-masing sekitar 10 juta rupiah.

Walaupun kegiatan pembangunan desa telah dilakukan oleh Coremap, namun jumlah yang mengetahui kegiatan tersebut hanya sedikit, yaitu 48,4% dari 129 responden. Adapun dari 63 orang yang mengetahui kegiatan tersebut, yang terlibat dalam kegiatan hanya 1,6%. Itu terjadi karena pekerjaan tersebut umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga, dan tidak ada penjelasan ke masyarakat bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh Coremap.

Begitu pula dengan pengembangan DPL. Walaupun sudah sekitar dua tahun dibentuk DPL, yaitu di Taka Dapa untuk Desa Bontobulaeng dan di sebelah barat Pulau Batu untuk Desa Bontobaru, namun yang mengaku mengetahui kegiatan pengembangan DPL hanya

47,6%; 52,4% responden justru tidak mengetahuinya. Dari 62 orang yang mengaku mengetahuinya, yang terlibat dalam kegiatan itu hanya sedikit, yaitu hanya 3,2%. Hal itu disebabkan kegiatan pengembangan DPL itu sangat sedikit melibatkan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan oleh LPSTK untuk memperkenalkan kegiatan Coremap, termasuk pembimbingan pelaksanaan kegiatan oleh LKM. LPSTK juga melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pokmas. Hasil penelitian memang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60,3%) mengetahui kegiatan sosialisasi, pembimbingan dan monitoring tersebut. Meskipun demikian, responden yang belum mengetahuinya masih cukup besar, yaitu 39,7%. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum memasyarakat. Adapun dari jumlah 78 responden yang mengetahui kegiatan tersebut, yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pembimbingan dan monitoring sangat sedikit, yaitu hanya 1,6%. Itu menunjukkan bahwa kegiatan ini belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat.

Untuk menyalurkan dana bergulir, LPSTK juga sudah membentuk LKM. Tugas LKM ini adalah menyalurkan dana bergulir yang diterima dari Coremap untuk dipinjamkan kepada anggota Pokmas yang membutuhkan. Walaupun LKM sudah dibentuk sejak tahun 2008, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya pembentukannya, yaitu 53,2%. Adapun dari jumlah responden yang mengetahui kegiatan pembentukan LKM tersebut (61 responden), yang terlibat dalam kegiatan pembentukan LKM sangat kecil, yaitu hanya 1,6%. Sedikitnya jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan LKM karena pengurus LKM tidak banyak, yaitu hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun jumlah orang yang terlibat sebagai anggota juga terbatas, karena jumlah dana yang digulirkan hanya sedikit, yaitu Rp 25 juta per desa.

Untuk melakukan penyelamatan terhadap terumbu karang, LKM diharapkan melakukan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, bersama dengan masyarakat. Terkait dengan itu hanya

37,3% responden (49 orang) yang mengetahui, sedangkan yang tidak mengetahui cukup besar, yaitu 62,7%. Dari 49 responden yang mengetahui kegiatan tersebut, yang mengaku terlibat juga sangat sedikit, yaitu hanya 2%. Hal itu disebabkan dalam praktiknya kegiatan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang itu tidak dilakukan oleh LKM. Adapun mereka yang mengaku terlibat itu karena meminjam uang di LKM, dan saat meminjam diberi tahu oleh LKM bahwa pinjaman hanya diberikan jika usahanya tidak merusak terumbu karang.

Begitu pula terkait dengan kegiatan pembimbingan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh LKM, sebagian besar responden, 62,7% justru tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui hanya 37,3% (49 orang). Dari jumlah itu, yang mengaku terlibat dalam kegiatan pembimbingan juga sangat sedikit, yaitu hanya 2%. Hal itu juga terjadi karena kegiatan bimbingan itu sebetulnya tidak pernah ada. Apa yang dianggap sebagai bimbingan itu pada dasarnya hanyalah arahan pada saat masyarakat akan meminjam uang ke LKM.

LKM juga diharapkan melakukan monitoring terhadap kegiatan UEP. Terkait dengan itu, hanya 46% (60 responden) yang mengetahuinya. Sisanya, 54% justru tidak mengetahuinya. Bahkan di antara yang mengetahui kegiatan tersebut, tidak ada satu orang pun yang mengaku terlibat dalam kegiatan monitoring tersebut. Hal itu disebabkan apa yang disebut kegiatan monitoring itu tidak dilakukan oleh LKM. Monitoring hanya dilakukan terkait dengan pembayaran angsuran, yaitu jika ada yang menunggak maka didatangi ke rumahnya. Adapun jika pembayaran sudah lancar, LKM tidak pernah mendatangi peminjam.

Kegiatan pelatihan juga diharapkan dilakukan untuk UEP. Terkait dengan itu hanya sebanyak 43,7% (57 orang) yang mengaku telah mengetahui kegiatan tersebut; sedangkan jumlah yang tidak mengetahui masih cukup besar, yaitu 56,3%. Adapun dari yang mengetahuinya, hanya sebanyak 1,8% yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar (98,2%) mengaku tidak terlibat. Hal itu

disebabkan apa yang disebut pelatihan untuk UEP itu tidak pernah dilakukan oleh LKM. Apa yang dianggap sebagai pelatihan itu sebetulnya bukan dilakukan oleh LKM, tetapi oleh kelembagaan lainnya, terutama PKK.

Begitu pula dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Coremap untuk UEP. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Coremap dan untuk memotivasi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan Coremap. Sebanyak 42,9% responden (56 orang) mengaku mengetahuinya, dan yang tidak mengetahui lebih besar, yaitu 57,1%. Adapun dari yang mengaku mengetahui kegiatan pendampingan tersebut, tidak ada satu orang pun yang terlibat di dalamnya. Hal itu disebabkan kegiatan pendampingan terhadap UEP itu sebetulnya sama sekali tidak ada. Apa yang dianggap pendampingan oleh masyarakat itu sebetulnya hanya upaya menagih hutang terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat ke LKM.

Untuk pelaksanaan program Coremap, di tingkat desa sudah dibentuk tiga pokmas, yaitu pokmas konservasi, pokmas UEP dan pokmas wanita/jender. Pembentukan pokmas ini pada awal berdirinya difasilitasi oleh Coremap dengan bantuan fasilitator, LPSTK, dan pemerintahan desa. Coremap memberikan bimbingan proses dalam pembentukan pokmas, termasuk persyaratan administrasinya. Apabila persyaratan lengkap, selanjutnya pokmas ditetapkan oleh pemerintah desa dan diusulkan keberadaannya kepada Coremap Kabupaten (Selayar). Berkaitan dengan itu hanya sebanyak 50,8% (66 orang) yang mengetahui kegiatan pembentukan pokmas; sisanya sebesar 49,2% mengaku tidak mengetahui. Adapun dari yang mengaku mengetahui kegiatan pembentukan pokmas tersebut, hanya 33,3% yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Pokmas konservasi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terumbu karang, agar terhindar dari kegiatan yang merusak, khususnya melakukan pengawasan DPL dan kegiatan lain yang berkaitan dengan konservasi terumbu karang. Berkaitan dengan itu

hanya 50% responden yang mengetahuinya, dan 50% lainnya tidak mengetahuinya. Dari jumlah yang mengetahui kegiatan Pokmas Konservasi tersebut, hanya 6,2% yang mengaku terlibat dalam kegiatan pokmas. Meskipun demikian ketika ditanya bentuk keterlibatannya, umumnya keterlibatan mereka bersifat pasif, yaitu hanya sekedar menjadi anggota Pokmas, dan jarang sekali ada pertemuan di antara anggota Pokmas tersebut.

Hal tersebut bisa dipahami karena kegiatan Pokmas konservasi saat ini terkendala oleh tidak adanya kapal patroli. Memang sebelumnya pada tahun 2008 di kawasan ini sudah ada kapal patroli, yang dikelola oleh UPTD Perikanan Pasimasunggu Timur. Akan tetapi, sejak awal 2009 UPTD di kawasan ini dihilangkan dan digabung dengan UPTD Perikanan Kecamatan Pasimasunggu. Akibatnya, kapal petrol yang sudah ada juga ditarik kembali oleh Coremap, sehingga pada saat ini sudah tidak ada lagi.

Pokmas UEP di desa Bontobulaeng dan Bontobaru sudah terbentuk sejak tahun 2005. Pokmas UEP ini melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 45,2% yang mengetahuinya, dan sisanya 54,8% justru tidak mengetahuinya. Adapun mereka yang mengaku mengetahui kegiatan Pokmas UEP, hanya 23,7% yang ikut terlibat dalam kegiatan itu. Akan tetapi, keterlibatan mereka dalam kegiatan Pokmas ekonomi produktif itu patut dipertanyakan, karena ternyata sampai saat penelitian dilakukan yang disebut Pokmas usaha ekonomi produktif itu sama sekali tidak ada kegiatannya. Satu-satunya kegiatan, itupun kalau bisa disebut kegiatan, hanyalah terbatas pada penyaluran dana simpan pinjam kepada anggota yang berjumlah Rp 25 juta. Dengan demikian yang disebut terlibat sebetulnya adalah kegiatan perorangan, yang kebetulan orang itu telah mendapatkan pinjaman dana bergulir dari Coremap.

Kegiatan simpan pinjam di Desa Bontobulaeng maupun Bontobaru pada umumnya digunakan untuk modal, seperti membeli alat tangkap (jarring) dan kegiatan produktif lainnya, yang berkaitan dengan

kenelayanan maupun yang tidak ada hubungannya dengan kenelayanan. Pengembalian pinjaman dilakukan selama 10 bulan dengan bunga cicilan 2,5 persen, dengan bunga menurun. Peminjam pada cicilan pertama harus membayar Rp. 125.000,- dan selanjutnya menurun sesuai dengan jumlah sisa pinjaman. Menurut aturan yang dikeluarkan LKM setiap peminjam harus ada jaminan, setiap meminjam Rp. 1.000.000,- dengan jaminan berupa 5 gram emas, tetapi jaminan tidak diserahkan pengurus LKM, tetap disimpan peminjam.

Salah satu pokmas yang ada di bawah LPSTK adalah pokmas wanita/jender, yang tujuannya untuk meningkatkan ketrampilan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berkaitan dengan itu, hanya 47,6% yang responden yang mengetahuinya, dan sebagian besar (52,4%) justru tidak mengetahuinya. Dari jumlah mereka yang mengetahui (59 orang), hanya 23,7% yang terlibat dalam kegiatan pokmas tersebut. Hal itu bisa dipahami karena Pokmas wanita yang sudah dibentuk itu ternyata tidak pernah ada kegiatannya. Memang dari mereka yang mengetahui kegiatan Pokmas ini ada yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, itu sebetulnya yang dilakukan bukan kegiatan Pokmas yang dibentuk oleh Coremap, melainkan kegiatan kelompok perempuan yang ada di desa.

Untuk pelaksanaan kegiatan Coremap, di tingkat desa dibentuk motivator desa, yang tugasnya adalah yang tugasnya adalah menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan program Coremap. Meskipun demikian, hanya 52% responden yang mengetahui kegiatan motivator desa. Adapun dari jumlah yang mengetahuinya (68 orang), hanya 5,9% yang mengaku terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh motivator desa.

Selain motivator desa, di tingkat desa juga disediakan fasilitator lapangan, yang tugasnya adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Coremap di tingkat desa. Meskipun demikian, hanya 45,2% yang mengaku mengetahui kegiatan fasilitator lapangan. Jumlah yang tidak mengetahui lebih besar, yaitu 54,8%. Hal itu terjadi karena pelaksanaan pendampingan oleh fasilitator lapangan sangat minim.

Petugas yang harus melakukan pendampingan sangat jarang di lokasi, dan hanya waktu-waktu tertentu saja kalau ada permasalahan yang harus dibahas mereka tinggal di desa Coremap yang menjadi wilayah binaannya. Dengan kondisi seperti itu maka sangat wajar jika kegiatan mereka tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Dari jumlah itu (60 orang), tidak ada satu orang pun yang mengaku terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator lapangan.

Untuk keberhasilan program Coremap, dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan Coremap sangat diperlukan. Meskipun demikian, yang mengetahui adanya dukungan dari masyarakat tersebut hanya 58,3%; sedangkan 41,7% mengaku tidak mengetahuinya. Dari responden yang mengetahui dukungan dari masyarakat tersebut (76 orang), hanya 14,5% yang mengaku terlibat dalam pemberian dukungan tersebut.

Tabel 3.2.4.
Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kelembagaan COREMAP

Kategori variabel		Mengetahui			Terlibat		
		Ya	Tidak	N	Ya	Tidak	N
1	Peningkatan pengetahuan	75,2	24,8	129	17,5	82,5	97
2	Kegiatan perlindungan	65,1	34,9	129	18,1	81,9	83
3	Pembentukan LPSTK	57,4	42,6	129	6,8	93,2	74
4	Kegiatan LPSTK						
	-Penyusunan RPTK	54,3	45,7	129	0,0	100,0	72
	-Pembangunan desa	48,4	51,6	126	1,6	98,4	63
	-Pengembangan DPL	47,6	52,4	126	3,2	96,8	62
	-Sosialisasi, pembimbingan, monitoring	60,3	39,7	126	2,6	97,4	78
5	Pembentukan LKM	46,8	53,2	126	1,6	98,4	61
6	Kegiatan LKM						
	-Pemilihan jenis usaha	37,3	62,7	126	2,0	98,0	49
	-Pembimbingan	37,3	62,7	126	2,0	98,0	49
	-Monitoring kegiatan UEP	46,0	54,0	126	00,0	100,0	60
7	Pelatihan/Pendampingan UEP						
	-Pelatihan	43,7	56,3	126	1,8	98,2	57

	-Pendampingan	42,9	57,1	126	00,0	100,0	56
8	Pembentukan Pokmas	50,8	49,2	126	33,3	66,7	66
9	Kegiatan Pokmas						
	Pokmas konservasi	50,0	50,0	126	6,2	93,8	65
	-Pokmas UEP	45,2	54,8	126	23,7	76,3	59
	-Pokmas wanita/jender	47,6	52,4	126	00,0	100,0	62
10	Kegiatan pengelola Coremap						
	-Kegiatan MD	52,0	48,0	125	5,9	94,1	68
	-CF/FF/Fasla	45,2	54,8	124	00,0	100,0	60
11	Dukungan masyarakat terhadap Coremap	58,3	41,7	127	14,5	85,5	76

Sumber : Data primer Survei BME T2 Selayar . 2009

3.2.2. Manfaat Sosial

Desa Bontobaru dan Bontobulaeng merupakan dua desa obyek COREMAP yang telah memperoleh dana village grand masing-masing sebesar Rp 50 juta pada tahun 2007 dan 2008. Adapun pemberian dana tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat di lokasi Coremap agar supaya mau terlibat dan berpartisipasi, terutama dalam mengawasi keberadaan terumbu karang yang ada di sekitar desa masing-masing. Dana tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan desa, terutama yang terkait dengan pembangunan fisik.

Pemerintah desa bekerjasama dengan LPSTK mempergunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan fisik desa Bontobulaeng dari village grand dimanfaatkan untuk pembangunan MCK di empat dusun, pembuatan drainase dengan tujuan agar supaya air hujan dapat dialirkan menuju sungai supaya di sekitar desa tidak banjir (tergenang). Sementara itu di desa Bontobaru pemanfaatan dana village grand digunakan untuk membangun turap (penahan ombak) dan membangun fasilitas TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur'an). Pelaksanaan pembangunan fisik di dua desa tersebut tidak melibatkan masyarakat karena pekerjaan pembangunan MCK dan drainase (sistem pembuangan air) memerlukan

tenaga yang trampil sehingga pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh tukang batu tampil yang dibayar secara harian, hal ini agar supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena dilakukan oleh ahlinya. Sehingga keterlibatan masyarakat sangat kecil bahkan hampir tidak ada, kecuali mereka yang memiliki keahlian sebagai tukang batu. Meskipun keterlibatan penduduk dalam pembangunan fisik, namun manfaat hasil program pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.2.5.
Persentase Penduduk menurut keterlibatan dan kemanfaatan
program Kegiatan Pembangunan Fisik Desa

No	Kegiatan pembangunan fisik desa	Terlibat		Bermanfaat	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Pondok informasi	4	3,1	61	47,3
2	Sarana air bersih dan sanitasi	2	1,6	7	9
3	Fasilitas desa : gedung TPA, bantuan ibadah	2	1,6	52	100
	N = 129	8		120	100

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang BME T2 Indonesia, 2009.

Sarana pembangunan pondok informasi di dua desa (Bontobaru dan Bontobulaeng) menurut mereka sangat penting dan bermanfaat, terutama sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang berbagai kegiatan Coremap di kawasan ini yang dinyatakan oleh 47,3 persen responden. Namun demikian berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa nara sumber seperti sekretaris LPSTK, pejabat desa dan fasilitator desa, menyatakan bahwa sarana dan prasarana pondok informasi kurang memadai. Alat peraga untuk sosialisasi (leaflet, poster, buku panduan) kegiatan Coremap jumlahnya sangat terbatas. Begitu pula peralatan mesin ketik, megaphone dan

fasilitas meja kursi juga tersedia terbatas sehingga dapat mengganggu pelaksanaan Coremap, terutama program MPA dan bantuan modal usaha bergulir.

Sementara itu, pemanfaatan lain adalah untuk pembangunan sarana air bersih berupa bak penampungan air bersih dan MCK. Pembangunan bak penampung air bersih dilakukan di dusun Pandang yang untuk menampung air hujan. Adapun pembuatan MCK lokasinya di empat dusun yaitu dusun Mare Utara, dusun Ujung, dusun Pandang dan dusun Mare Utara. Pembangunan MCK ini sangat penting, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di dusun-dusun tersebut belum memiliki MCK, sehingga sebagian besar penduduk biasanya buang air besar di pinggir pantai atau di kebun. Sedangkan pemanfaatan dana tersebut di desa Bontobaru sesuai kesepakatan masyarakat digunakan untuk mengembangkan fasilitas TPA dan pembuatan turap dan pembuatan pipa air minum.

3.2.3. Manfaat Ekonomi

Kegiatan Coremap selain bertujuan untuk melestarikan dan merehabilitasi terumbu karang juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mereka yang selama ini kehidupannya sangat tergantung dari hasil laut. Dengan kehidupan yang sejahtera diharapkan perusakan terhadap sumber daya laut semakin berkurang dan tidak terjadi. Program Coremap yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat selain village grant berupa bantuan modal pada pokmas dan dana untuk simpan pinjam. Adanya berbagai bantuan modal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Manfaat ekonomi dapat tercermin dengan adanya perubahan pendapatan yang lebih baik atau semakin terpuruk. Bantuan modal yang telah diterima di dua desa berupa dana "simpan pinjam" sebesar Rp 25 juta, yang diterima desa Bontobaru pada tahun 2007, sementara desa Bontobulaeng baru menerima dana tersebut pada akhir tahun 2008. Dana simpan pinjam (*seed grant*) yang diterima LPSTK itu selanjutnya

dikelola oleh LKM (Lembaga keuangan Mikro). Oleh LKM dana simpan pinjam itu kemudian digulirkan kepada anggota pokmas atau masyarakat yang membutuhkan dengan jumlah pinjaman sekitar Rp 1 juta dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan LKM dengan anggota Pokmas dan masyarakat. Kegiatan simpan pinjam di desa Bontobaru pada umumnya digunakan untuk membeli alat tangkap (jaring), modal usaha untuk membuat makanan kecil (kue) dan untuk modal membeli bahan (kain) baju usaha penjahit. Karena jumlah dana yang terbatas, tidak semua anggota pokmas dan masyarakat bisa memperoleh pinjaman.

Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan

Menurut data tahun 2009, sebanyak 67 persen menyatakan bahwa kondisi ekonomi pada umumnya sama saja dibandingkan sebelum adanya Coremap, sementara yang menyatakan kondisi ekonomi lebih baik dinyatakan oleh 30,9 persen orang responden. Peningkatan ekonomi mereka kemungkinan bukan karena program Coremap, karena sejak tahun 2008 sampai saat ini (2009) belum ada program Coremap yang dapat dijalankan oleh anggota pokmas dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan karena adanya beberapa sumber pendapatan antara lain dari pertanian (sawah, kebun mede), perdagangan dan pegawai negeri (guru, pegawai kecamatan). Kebetulan saat ini di kawasan ini sedang panen mede sehingga kemungkinan peningkatan pendapatan responden/masyarakat berasal dari hasil penjualan mede.

Program Coremap yang ada di dua desa tersebut saat ini berupa dana bergulir (simpan pinjam). Belum berjalannya program pokmas untuk MPA karena anggota pokmas pada umumnya tidak mengetahui secara jelas tujuan pokmas, sehingga belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal tersebut diperparah dengan ketidakhadiran Seto, fasilitator, kurang berjalannya LPSTK dan pokmas, kurang berjalannya motivator desa dan tidak efektifnya memanfaatkan pondok informasi. Keberadaan dan kehadiran pendamping program sangat penting karena

mereka memiliki tugas mengarahkan dan membimbing serta memberi pelatihan berbagai kegiatan, terutama yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat selain menyelamatkan terumbu karang.

Sementara itu apabila kita melihat hasil tangkapan ikan sebagian besar responden (75 persen) menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan sama saja dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan Coremap. Sedangkan mereka yang menyatakan hasil tangkapan meningkat sebanyak 17,9 persen responden dan mereka yang menyatakan menurun sebesar 7,1 persen. Tidak ada bedanya hasil tangkapan ikan sebelum dan saat sekarang, hal itu kemungkinan karena populasi ikan semakin berkurang, akibat kerusakan kawasan terumbu karang di sekitar pulau Jampea. Selain itu alat tangkap nelayan masih tradisional (pancing, jaring) dan wilayah tangkap terbatas sehingga perolehan ikan relatif sama sebelum maupun sekarang setelah adanya kegiatan Coremap. Sedangkan mereka yang mengemukakan bahwa hasil tangkapan meningkat, kemungkinan nelayan memiliki alat tangkap yang lebih baik, wilayah tangkap semakin jauh sehingga hasil tangkapannya juga meningkat. Untuk melihat perubahan pendapatan nelayan dan hasil tangkapan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.2.6.
Pendapatan dari kenelayanan dan jumlah hasil tangkap
satu tahun terakhir di Bontobaru dan Bontobulaeng, tahun 2009

No	Kondisi	Pendapatan		Jumlah hasil tangkap	
		N	Persentase	N	Persentase
1	Naik	17	30,9	10	17,9
2	Sama saja	42	67,3	42	75,0
3	Menurun	1	1,8	4	7,1
	Jumlah	55	100,0	55	100,0

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang, BME T2 Indonesia, 2009.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, dimana rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi, rumah tangga tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, biasanya sebagian besar dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (beras dan lauk pauk) dan untuk biaya sekolah anak dan kesehatan. Pendapatan masyarakat kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Pasimasunggu Timur) sangat tergantung dari sumber daya laut, lahan pertanian dan perkebunan. Pendapatan rumah tangga penduduk desa Bontobaru dan Bontobulaeng pada tahun 2009 dapat dilihat pada uraian dalam tabel di bawah.

Tabel 3.2.7
Statistik pendapatan Rumah tangga di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Tahun 2009

No	Jenis Pendapatan	Besaran Pendapatan
1	Pendapatan Per Kapita RT	139.643,00
2	Rata-rata pendapatan RT	551.558,00
3	Median pendapatan RT	388.333,00
4	Pendapatan Minimum RT	30.000,00
5	Pendapatan Maksimum RT	4.300.000,00
	N	129

Sumber: Data Dasar Survei Aspek Sosial Ekonomi BME (T2), Indonesia, 2009

Tabel di atas memperlihatkan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Pasimasunggu Timur pada tahun 2009 sebesar Rp. 551.558,-. Rata-rata pendapatan rumah tangga tahun 2009 tersebut, relative kecil karena pada saat penelitian dilakukan pertanian sawah (padi) dan budidaya ikan (tambak) belum panen sehingga pendapatannya tidak sebesar pada saat panen. Selain itu pendapatan dari hasil melaut juga relative kecil. Hal itu karena berdasarkan nara

sumber populasi ikan semakin kecil, nelayan memiliki alat tangkap yang sederhana (pancing dan jaring), wilayah tangkap yang terbatas sehingga ikan yang didapat sedikit yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga.

Pendapatan per kapita penduduk di kawasan ini sebesar Rp. 139.643,-. Apabila dibandingkan dengan menggunakan garis kemiskinan 1 \$ US, pendapatan per kapita penduduk masih berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB. Apalagi jika membandingkan dengan batasan garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 2 \$ US, pendapatan per kapita penduduk semakin terlihat semakin jauh berada di bawah garis kemiskinan, artinya sebagian besar penduduk kondisinya masih miskin dan secara ekonomi belum memperlihatkan tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Sementara itu apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 138.334,- (BPS 2009 : 52) pendapatan per kapitanya masih sedikit di atas provinsi Sulsel. Selanjutnya apabila pendapatan per kapita kawasan Pasimasunggu Timur dibandingkan dengan pendapatan per kapita kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2004 sebesar Rp 329.734,- per bulan memperlihatkan bahwa penduduk di Pasimasunggu Timur pendapatannya masih lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita penduduk di tingkat kabupaten, ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kawasan ini masih miskin dan belum sejahtera.

Apabila melihat disparitas pendapatan terendah (minimum) dan tertinggi (maximum) rumah tangga per bulan memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok, hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin. Hal tersebut kemungkinan karena adanya perbedaan dan kemampuan dalam mengakses informasi dan teknologi, seperti kepemilikan modal, lahan dan kepemilikan alat tangkap serta teknologi penangkapan. Selain itu, rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi pada umumnya memiliki beberapa sumber pendapatan seperti dari perikanan, pertanian/ perkebunan, perikanan budidaya (tambak), dan menjadi PNS (guru, pegawai kantor kecamatan). Selain itu diantara mereka memiliki usaha

perdagangan (warung/toko sembako) sehingga total pendapatannya menjadi besar.

Rendahnya pendapatan rumah tangga dan per kapita ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan tersebut tergolong penduduk miskin. Kemiskinan di kawasan ini juga dapat dilihat dari distribusi besaran pendapatan rumah tangga, dimana sekitar 83 persen rumah tangga memiliki pendapatan antara Rp. 500.000,- - Rp 1.000.000,-. Rumah tangga yang memiliki pendapatan tersebut tersebar dalam berbagai lapangan pekerjaan utama maupun tambahan, terutama perikanan tangkap, pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Untuk mengetahui besar kecilnya distribusi besaran pendapatan rumah tangga di dua desa kawasan Pasimasunggu Timur dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.8
Distribusi Pendapatan Rumah Tangga per Bulan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009

No	Besaran Pendapatan	Persentase
1	< 500.000	63.3
2	500.000 – 1 juta	20.3
3	1 juta – 1,5 juta	7.8
4	1.5 juta – 2 juta	5.5
5	2 juta – 2.5 juta	2.3
6	> 3.5 juta	0.8
	Total	100 (N 129)

Sumber: Data Dasar Survei Aspek Sosial Ekonomi, BME T2, Indonesia tahun 2009

Data di atas, memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Pasimasunggu Timur memiliki pendapatan pada kisaran antara Rp. 500.000,- sampai dengan 1 juta yang mencapai 83 persen. Sementara mereka yang memiliki pendapatan diatas Rp 1 juta sekitar 16 persen. Penduduk dengan pendapatan Rp 1 juta ke atas pada umumnya merupakan rumah tangga yang memiliki beberapa sumber pendapatan,

termasuk pekerjaan tambahan, seperti usaha perdagangan (warung), pertanian atau perkebunan. Sebagai contoh seorang memiliki pekerjaan utama sebagai PNS (guru, pegawai pemerintah) biasanya juga memiliki pekerjaan tambahan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, budidaya perikanan (tambak) dan memiliki ternak sapi, kambing atau ayam. Selain itu rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi tersebut, kemungkinan rumah tangga tersebut memiliki beberapa anggota rumah tangga yang bekerja dan memberi sumbangan pendapatan dalam rumah tangga tersebut. Tingginya pendapatan di atas berdasarkan observasi dan informasi nara sumber dipastikan bukan berasal dari program Coremap, karena sampai saat ini kegiatan Coremap di dua desa tersebut belum berjalan.

Pokmas UEP beserta anggotanya sampai sekarang belum memiliki program untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif. Menurut nara sumber kegiatan pokmas sejak dibentuk pada tahun 2005 belum pernah melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Coremap. Belum berjalannya kegiatan pokmas karena Seto, fasilitator jarang ada di lokasi, motivator desa kurang aktif, frekuensi penyuluhan dilakukan terbatas, tidak ada pembimbingan/pengarahan kegiatan sehingga mengakibatkan kegiatan pokmas menjadi mandeg (vakum). Selain itu para anggota pokmas belum pernah memperoleh pelatihan untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif untuk membantu meningkatkan pendapatan sehingga menambah semakin tidak berjalannya program Coremap di kawasan tersebut.

Apabila dilihat dengan batas kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia sebesar 2 dollar per hari atau sekitar atau sekitar Rp 600.000,- per bulan, besaran pendapatan di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih hidup di bawah garis kemiskinan bahkan masih jauh dari sejahtera, sesuai dengan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menunjukkan tingkat kesejahteraannya.

Pendapatan Kegiatan Kenelayanan

Rumah tangga nelayan pada dasarnya memiliki pendapatan yang tidak menentu (tidak stabil). Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilikan sarana perikanan, alat tangkap, wilayah tangkapan dan musim serta banyak hari nelayan melaut. Nelayan di desa Bontobulaeng dan Bontobaru pada umumnya dapat melaut pada saat gelombang tenang dan musim pancaroba, sedangkan pada musim gelombang tinggi (musim barat/angin kencang) mereka tidak melaut sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Untuk mengetahui pendapatan dari kegiatan kenelayan dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.2.9
Statistik Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan (ikan) per bulan Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Tahun 2009

No	Jenis Pendapatan	Besaran Pendapatan
1	Pendapatan Per Kapita	54.608
2	Rata-rata pendapatan	201.278
3	Median pendapatan	166.666
4	Pendapatan Minimum	30.000
5	Pendapatan Maksimum	833.333
	N	55

Sumber : Data Dasar Survei Aspek Sosial Ekoomi, BME T2 Indonesia Tahun 2009

Nelayan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, seperti halnya nelayan di Kecamatan Bontomantene merupakan nelayan yang bekerja secara mandiri, tidak tergantung pada pemilik modal (bos) sehingga mereka dapat menjual hasil tangkapan ikannya secara bebas kepada penduduk atau pedagang/pengumpul atau dijual ke pasar. Kecilnya pendapatan rumah tangga nelayan maupun per kapita nelayan karena sebagian besar nelayan dalam kegiatan kenelayanan menggunakan alat tangkap yang masih sangat sederhana antara lain pancing dan jaring. Pemilikan alat tangkap dan penggunaan teknologi penangkapan yang sederhana serta kemampuan melaut (*fishing ground*) yang relatif terbatas

dengan rata-rata 2-4 jam sehari, hasil tangkapan yang diperoleh juga sangat kecil sehingga penghasilan mereka juga terbatas (kecil) yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan per kapita.

Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan di kawasan Desa Bontobulaeng dan Bontobaru dalam satu bulan pada tahun 2009 sebesar Rp. 201.278,- Pendapatan tersebut relatif kecil bila dibandingkan batas kemiskinan yang dikeluarkan PBB maupun Bank Dunia. Rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut menunjukkan jumlah rumah tangga penduduk miskin, terutama rumah tangga nelayan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru masih sangat tinggi bahkan masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang mereka inginkan. Namun demikian pendapatan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang sama Rp. 126.380,- pada tahun 2006 (lihat Bandiyono 2008 : 132).

Kecilnya rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut selain kepemilikan alat tangkap yang sederhana, populasi ikan menurun, kemungkinan juga mengalami kesulitan dalam memasarkan berbagai hasil laut (ikan), tambak (budidaya). Hasil tangkapan ikan tersebut hanya dapat mereka jual pada hari pasaran, yang berlangsung tiga kali dalam satu minggu yang berbeda hari antara desa satu dengan lainnya. Pada hari-hari tersebut rumah tangga nelayan baru memperoleh pendapatan (uang).

Sementara itu apabila melihat pendapatan minimum dan maksimum memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok antara rumah tangga nelayan yang satu dengan yang lain. yang dapat juga memperlihatkan kesenjangan tingkat ekonomi (kesejahteraan) antar mereka. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi kepemilikan alat tangkap dan teknologi penangkapan serta kemampuan melaut (*fishing ground area*), kapal-kapal mereka memiliki daya jelayah yang lebih luas hari melaut lebih lama sehingga dapat memperoleh pendapatan yang cukup besar. Selain itu juga dipengaruhi jumlah ART yang bekerja dan kemungkinan mereka memiliki beberapa sumber pendapatan diluar kegiatan kenelayanan sehingga pendapatan total (maksimum) menjadi

tinggi. Nelayan di desa ini pada umumnya dapat melaut pada saat musim angin timur (gelombang tenang) dan musim pancaroba, sementara pada saat angin barat (gelombang kuat) atau angin kencang mereka tidak melaut sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan berdasarkan musim dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 3.2.10
Distribusi pendapatan Rumah Tangga per bulan Menurut Musim Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kaupaten Kepulauan Selayar 2009

No	Jenis Pendapatan	Pendapatan menurut musim		
		Gelombang kuat	Pancaroba	Gelombang Tenang
1	Pendapatan Rata-rata	129.818	189.109	284.909
2	Median	50.000	150.000	200.000
3	Minimum	0	0	0
4	Maksimum	1.250.000	1.256.000	1.000.000
	N	55	55	55

Sumber : Data Dasar Survei Aspek Sosial Ekoomi, BME T2 Indonesia Tahun 2009

Data pada tabel di atas memperlihatkan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan dari kegiatan kenelayanan sangat variasi yang pada umumnya dipengaruhi oleh musim, alat tangkap, wilayah tangkap dan lama waktu melaut. Rata-rata pendapatan tertinggi terjadi pada saat gelombang tenang dibandingkan dengan pendapatan pada saat gelombang kuat dan pancaroba. Pada saat gelombang tenang umumnya nelayan melaut dengan memanfaatkan alat tangkap dan teknologi penangkapan secara maksimal. Mereka melaut dengan jumlah hari yang lebih panjang, dan wilayah tangkapan yang lebih luas. Hasil tangkapan pada saat musim gelombang tenang jumlah perolehan ikan cukup banyak sehingga pendapatan yang diperoleh juga lebih besar dibandingkan dengan musim gelombang kuat dan pancaroba. Sebaliknya pada saat musim gelombang kuat atau angin barat, sebagian besar nelayan tidak berani melaut, karena gelombang besar dan kadang

timbul badai yang membayakan jiwa nelayan. Nelayan pada umumnya hanya berani mencari ikan dengan memancing di sekitar pantai atau rumah sehingga pendapatan relative kecil, bahkan tidak memperoleh ikan, hanya cukup untuk lauk makan sehari-hari

Sementara itu terjadi perbedaan yang mencolok antara pendapatan maksimum dan minimum antara musim gelombang tenang, pancaroba dan gelombang kuat. Pendapatan nelayan maksimum pada saat gelombang lemah, pancaroba dan gelombang kuat relative cukup besar dibandingkan dengan pendapatan minimum. Pada saat gelombang kuat sebenarnya ikan jenis tertentu keberadaannya relative banyak, permintaan ikan tinggi, tetapi hasil tangkapan terbatas sehingga pendapatan yang diterima nelayan kecil. Pada gelombang besar dan angin kencang bahkan nelayan ada yang tidak melaut sehingga perolehan ikan sedikit yang selanjutnya pendapatan nelayan juga kecil. Sedangkan pada musim pancaroba pendapatan maksimum nelayan memperlihatkan lebih tinggi dibandingkan musim gelombang tenang. Hal tersebut kemungkinan karena kenaikan permintaan ikan tinggi, hasil tangkapan juga banyak dan harga ikan masih tinggi dan sehingga pendapatan nelayan pada saat musim tersebut masih cukup tinggi.

Pada musim gelombang kuat dan pancaroba harga berbagai jenis ikan sangat mahal satu ikat ikan ekor kuning bisa mencapai harga Rp 15 ribu- Rp 20 ribu. Sementara pada saat musim gelombang tenang jumlah ikan relatif banyak, kemampuan melaut relatif lama dan daya jangkauan jelajah (*fishing ground*) juga jauh sehingga terjadi over (kelebihan) produksi. Kelebihan produksi tersebut selanjutnya menyebabkan harga ikan menjadi rendah, dengan rata-rata harga ikan pada kisaran Rp. 3000,- sampai Rp. 6.000,- setiap ikat sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Pendapatan tersebut di atas selain dipengaruhi musim, juga dipengaruhi oleh kepemilikan sarana dan jenis alat tangkap nelayan. Begitu pula jumlah hari melaut nelayan yang berbeda pada setiap musim gelombang akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Rata-rata hari melaut pada saat gelombang kuat sekitar 2 hari, sementara pada gelombang lemah jumlah

hari melaut nelayan mencapai 15 hari, bahkan satu turo (istilah lokal) penuh selama 20-23 hari setiap bulan. Pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2009 menurut musim memperlihatkan perbedaan pendapatan yang cukup besar antara rumah tangga yang satu dengan yang lain pada saat musim yang berbeda.

Pendapatan Pokmas dan Non Pokmas

Seperti telah diuraikan dimuka, pokmas di desa Bontobulaeng dan Bontobaru sudah terbentuk sejak tahun 2005, namun sampai saat sekarang belum memiliki program untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif. Belum adanya kegiatan pokmas di dua desa tersebut karena berbagai hal diantaranya fasilitator dan Seto jarang ada di lokasi, sementara mativator desa kurang berjalan dengan baik. Faktor lain adalah pengurus LPSTK tidak kontinyu melakukan pertemuan baik dengan fasilitator, pengurus pokmas maupun dengan anggota masyarakat sehingga pokmas "berjalan sendiri" tanpa arahan yang memadai untuk mengembangkan kegiatan pokmas, terutama untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif. Selain itu pokmas hanya "menunggu" turunnya bantuan dana untuk mengembangkan kegiatannya.

Dana yang sudah turun di dua desa tersebut berupa bantuan dana simpan pinjam (*seed fund*) masing-masing desa pada tahun 2007 (Bontobaru) dan desa Bontobulaeng (2009). Dana simpan pinjam tersebut di desa Bontobaru telah disalurkan kepada anggota pokmas dan masyarakat umum yang memerlukan. Anggota pokmas yang meminjam antara lain terdiri dari anggota pokmas konservasi dan masyarakat umum. Pada umumnya yang memanfaatkan meminjam pedagang kue, usaha menjahit dan nelayan. Pinjaman tersebut pada umumnya digunakan untuk menambah modal usaha dan memperbaiki jaring. Besar pinjaman masing-masing anggota Rp 1 juta sampai dengan Rp. 1,5 juta melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dengan bunga 2,5 persen dengan lama angsuran 10 bulan. Anggota pokmas yang meminjam dana bergulir di desa Bontobaru jumlahnya cukup banyak,

hal itu ditandai dengan banyaknya orang yang telah mengembalikan dana pinjaman tersebut yang mencapai 25 orang dan yang meminjam jumlahnya sekitar 30 orang (wawancara dengan ketua LKM desa Bontobaru). Pengembalian dana pinjaman tersebut selanjutnya dipinjamkan kepada orang lain untuk modal usaha yang produktif.

Sementara itu di desa Bontobulaeng dana simpan pinjam yang dikelola LKM belum disalurkan kepada anggota pokmas atau masyarakat, karena dana simpan pinjam baru diterima pada pertengahan tahun 2009. Pengurus LKM baru terbentuk pada Juni 2009 dan kegiatannya saat ini menyusun administrasi seperti membuat aturan sistem peminjaman. Sementara itu pokmas belum memiliki program kegiatan yang produktif yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat nelayan (pesisir).

Pendapatan pokmas dengan pinjaman modal usaha dari LKM yang dikembangkan anggota pokmas dan masyarakat di dua desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.11
Pendapatan Pokmas dan Non Pokmas Desa Bontobulaeng dan Bontobaru
Kabupaten Kepulauan Selayar 2009

No	Jenis Pendapatan	Pokmas	Non Pokmas
1	Rata-rata	633.888	549.582
2	Median	235.000	400.000
3	Minimum	166.666	30.000
4	Maksimum	1.500.000	4.300.000
	N	3	126

Sumber : Data Dasar Survei Aspek Sosial Ekoomi, BME T2 Indonesia Tahun 2009

Menurut data di atas anggota pokmas yang meminjam uang untuk menambah modal usaha di kawasan Pasimasunggu Timur sebanyak 3 orang. Sebenarnya peminjam dana ini jumlahnya relative cukup banyak, terutama di desa Bontobaru, sementara di desa Bontobulaeng usaha simpan pinjam atau dana bergulir belum berjalan. Rata-rata pendapatan anggota pokmas (lihat tabel 3.2.11) lebih besar

dibandingkan dengan pendapatan non anggota pokmas, tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan garis kemiskinan yang dikeluarkan PBB maupun Bank Dunia. Sebaliknya terdapat perbedaan yang mencolok pendapatan minimum dan maksimum anggota pokmas. Ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kaya dan miskin diantara anggota pokmas yang menerima bantuan modal usaha. Hal ini kemungkinan terkait dengan jenis usaha yang dimiliki anggota pokmas sehingga pendapatannya juga berbeda.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan nara sumber penerima dana bergulir (dengan ibu N, pak D dan pak S) menyebutkan bahwa pinjaman tersebut dapat menambah modal usaha, tetapi tidak dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, kurang bermanfaat, karena jumlah dana pinjaman terlalu kecil. Jumlah pinjaman yang terlalu kecil tersebut juga dikemukakan 5 orang responden di dua desa tersebut. Sebagai contoh anggota pokmas dengan usaha menjahit meminjam Rp. 1 juta. Pinjaman digunakan untuk membeli bahan baku (kain) untuk membuat baju. Hasil penjualan baju tersebut keuntungannya relatif kecil sekitar 10 persen dari modal dasar. Anggota pokmas konservasi meminjam dana sebesar Rp 1,5 juta untuk memperbaiki jarring. Dana bergulir tersebut bermanfaat, karena memperoleh uang tunai untuk memperbaiki jarring yang telah rusak. Namun demikian dana pinjaman tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan anggota pokmas nelayan, karena untuk membeli bahan-bahan seperti benang, timah dan pelampung "pas-pasan" sehingga hanya cukup untuk memperbaiki jaring dan peralatan tambahan (timah, pelampung). Selain itu menurut nara sumber (peminjam, ibu N) jangka waktu pengembalian dana pinjaman terlalu pendek, meskipun sistem pengembaliannya, termasuk bunga, dan jaminan untuk agunan tidak menjadi masalah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini telah menyimpulkan bahwa pada umumnya pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang dan kegiatan COREMAP telah tinggi. Hal ini berarti bahwa program sosialisasi COREMAP telah menimbulkan dampak positif dilihat dari penguasaan pengetahuan. Banyak diantara mereka yang setuju kebijakan pelarangan pengambilan terumbu karang, pelarangan menggunakan alat tangkap yang merusak terumbu karang seperti bom dan racun sianida. Menurut mereka telah ada kecenderungan adanya penurunan penggunaan bom dan racun sianida. Meskipun demikian masih memerlukan upaya yang lebih keras untuk mensosialisasikan COREMAP mengingat masih ada kelompok kecil masyarakat yang belum mengetahui manfaat terumbu karang dan kegiatan COREMAP. Selain itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan serta penggunaan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan juga belum tinggi.

Walaupun kegiatan COREMAP mengalami banyak kendala, namun demikian keberadaan COREMAP di dua kawasan lokasi penelitian ini memberikan dampak positif khususnya dalam penyadaran masyarakat tentang arti pentingnya penyelamatan terumbu karang. Hal itu terbukti terjadinya penurunan kegiatan masyarakat yang menggunakan obat bius (potassium/sianida) dan bom di kawasan terumbu karang. Informasi larangan penggunaan obat bius dan bom telah menyebar pada sebagian nelayan lokal dan nelayan pendatang sehingga sebagian nelayan yang biasanya menggunakan obat bius/potassium dan bom tidak berani melakukan kegiatannya di lokasi ini.

Pendapatan penduduk di kedua kawasan (daratan dan pulau kecil) menunjukkan terjadi peningkatan baik rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita pada kurun waktu 2006-2008. Pendapatan rumah tangga di Bontomatene dan Buki meningkat sebesar 17,81 persen dan di Pasimasunggu Timur naik sebesar 42,9 persen. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan cukup tinggi, tetapi sebagian besar penduduk di kedua kawasan tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan tingkat kabupaten. Tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi jika diukur dari batasan garis kemiskinan 1,35 \$ US per hari. Distribusi pendapatan rumah tangga juga memperlihatkan jumlah rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan rendah cukup besar.

Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan pulau kecil lebih besar dibandingkan dengan pulau besar, tetapi rata-rata pendapatan per kapita dan pendapatan rumah tangga di kawasan daratan tetap lebih besar dibandingkan kawasan pulau kecil. Pendapatan per kapita di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil pada tahun 2008 masing-masing sebesar 276 ribu rupiah dan 195 ribu rupiah. Adapun rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan daratan pulau besar 940 ribu rupiah dan di pulau kecil 725 ribu rupiah. Distribusi pendapatan di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kedua kawasan mempunyai pendapatan rendah yaitu di bawah Rp 500 ribu.

Peningkatan pendapatan penduduk dilokasi COREMAP berkaitan dengan beberapa faktor seperti : pertama, kenaikan harga ikan (baik ikan laut maupun ikan tambak (bandeng)), karena adanya inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Kedua, hasil panen padi yang cukup bagus karena satu tahun terakhir bisa panen dua kali, karena adanya curah hujan yang cukup tinggi. Ketiga, penangkapan ikan sunu yang harganya cukup tinggi, karena adanya penampung di Bonto Baru. Hal itu didukung dengan kebijakan pemerintah memberi bantuan ketinting (perahu), sehingga hasil penangkapan sunu bisa lebih baik. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan pendapatan, tetapi secara riil pendapatan penduduk di kedua lokasi hampir sama, karena

peningkatan pendapatan tersebut belum memperhitungkan inflasi di daerah. Jika dikontrol dengan inflasi di daerah, pendapatan penduduk di kedua lokasi cenderung sama sehingga tingkat kesejateraan tidak mengalami perubahan. Peningkatan pendapatan tampaknya juga tidak berhubungan dengan kegiatan coremap di daerah tersebut, karena sampai saat ini usaha ekonomi produktif yang dijalankan di kedua lokasi tersebut baru berjalan dan tidak memberikan dampak positif yang secara langsung dirasakan masyarakat. Dana bergulir hanya sekitar 25 juta, sehingga sifat dana hanya sebagai dana pendukung untuk usaha rumah tangga.

Pengetahuan masyarakat di kawasan pulau kecil tentang terumbu karang sudah cukup baik, hal itu terlihat banyaknya masyarakat yang sudah mengetahui bahwa terumbu karang sebagai makhluk hidup dan mengetahui berbagai kegunaan terumbu karang. Namun demikian sebagian masyarakat masih belum mengetahui bahwa terumbu karang sebenarnya merupakan jenis hewan. Masyarakat juga mengetahui dan memiliki pandangan bahwa terumbu karang itu perlu dilestarikan karena memiliki peranan penting (tempat pemijahan ikan). Sementara itu sebagian besar responden berpandangan bahwa terumbu karang di sekitar kawasan desa kondisinya kurang baik (rusak).

Adanya berbagai kegunaan terumbu karang, sebagian besar masyarakat tidak menyetujui pengambilan karang baik karang hidup maupun karang mati. Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui adanya aturan pemerintah yang melarang mengambil dan merusak terumbu karang dan sebagian besar masyarakat menyetujui adanya larangan tersebut. Sementara masyarakat juga mengetahui adanya sanksi yang dikenakan bagi masyarakat/nelayan yang melanggar aturan tersebut.

Berkaitan dengan beberapa jenis alat tangkap yang merusak lingkungan sumber daya laut (termasuk terumbu karang), terutama potasium, bom dan pukat harimau, sebagian masyarakat sudah mengetahui. Sementara itu sebagian besar masyarakat/responden juga sudah mengetahui bahwa penggunaan pukat harimau dilarang dan

adanya sanksi bagi mereka yang melanggar. Namun demikian dalam kaitannya penggunaan pukot harimau tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pukot harimau dilarang oleh pemerintah, hal itu karena di kawasan ini tidak ada nelayan yang menggunakan pukot harimau, sehingga sosialisasi tentang pukot harimau tidak pernah ada. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa penggunaan bom dan obat bius saat ini ada kecenderungan terjadi penurunan yang cukup tajam, meskipun masih ada di beberapa lokasi.

Berkaitan dengan keberadaan kegiatan Coremap, meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui, namun jumlah yang belum mengetahui juga masih cukup banyak. Hal itu membuktikan bahwa sosialisasi tentang kegiatan Coremap masih kurang. Kurangnya sosialisasi tentang kegiatan Coremap karena fasilitator maupun senior fasilitator (Seto) jarang ada di lokasi desa binaan, sementara fasilitator maupun pengurus lain (LPSTK) kurang memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi.

Meskipun sudah banyak yang program yang dilakukan melalui program Coremap, namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kegiatan tersebut. Bagi mereka yang sudah mengetahui, sebagian besar mengaku tidak terlibat, sehingga pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Coremap masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi juga disebabkan banyak kegiatan Coremap yang pelaksanaannya masih eksklusif, kurang melibatkan masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan pembentukan LPSTK, meskipun sudah melibatkan masyarakat, tetapi jumlah masyarakat yang terlibat jumlahnya terbatas, masih banyak masyarakat yang tidak dilibatkan. Begitu pula dalam penyusunan RPTK maupun penentuan DPL hanya melibatkan pengurus LPSTK, fasilitator, motivator, Seto dan tokoh masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mengetahui kegiatan LKM (Lembaga Keuangan Mikro), kecuali hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan. Sementara itu sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apalagi terlibat dalam kegiatan pokmas (kelompok masyarakat), karena sampai saat ini tidak

ada kegiatan yang dilakukan oleh pokmas. Bahkan, beberapa orang yang dianggap anggota pokmas justru banyak yang tidak mengetahui status keanggotaannya.

Nelayan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, seperti halnya nelayan di Kecamatan Bontomantene merupakan nelayan yang bekerja secara mandiri, tidak tergantung pada pemilik modal (bos) sehingga mereka dapat menjual hasil tangkapan ikannya secara bebas (pedagang/pengumpul atau dijual ke pasar). Kecilnya pendapatan rumah tangga nelayan karena masih menggunakan alat tangkap yang masih sederhana (pancing dan jaring), kemampuan melaut (*fishing ground*) yang terbatas, hasil tangkapan kecil sehingga akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan.

Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan di kawasan Desa Bontobulaeng dan Bontobaru dalam satu bulan pada tahun 2009 sebesar Rp. 201.278,- Pendapatan tersebut relatif kecil apabila dibandingkan batas kemiskinan yang dikeluarkan PBB maupun Bank Dunia. Rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama rumah tangga nelayan. Hal tersebut terlihat di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru yang hidupnya masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang mereka inginkan. Namun demikian pendapatan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang sama Rp. 126.380,- pada tahun 2006 (lihat Bandiyono 2008 : 132).

Peningkatan pendapatan di desa Bontobaru dan Bontobulaeng tahun 2009 dibandingkan tahun 2006 karena sebagian rumah tangga memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain dari pertanian (persawahan, kebun mede), perdagangan dan pegawai negeri (guru, pegawai kecamatan). Kebetulan saat ini di kawasan ini sedang panen mede sehingga kemungkinan peningkatan pendapatan responden/masyarakat berasal dari hasil penjualan mede. Peningkatan pendapatan di dua desa tersebut dipastikan bukan berasal dari kegiatan Coremap, karena sampai saat ini kegiatan Pokmas, terutama dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif (MPA), sementara

program-program pemerintah lainnya (PNMP Mandiri) juga belum ada di lokasi desa ini.

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan cukup tinggi, tetapi sebagian besar penduduk di kedua kawasan tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan tingkat kabupaten. Tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi jika diukur dari batasan garis kemiskinan 1,35 \$ US per hari. Distribusi pendapatan rumah tangga juga memperlihatkan rumah tangga yang termasuk dalam kelompok pendapatan rendah jumlahnya cukup besar.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas penelitian memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- Sosialisasi tentang kegiatan Coremap di kawasan pulau besar (daratan) maupun di pulau kecil (Pulau Jampea, Pasimasunggu Timur) perlu lebih ditingkatkan, baik yang berkaitan dengan keberadaan Coremap maupun berkaitan dengan kegiatan Coremap, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan keberadaan Coremap dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat melihat dan mengetahui manfaat dan pentingnya kegiatan Coremap.
- Keberadaan Seto dan fasilitator di lokasi desa Coremap perlu dievaluasi. Terlalu seringnya Seto dan fasilitator meninggalkan lokasi desa binaan berpengaruh terhadap program Coremap, kiranya perlu dipantau melalui mekanisme tertentu, seperti membuat laporan bulanan (Seto dan fasilitator) yang diketahui oleh kepala desa setempat. Selain itu perlunya kontrol dari pemerintahan desa terhadap kegiatan Seto dan fasilitator yang dibuat oleh aparat desa atau pengurus LPSTK. Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Coremap dapat dikontrol melalui dua mekanisme yaitu dari

pelaksana kegiatan (Seto dan fasilitator) dan pemerintah desa lokasi Coremap.

- Pentingnya evaluasi terhadap rekrutmen Seto dan fasilitator yang lebih transparan. Selain itu perlu kedisiplinan dan sanksi dalam melaksanakan kontrak kerja sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap Seto dan fasilitator perlu kesinambungan dengan periodisasi teratur (4 bulan, 6 bulan) sehingga dapat dilakukan pengawasan program secara berkesinambungan.
- Pertemuan antara pengurus LPSTK dengan pengurus Pokmas perlu lebih diintensifkan baik dalam merencanakan program kegiatan Coremap maupun melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan Coremap. Melalui pertemuan rutin, LPSTK dapat mengetahui kegiatan Pokmas khususnya dalam kegiatan MPA dan membantu menyelesaikan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi setiap Pokmas.
- Kegiatan yang dilaksanakan Coremap sebaiknya harus tetap melibatkan masyarakat secara aktif, meskipun kegiatan tersebut melibatkan pihak ke tiga. Penggunaan pihak ketiga, karena membutuhkan keahlian tertentu dalam pelaksanaan kegiatan program. Namun demikian dalam setiap kegiatan sebaiknya tetap melibatkan masyarakat untuk membantu mengerjakan.
- Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan perlu kiranya upaya peningkatan kegiatan MPA melalui pokmas agar supaya dapat membantu menambah pendapatan rumah tangga, terutama rumah tangga masyarakat pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. (2006). *.Aspek Social Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar*. Jakarta : P3O-LIPI
- BPS Kabupaten Selayar. 2005. *Kabupaten Selayar Dalam Angka 2004/2005*. Selayar: Kerjasama Bainslada dan BPS
- BPS Kabupaten Selayar. 2003. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Selayar 2003*. Kerjasama BPS dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Selayar.
- BPS. 2006. Survei Pertanian tahun 2004.
- CRITIC-COREMAP-LIPI. (2007). *Monitoring Ekologi Selayar*. Jakarta: COREMAP II-LIPI
- Daniel Suryadarma, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, 2006, *Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia* Lembaga Penelitian Jakarta : SMERU
- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. 2003. "Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan". Kerjasama Coremap dan DFW Indonesia.
- Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pualau-Pulau Kecil. (2005). *Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang*. Jakarta: Dep. Kelautan dan Perikanan
- Hardin, G. 1968. "The Tragedy of Commons". Dalam *Science* 162 No. 3855.
- Hidayati Deny.(ed). 2002. *Data dasar Aspek Terumbu Karang Indonesia: Studi Kasus Desa Mola Utara, Kecamatan Wang-*

Wangi, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara. Jakarta:
COREMAP-LIPI

Kompas, 9 Desember 2006

Masyhuri Imron . 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Laut secara Terpadu
: Industri Pengolahan Hasil Laut*. Jakarta : PMB-LIPI

Ministry of The People's Welfare. 2002. "Indonesia Country Report
Population and Poverty"

Much, Zulfikar, dkk. 2002. "Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan
di Kepulauan Sinjai.". Jakarta: COREMAP-LIPI

Pedoman Rakyat. 28 Agustus 2006

Pemerintah Kabupaten Selayar. 2006. "Peraturan Bupati Selayar Nomor
04 Tahun 2006, Tentang RPJMD 2006-2010".

Saleh, Nur Alam. 2000. "Legenda Asal Mula Gong Nekara, Jangkar
Raksasa dan Meriam Kuno di Daerah Kabupaten Selayar".
Dalam *Buletin Bosara* 16(VII).

Wahyono, Ary dkk. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*.
Yogyakarta Media Pressindo.

Widayatun (ed). 2001. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang
Indonesia (Studi Kasus Kampung Meobekwan, Distrik Waigeo
Utara, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua, COREMAP – LIPI*.



M I L I K

PERPUSTAKAAN PPK - LIPI